



**DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memberikan arah dan target secara transparan kepada organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Strategis periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai indikator target pertahunnya.

Guna pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan maka disusun dokumen Laporan Kinerja, dalam hal ini adalah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini disusun sebagai upaya pemantauan dan monitoring berkala terhadap capaian kinerja secara periode triwulan untuk memperoleh data analisa dan evaluasi guna memberikan masukan dan arahan terhadap perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun berjalan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini sebagai bagian dari langkah dan strategi untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif, dan diharapkan dengan disusunnya laporan ini, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan organisasi Kementerian Perhubungan dan pada khususnya untuk mencapai target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan RidhoNya dalam memberikan bimbingan dan arahan guna terwujudnya tujuan keamanan dan keselamatan Pelayaran Transportasi Laut.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Jakarta, Januari 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA
NIP. 19670320 199203 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	I - 1
I.1 Latar Belakang	I - 1
I.2 Struktur Organisasi Dan Tugas Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I - 4
I.3 Sumber Daya Manusia	I - 32
I.4 Isu Strategis Dan Permasalahan Yang Dihadapi	I - 33
BAB II PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL	
PERHUBUNGAN LAUT	II - 1
II.1 Perencanaan Strategis.....	II - 1
II.2 Perjanjian Kinerja	II - 1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT JENDERAL	
PERHUBUNGAN LAUT	III - 1
III.1 Capaian Kinerja.....	III - 1
III.2 Kontribusi Terhadap Capaian Indikator Kegiatan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 42 III - 43
III.3 Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	IV - 1
III.1 Kesimpulan	IV - 1
III.2 Langkah Kedepan	IV - 3

DAFTAR TABEL

I.3.1	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan	I - 32
I.3.2	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan	I - 33
II.2.1	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 (Awal).....	II - 2
II.2.2	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 (Revisi).....	II - 3
III.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	III - 4
III.1.2	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional.....	III - 6
III.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1)	III - 8
III.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1).....	III - 9
III.1.5	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur	III - 9
III.1.6	Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur Tahun 2021	III - 10
III.1.7	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2)	III - 11
III.1.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2).....	III - 12
III.1.9	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	III - 13
III.1.10	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3)	III - 16
III.1.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3).....	III - 17
III.1.12	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	III - 18
III.1.13	Jumlah Kejadian Kecelakaan dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2021	III - 20
III.1.14	Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2021	III - 21

III.1.15	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4).....	III – 24
III.1.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4).....	III – 24
III.1.17	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut Tingkat Kehandalan Kenavigasian	III – 25
III.1.18	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program Kelima (5)...	III – 27
III.1.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5).....	III - 28
III.1.20	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	III – 28
III.1.21	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6)	III - 30
III.1.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6).....	III - 31
III.1.23	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M).....	III - 31
III.1.24	Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan dan Jumlah Kapal > 400 GT Terdaftar.....	III - 33
III.1.25	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)	III - 34
III.1.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7).....	III - 34
III.1.27	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	III – 35
III.1.28	Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi	III - 37
III.1.29	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8).....	III - 40
III.1.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8).....	III – 41

III.2.1	Kontribusi Terhadap Capaian IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 (Posisi 31 Desember 2021).....	III – 42
III.3.1	Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2021	III – 43
III.3.2	Realisasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2021	III – 50
III.3.3	Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut...	III – 51
III.3.4	Pengukuran Dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021	III - 52

DAFTAR GRAFIK

III.1.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional.....	III - 7
III.1.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk (Loop) Secara Teratur	III - 10
III.1.3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama	III - 13
III.1.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut.....	III - 18
III.1.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut.....	III - 25
III.1.6	Tingkat Keandalan Kenavigasian.....	III - 29
III.1.7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimum 0,5 M/M).....	III - 32
III.1.8	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi.....	III - 36

DAFTAR GAMBAR

I.2.1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	I - 4
I.2.3.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I - 17
I.2.3.2	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama	I - 19
I.2.3.3	Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan	I - 21
I.2.3.4	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan...	I - 23
I.2.3.5	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan	I - 25
I.2.3.6	Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)	I - 26
I.2.3.7	Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi.....	I - 28
I.2.3.8	Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.....	I - 29
I.2.3.8	Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.....	I - 30



BAB 1

Pendahuluan

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Capaian Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana setiap unit Eselon I sampai dengan Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2021 secara berkala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada dasarnya mencoba mengkomunikasikan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya stratejik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran stratejiknya dalam kerangka pemenuhan Sasaran Program yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis serta Sasaran Program organisasi telah dibakukan di dalam suatu dokumen Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam mendukung capaian sasaran strategis ditetapkan sejumlah Indikator Keluaran Program. Pemenuhan atas sasaran stratejik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan stratejik organisasi di akhir tahun kelima.



Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Instansi Pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan



1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

1.2.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2.1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1.2.2. Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a. Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Perhubungan, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang transportasi laut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



b. Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut; kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

c. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- 3) Direktorat Kepelabuhanan;
- 4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- 5) Direktorat Kenavigasian; dan
- 6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.



Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi tersebut, yaitu:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b) Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- 1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
- 2) Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- 3) Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan;
- 4) Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- 5) Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
- 6) Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



c) Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Kepegawaian;
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- e. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- f. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

a. Bagian Perencanaan

1) Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Perencanaan

- a. Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan pinjaman/hibah serta kerja sama;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



b. Bagian Keuangan

1) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Keuangan

- a. Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi anggaran dan koordinasi pelaksanaan reuvisi anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta monitoring estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit aparat fungsional intern, monitoring penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola anggaran/barang; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi pelaksanaan reuvisi laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern, serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reuvisi laporan keuangan.



c. Bagian Kepegawaian

1) Tugas Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Kepegawaian

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama kali, pengembangan karier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan pengendalian gratifikasi.

d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

1) Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.



2) Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

- a. Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

e. Bagian Umum dan Perlengkapan

1) Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan suratmenyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.



f. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

1) Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standarisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

a) Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan.



b) Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha - 143 - angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.



3) Direktorat Kepelabuhanan

a) Tugas Direktorat Kepelabuhanan

Direktorat Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

b) Fungsi Direktorat Kepelabuhanan

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas



pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;

- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

a) Tugas Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaiklautan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, perlindungan lingkungan maritim dan kepelautan.

b) Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai



angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang - 180 - tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;

- c. Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan 181 perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.



5) Direktorat Kenavigasian

a) Tugas Direktorat Kenavigasian

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang kenavigasian.

b) Fungsi Direktorat Kenavigasian

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.



6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

a) Tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana

b) Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

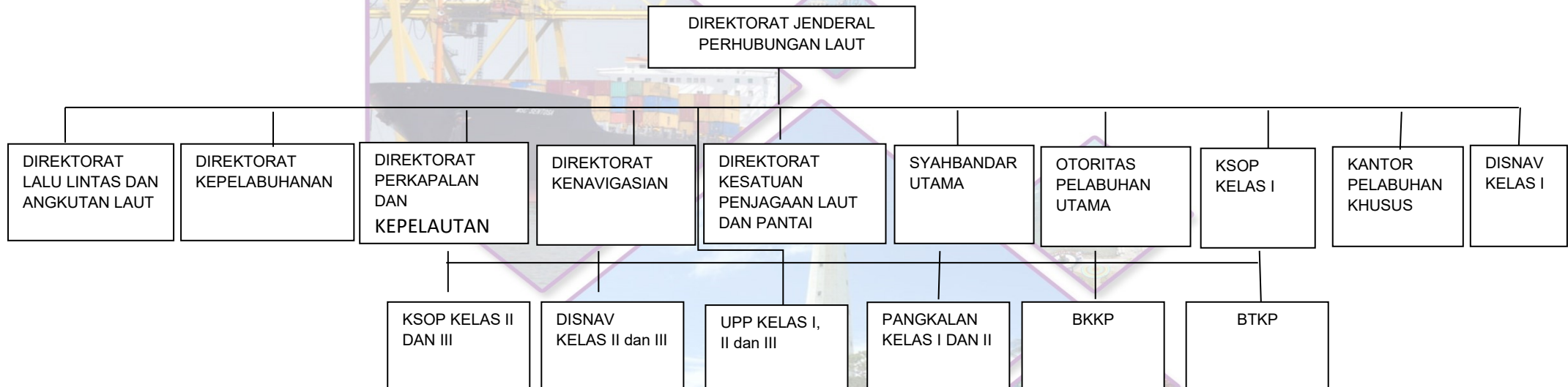
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib - 219 - pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- c. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.



1.2.3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

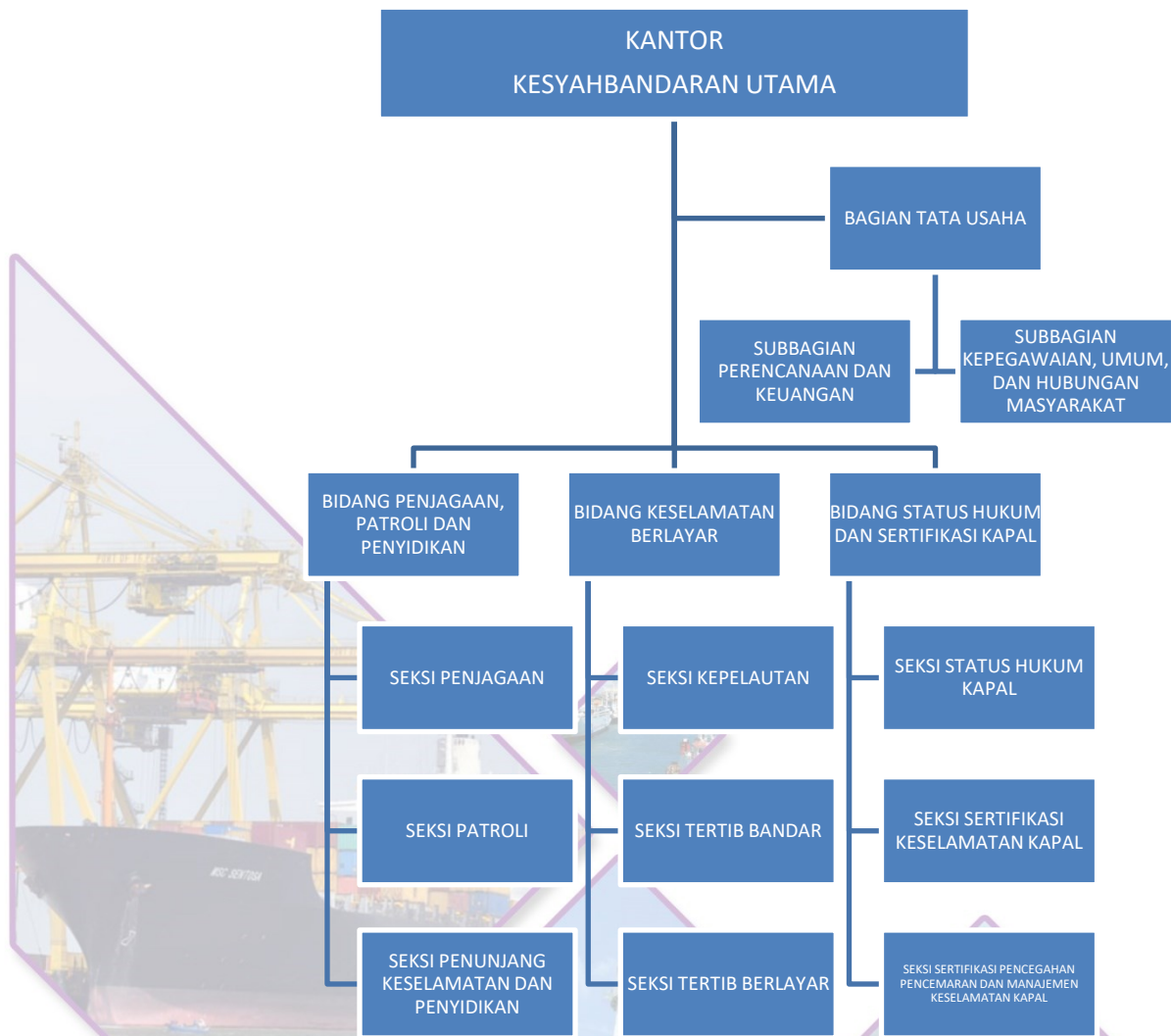


Gambar 1.2.3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

**d. Tugas dan Fungsi kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Hubla****1) Kantor Kesyahbandaran Utama**

Berdasarkan PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta peneritan Surat Persetujuan Berlayar;
- b) Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
- c) Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal;
- d) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan disembarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi;
- e) Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/ SAR*), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime;
- f) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g) Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- i) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.



Gambar 1.2.3.2 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama

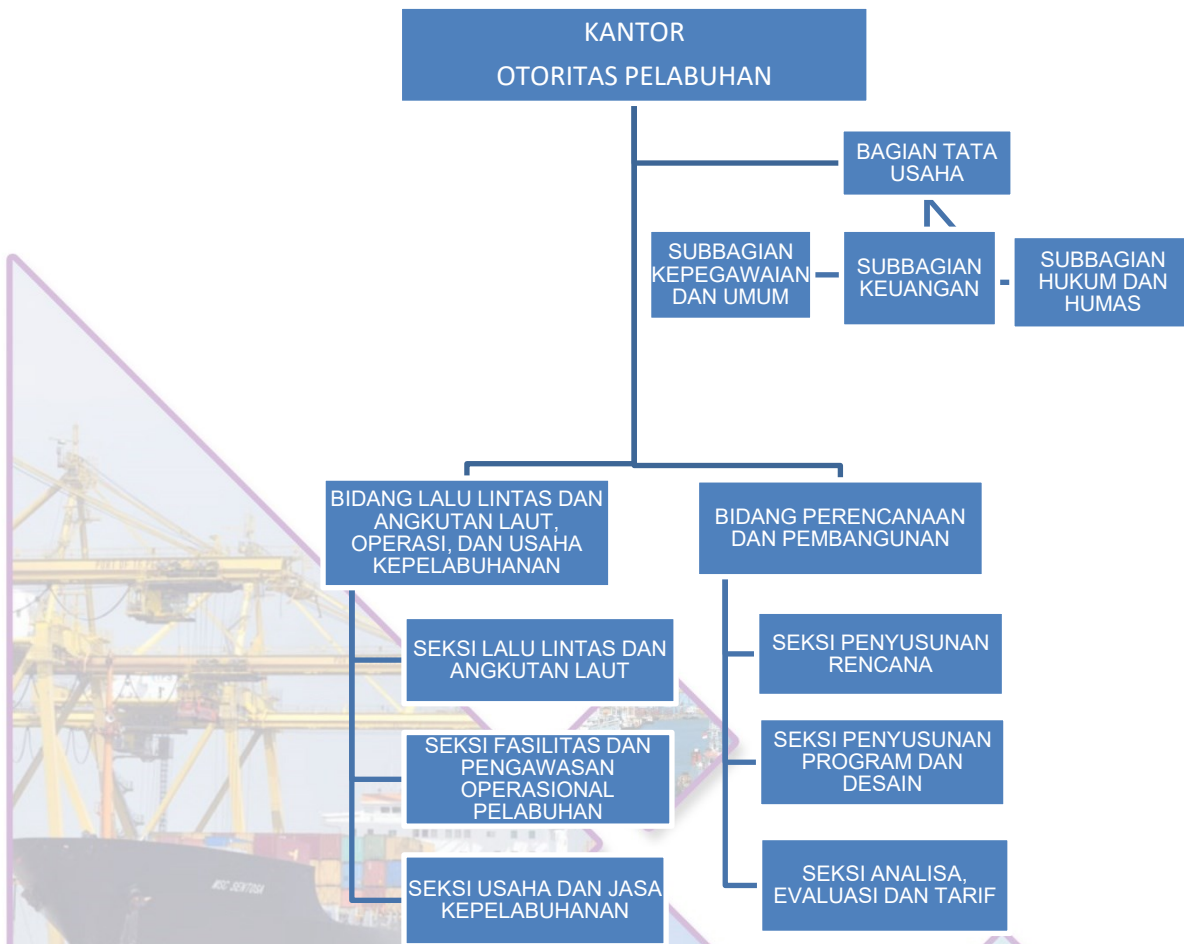
2) Otoritas Pelabuhan Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi serta jaringan jalan dan sarana bantu navigasi pelayaran, sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan;



- b) Penyusunan rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
- c) Penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- e) Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- f) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;;
- g) Pelaksanaan peran sebagai wakil Pemerintah dalam pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan;
- h) Pelaksanaan pembinaan usaha dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
- i) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hUbugan masyarakat.



Gambar 1.2.3.3 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan

3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan kemandirian pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
- Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
- Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang,

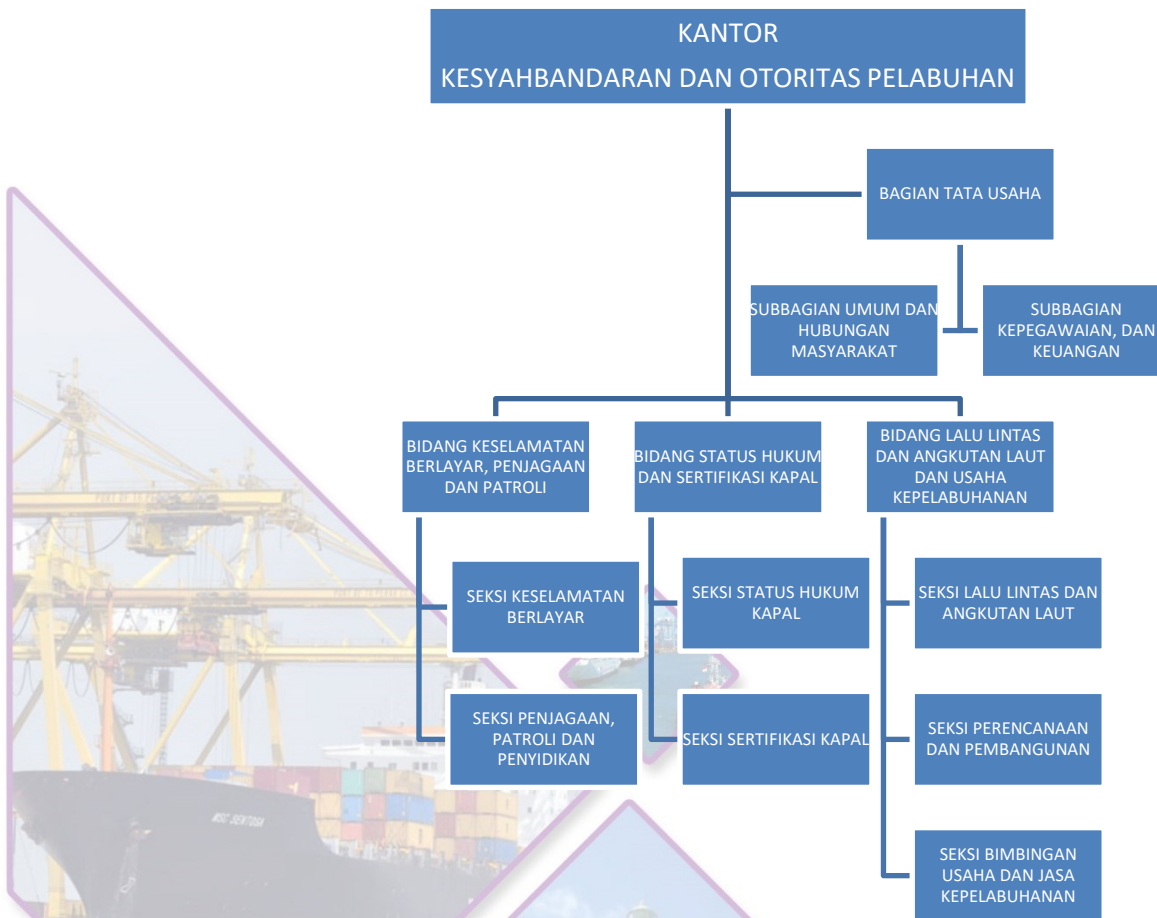


pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

- d) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f) Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tariff untuk ditetapkan Menteri;
- g) Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- h) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
- i) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
- j) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
- k) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hokum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelas, yaitu:

- a) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- b) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
- c) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
- d) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV



Gambar 1.2.3.4 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

4) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran untuk memperlancar angkutan laut, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilikan, verifikasi dan sertifikasi surat dan dokumen di bidang kelaiklautan kapal;
- Pelaksanaan pengawasan tertib berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di perairan pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;



- c) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d) Pelaksanaan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, ke karantina, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e) Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- f) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dalam hal keamanan dan ketertiban di pelabuhan melalui pembentukan Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) dan Petugas Keamanan Pelabuhan (*Port Security Officer*);
- g) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- h) Pelaksanaan pengawasan penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- i) Pelaksanaan penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri;
- j) Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- k) Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;
- l) Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat; dan
- m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



Gambar 1.2.3.5 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

5) Unit Penyelenggara Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP);
- Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
- Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
- Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;
- Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;



- g) Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- h) Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- i) Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- j) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

Unit Penyelenggara Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I
- b) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
- c) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III



Gambar 1.2.3.6 Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)

6) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai, melalui pelaksanaan fungsi berikut:

- a) Penyusunan rencana, program dan evaluasi;
- b) Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai;
- c) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran;
- d) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/ eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air;



- e) Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran;
- f) Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan;
- g) Pelaksanaan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi;
- h) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistic;
- i) Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan.

Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelas, yaitu:

- a) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I
- b) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II

7) Distrik Navigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Distrik Navigasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survey hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

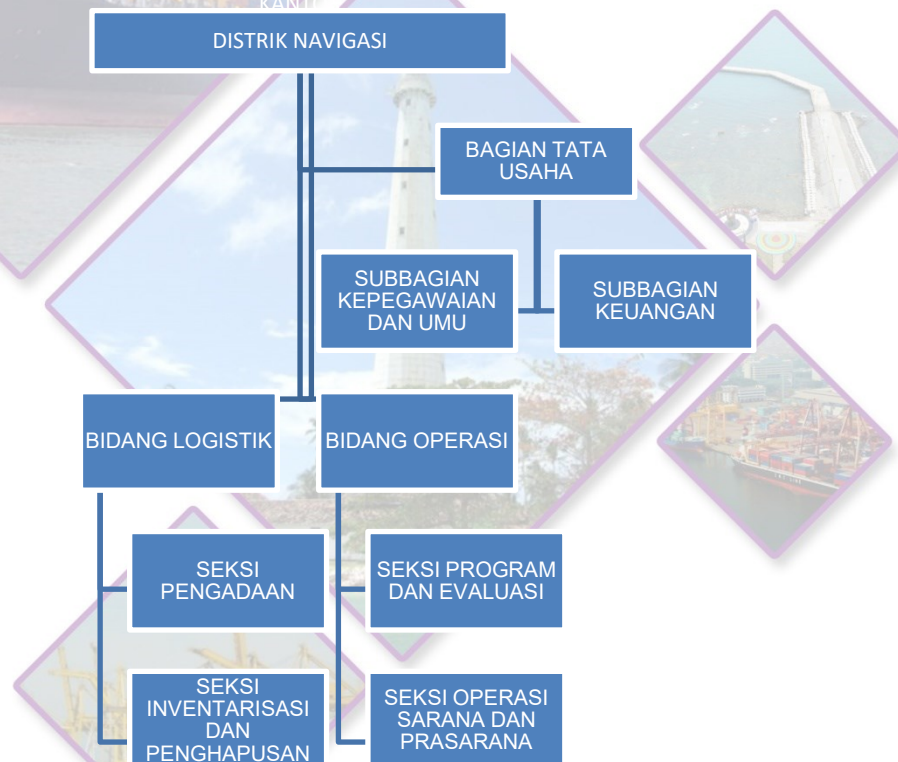
- a) Penyusunan rencana dan program pengoperasian, serta pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survey hidrografi serta pemantauan alur dan perlintasan;
- b) Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- c) Pelaksanaan program pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, dan fasilitas pangkalan serta bengkel;



- d) Pelaksanaan pengamatan laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- e) Pelaksanaan urusan logistic;
- f) Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- g) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.

Distrik Navigasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a) Distrik Navigasi Kelas I
- b) Distrik Navigasi Kelas II
- c) Distrik Navigasi Kelas III



Gambar 1.2.3.7 Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi



8) Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran serta Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- b) Melaksanakan rancang bangun dan pembuatan alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- c) Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- d) Melaksanakan survey pelayaran, posisi alat keselamatan pelayaran, penentuan kedalaman;
- e) Melaksanakan pemberitaan keselamatan pelayaran;
- f) Menetapkan rencana program kerja serta evaluasi;
- g) Melaksanakan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- h) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- i) Memelihara dan merawat sarana dan prasarana;
- j) Mengoperasikan sarana, prasarana dan instalasi.



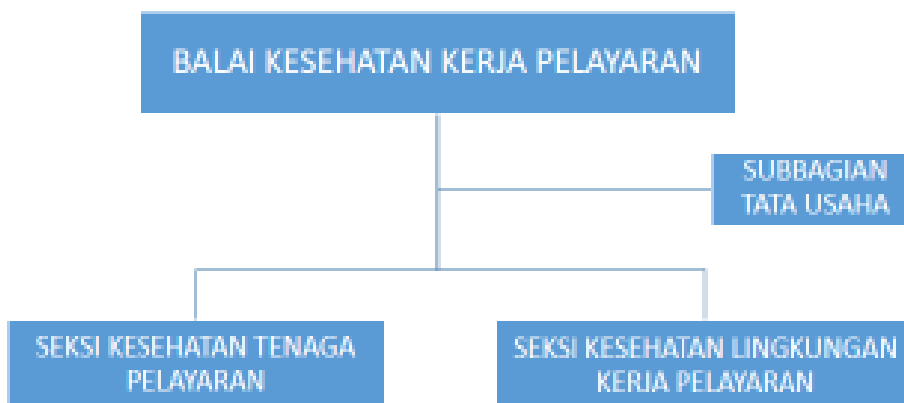
Gambar 1.2.3.8 Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran



9) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pengujian, penilaian, dan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga fungsional pelayaran serta penilaian dan penilikan terhadap lingkungan kerja pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program serta evaluasi;
- b) Pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeliharaan kesehatan tenaga fungsional pelayaran;
- c) Pelaksanaan penilaian dan penilikan penerapan keselamatan kerja, gizi kerja, ergonomic, hygiene dan sanitasi;
- d) Pelaksanaan penilaian lingkungan kerja pelayaran;
- e) Penyiapan penyusunan pedoman pengujian kesehatan, pemeliharaan dan lingkungan kerja pelayaran;
- f) Penyiapan penyusunan standar kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- g) Pemberian sertifikasi kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- h) Penilaian rumah sakit untuk pengujian dan penilaian kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran;
- i) Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.



Gambar 1.2.3.9 Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran



I.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2021 yaitu 13.310 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel I.3.1

Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		2020	2021
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	5	3
3.	IV/c	20	22
4.	IV/b	74	64
5.	IV/a	313	310
6.	III/d	1408	1335
7.	III/c	1677	1602
8.	III/b	3445	3295
9.	III/a	2444	2386
10.	II/d	1606	1574
11.	II/c	1855	1863
12.	II/b	473	399
13.	II/a	401	440
14.	I/d	13	12
15.	I/c	1	1
16.	I/b	4	4
17.	I/a	0	0
TOTAL		13.739	13.310



2) Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel I.3.1

Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		2020	2021
1.	S3	9	11
2.	Spesialis	2	9
3.	S2	1052	1023
4.	S1	3.856	3732
5.	D4	177	177
6.	D3	1.264	1195
7.	D2	16	15
8.	D1	62	57
9.	SLTA atau Kurang	7.301	7091
TOTAL		13.739	13.310

I.4 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pada tahun 2021 terdapat beberapa program/ kegiatan yang disusun sebagai upaya dalam menghadapi isu-isu tersebut, antara lain:

- Pembangunan Pelabuhan Patimban;
- Proyek-proyek yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- Program pendukung Pariwisata (Labuhan Bajo, Sanur dan Likupang);
- Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
- Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Bidang Kepelabuhanan;
- Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
- Program Pelayanan Pelayaran Perintis;
- Program Pelayanan angkutan ternak (sebagai wujud menjawab isu *animal welfare*);
- Penerapan Sistem *Inaportnet* secara bertahap pada 2024 pelabuhan komersil;
- Pengembangan Sistem Informasi Kepelautan;
- Pembangunan Menara Suar Tanjung Batu – Disnav Tarakan;
- Pembangunan Kapal Patroli PLP Kelas III, IV dan V.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021

II.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kegiatan Program yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2020 – 2024) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 – 2024.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Performance Contract*). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla telah dirumuskan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 – 2024. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan beberapa kegiatan pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2021 (yang sudah ditandatangani antara



Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 disusun setelah DIPA Tahun 2021 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang memuat Pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Tabel II.2.1.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 (Awal)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut					
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Dan Aksesibilitas Transportasi Laut	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,89
		IKP2	Rute Pelayaran Yang Saling Terhubung (loop)	%	25
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP3	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	%	82
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,21
		IKP5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,29
		IKP6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,25
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,4
		IKP8	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi	%	100



Tabel II.2.2.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 (Revisi)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut					
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Dan Aksesibilitas Transportasi Laut	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,89
		IKP2	Rute Pelayaran Yang Saling Terhubung (loop)	%	25
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP3	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	%	82
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,21
		IKP5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,29
		IKP6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,25
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,4
		IKP8	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi	%	100



BAB III

Capaian Kinerja

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari target yang ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Kinerja.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. **Perencanaan Kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan dalam Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.



2. **Perjanjian Kinerja** adalah Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
3. **Pengelolaan Data Kinerja** adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data kinerja.
4. **Pengukuran Kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
6. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan draft RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Program di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Program yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rumus dari pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$



- b) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Tinjau Ulang draft RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

- c) Terhadap target capaian kinerja yang telah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Program di dalam perencanaan kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja atau dokumen PK, di dalam dokumen PK menetapkan target Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja.





III.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target PK Tahun 2021 dan Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kegiatan Program Tahun 2021

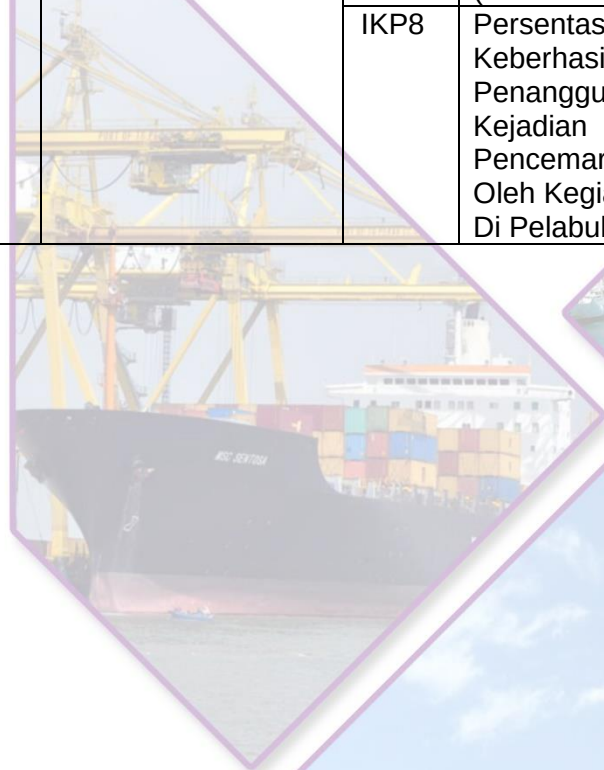
Tabel III.1.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					CAPAIAN KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,89	0,893	0,893	0,893	0,898	0,898	100,90
		IKP2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	25	25	25	25	25	25	100
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82	93,44	74,78	96,87	104,19	104,19	127,06
SP.3	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	IKP4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,21	1,10	1,09	1,02	1,14	1,14	106
		IKP5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan	/100.000 Pelayaran	0,29	0	0	0	0	0	200



			Transportasi Laut								
		IKP6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,25	98,18	98,17	98,66	97,95	97,95	100,72
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,4	0,287	0,347	0,407	0,468	0,468	117
		IKP8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100	100	100	100	100	100	100





SASARAN PROGRAM (1)

Sasaran Program **Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi Laut** dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1) adalah “**Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional**”
 - a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) :**

Tabel III.1.2

Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,89	0,893	0,893	0,893	0,898	0,898	100,90

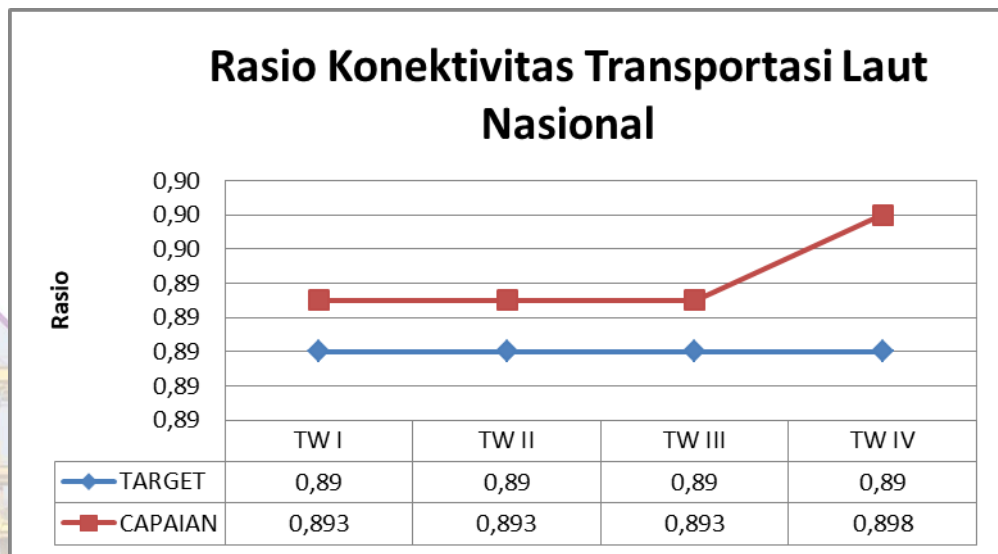
Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun target Rasio Konektivitas Transportasi Laut pada Tahun 2021 sebesar 0,89 Rasio. Pencapaian pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi sebesar 0,893 Rasio (terdapat 1 tambahan pelabuhan laut yang telah dilayani kapal angkutan laut yaitu Pelabuhan Sebuku), sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 0,898 Rasio (terdapat 3 tambahan pelabuhan laut yang telah dilayani kapal angkutan laut yaitu Pelabuhan Barus, Pelabuhan Pangkalan Dodek dan Pelabuhan Tanjung Beringin) sehingga persentase kinerjanya mencapai 100,90%. Pada Tahun 2021 maka secara keseluruhan jumlah pelabuhan yang telah dilayani kapal angkutan laut menjadi 571 pelabuhan sedangkan total pelabuhan laut ada 636 pelabuhan sehingga masih terdapat 65 pelabuhan yang belum terlayani kapal angkutan laut. Terlampir daftar pelabuhan yang sudah dan belum terlayani oleh kapal angkutan laut.



Grafik III.1.1

Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional



Rasio konektivitas transportasi laut nasional diukur dengan menghitung jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang diperuntukkan sebagai layanan angkutan laut, atau dengan rumus:

$$\text{Rasio konektivitas transportasi laut nasional} = \frac{\sum \text{jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut}}{\sum \text{jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut}}$$

$$\text{Rasio konektivitas transportasi laut nasional} = \frac{571 \text{ Pelabuhan}}{636 \text{ Pelabuhan}} = 0,898$$

Pada saat ini, beberapa trayek tol laut sudah beroperasi dengan model *loop service* dengan harapan operasionalnya lebih efektif dan efisien. Selain itu, beberapa trayek tol laut dan perintis juga sangat mendukung konektivitas nasional dalam rangka mendukung program prioritas seperti Kawasan Pariwisata, Kawasan Ekonomi dan lainnya. Pemerintah hanya mengintervensi melalui program tol laut dan perintis dan untuk kapal swasta tidak bisa karena regulasi di bidang angkutan laut memberikan kebebasan kepada pelayaran untuk berusaha sesuai dengan mekanisme pasar. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan upaya untuk lebih meningkatkan kinerja di masa mendatang dengan terus memonitor dan mengawasi pelaksanaan operasional angkutan laut baik yang dilaksanakan oleh swasta maupun operator tol laut dan perintis. Layanan angkutan laut sampai dengan Triwulan IV telah menjangkau 571 pelabuhan sehingga pada Tahun 2021 terdapat tambahan 4 pelabuhan yaitu Pelabuhan Sebuku,



Pelabuhan Barus, Pelabuhan Pangkalan Dodek dan Pelabuhan Tanjung Beringin sedangkan total pelabuhan laut ada 636 pelabuhan, sehingga masih terdapat 65 pelabuhan yang belum terlayani moda kapal angkutan laut. Peranan dan dukungan Pemerintah Daerah dalam mempromosikan pelabuhan kepada para pemilik barang yang menggunakan pelabuhan untuk mengirimkan barang antar pulau juga berkontribusi pada pencapaian target 100%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) :

Untuk IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional, target yang ditetapkan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 sama, yaitu dengan target rasio sebesar 0,89 (dari *benchmark* sebanyak 636 pelabuhan ditargetkan untuk mendukung konektivitas sebanyak 567 pelabuhan). Untuk Tahun 2020 target tercapai dengan realisasi sebesar 0,89, dan untuk Tahun 2021 melampaui target, dengan realisasi sebanyak 571 pelabuhan atau sebesar 0,89. Adapun peningkatan realisasi konektivitas didukung oleh Pelabuhan Sebuku, Pelabuhan Barus, Pelabuhan Pangkalan Dodek dan Pelabuhan Tanjung Beringin.

Tabel III.1.3

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1)

IKU (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKP (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	Target	0,89	0,89
				Realisasi	0,89	0,898
				Kinerja (%)	100	100,90

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) :

Untuk IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional pada Tahun 2021 terdapat realisasi kinerja sebesar 0,898 Rasio dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,89 Rasio sehingga pencapaian kinerjanya 100,90% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,89	0,898	100,90

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut

2) Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2) adalah “Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur”.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur (IKP 2) :

Tabel III.1.5

Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	25	25	25	25	25	25	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.



Adapun target Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur Tahun 2021 sebesar 25%. Pencapaian pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar 25% sehingga persentase kinerja pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel III.1.6

Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur Tahun 2021

NO	JARINGAN TRAYEK
1	Tanjung Perak - Makassar - Tahuna - Tanjung Perak
2	Tanjung Perak - Makassar - Bobong - Luwuk - Tanjung Perak
3	Tanjung Priok - Teluk Bayur - Tanjung Priok
4	Tanjung Perak - Kupang - Tanjung Perak
5	Tanjung Perak - Merauke - Tanjung Perak
6	Tanjung Perak - Maumere - Tanjung Perak
7	Tanjung Priok - Lhokseumawe - Malahayati - Sabang - Tanjung Priok
8	Makassar -Bungku- Kolonodale- Makasar
9	Tanjung Perak - Oransbati - Wasior - Nabire - Serui - Waren - Sarmi -Tanjung Perak
10	Tanjung Perak - Tidore - Morotai - Galela - Maba - Weda - Tanjung Perak
11	Tanjung Perak - Fakfak - Kaimana - Timika - Agats - Elat - Tanjung Perak
12	Kupang - Rote - Sabu - Waingapu – Kupang
13	Maumere - Larantuka - Lewoleba - Kalabahi - Maumere
14	Tanjung Perak - Makassar- Jailolo - Morotai - Tanjung Perak
15	Tanjung Perak - Wanci - Namrole - Pulau Obi - Tanjung Perak
16	Tanjung Perak - Saumlaki - Dobo - Tanjung Perak
17	Tanjung Perak - Badas - Bima - Tanjung Perak

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.

Grafik III.1.2

Persentase Pencapaian Trayek pelayaran yang Membentuk (loop) Secara Teratur





Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur diukur dengan menghitung jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop dibandingkan dengan jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner), atau dengan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop} = \frac{\sum \text{jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop}}{\sum \text{jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop} &= \frac{17 \text{ trayek}}{67 \text{ trayek}} \times 100\% \\ &= 25\% \end{aligned}$$

Secara bertahap pola trayek angkutan laut peti kemas berubah. Pelayaran nasional mulai memiliki pola angkutan peti kemas yang tetap dan teratur, tidak lagi menyinggahi setiap pelabuhan secara komuter. Pada awal pelayarannya kapal akan singgah di pelabuhan shelter sampai pada pelabuhan tujuan akhir, setelah sampai di pelabuhan tujuan akhir kapal langsung kembali ke pelabuhan awal.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur (IKP 2) :

Untuk IKP 2 Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur, yaitu pada Tahun 2021 terdapat target sebesar 25% dengan realisasi sebesar 25% sedangkan Tahun 2020 target sebesar 24% dengan realisasi sebesar 24% sehingga persentase kinerja pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel III.1.7

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2)

IKU (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKP (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur	%	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur	%	Target	24	25
				Realisasi	24	25
				Kinerja (%)	100	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur (IKP 2) :

Untuk IKP 2 Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur, pada Tahun 2021 terdapat realisasi kinerja sebesar 25% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 25% sehingga persentase pencapaiannya 100% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.1.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur	%	25	25	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut

SASARAN PROGRAM (2)

Sasaran Program **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut** terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

3) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3) adalah “Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul”

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Program Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul (IKP 3) :



Tabel III.1.9

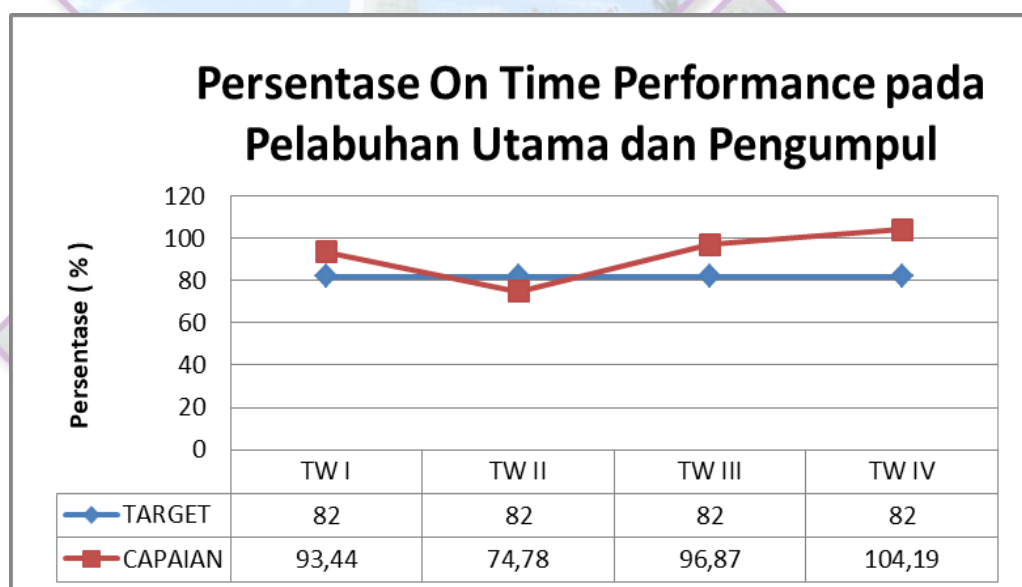
Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82	93,44	74,78	96,87	104,19	104,19	127,06

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan dan Aplikasi SIRANI, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun target Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul Tahun 2021 sebesar 82%. Pencapaian pada Triwulan I sebesar 93,44%, pada Triwulan II sebesar 74,78%, dan Triwulan III sebesar 96,87%, sedangkan pada Triwulan IV sebesar 104,19% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 127,06% melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan di Masing-masing Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut semakin meningkat dan data UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang masuk sesuai dari Aplikasi SIRANI.

Grafik III.1.3

Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul



Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan merupakan nilai rata-rata dari pencapaian *Waiting Time* (WT), *Approach Time* (AT), *Effective Time: Berth Time* (BT) terhadap standar yang ditetapkan pada pelabuhan utama yang diusahakan secara komersial di pelabuhan. Pencapaian kinerja di pelabuhan terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan kapal (pencapaian *Waiting Time* (WT) dan pencapaian *Approach Time* (AT)) serta pencapaian kinerja di terminal (pencapaian *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)).

Kinerja di pelabuhan terdiri atas kinerja pelayanan kapal (*Waiting Time* (WT) dan *Approach Time* (AT)), untuk kinerja pelayanan di terminal berupa *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT).

a) Kinerja pelayanan kapal terdiri dari :

- (1) *Waiting Time* (WT) merupakan selisih waktu antara waktu penetapan kapal masuk di area lego jangkar dengan waktu saat pandu naik ke atas kapal (*Pilot on Board/POB*) pada pelayanan kapal masuk ke pelabuhan. *Waiting Time* (WT) disajikan dalam satuan Jam.
- (2) *Approach Time* (AT) merupakan waktu perjalanan untuk kapal masuk dan/atau kapal keluar dari dan/atau ke pelabuhan. Untuk kapal masuk ke pelabuhan dihitung saat kapal mulai bergerak dari lokasi lego jangkar sampai saat ikat tali di tambatan (*first line*), sedangkan untuk kapal keluar dari pelabuhan dihitung mulai lepas tali (*last line*) sampai kapal mencapai area ambang luar (keluar dari area lego jangkar). *Approach Time* (AT) disajikan dalam satuan Jam.

b) Kinerja pelayanan di terminal berupa *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)

Effective Time : Berthing Time (ET:BT) atau rasio waktu kerja kapal di tambatan merupakan perbandingan waktu kapal berkerja efektif di dermaga (terminal) dengan waktu kapal selama di tambatan dermaga (terminal). *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT) disajikan dalam satuan Persentase (%).

Pencapaian kinerja di pelabuhan yang terdiri dari pencapaian *Waiting Time* (WT), *Approach* (AT), dan *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT), merupakan perbandingan capaian kinerja di pelabuhan dengan standar yang telah ditentukan. Adapun rumus untuk masing-masing unsur pencapaian kinerja sebagai berikut:

a) Pencapaian *Waiting Time* (WT)

$$\text{Pencapaian WT Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian WT pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar WT pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$

b) Pencapaian *Approach Time* (AT)

$$\text{Pencapaian AT Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian AT pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar AT pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$

c) Pencapaian *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)

$$\text{Pencapaian (ET:BT)} = \frac{\text{Capaian (ET:BT) pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar (ET:BT) pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$

Dengan demikian, **Rumus Perhitungan Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan** merupakan rata-rata dari Capaian atas

Waiting Time (WT) + *Approach Time* (AT) + *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)

Nilai WT dan AT diperoleh dari realisasi pelayanan pemanduan di pelabuhan. Ketersediaan Tenaga Pandu dan kondisi geografis alur pelayaran mempengaruhi tingkat pelayanan pandu. Permintaan pemanduan secara bersamaan namun tidak didukung oleh ketersediaan tenaga pandu akan menghambat capaian WT, sedangkan kondisi alur pelayanan yang berkelok serta arus pasang surut juga dapat menghambat capaian AT. Nilai ET:BT merupakan perbandingan waktu kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal (ET) dengan waktu kapal tambat di dermaga (BT). Pencapaian ET:BT sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan tenaga kerja di pelabuhan. Saat terjadi hujan, maka aktifitas kegiatan bongkar muat akan dihentikan sementara. Penggunaan tenaga kerja di pelabuhan masih dominan, sehingga aktifitas bongkar muat di pelabuhan akan terhambat dengan menurunnya produktivitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan. Realisasi Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan terdiri dari:

$$\text{Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan} = \frac{\text{Pencapaian WT} + \text{Pencapaian AT} + \text{Pencapaian (ET:BT)}}{3}$$

Realisasi Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan Per Bulan (OTP) terdiri dari:

$$\text{Pencapaian AT Pelabuhan} = \frac{90,33\%}{82\%} \times 100\% = 110,15\%$$

$$\text{Pencapaian WT Pelabuhan} = \frac{85\%}{82\%} \times 100\% = 103,65\%$$



$$\text{Pencapaian (ET:BT) Pelabuhan} = \frac{81\%}{82\%} \times 100\% = 98,78\%$$

Sehingga diperoleh:

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase Pencapaian} & 110,15\% + 103,65\% + & \\ \text{Standar Kinerja Pelayanan} & 98,78\% & = 104,19\% \\ \text{Pelabuhan} = & \frac{3}{3} & \end{array}$$

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa mendatang sebagai berikut :

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Standar Kinerja Operasional Pelabuhan untuk meningkatkan angka realisasi yang tercatat;
2. Menghimbau UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menerbitkan/merubah standar kinerja yang disesuaikan kondisi operasional pelabuhan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul (IKP 3) :

Untuk IKP 3 Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul, yaitu pada Tahun 2021 terdapat target sebesar 82% dengan realisasi sebesar 104,19% sehingga persentase pencapaian sebesar 127,06% sedangkan Tahun 2020 target sebesar 81% dengan realisasi sebesar 97,22% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 120,02% dan melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan di Masing-masing Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut semakin meningkat.

Tabel III.1.10

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3)

IKU (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKP (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	Target	81	82
				Realisasi	97,22	104,19
				Kinerja (%)	120,02	127,06

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul (IKP 3) :

Untuk IKP 3 Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul pada Tahun 2021 terdapat realisasi kinerja sebesar 104,19% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 82% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 127,06% melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan di Masing-masing Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut semakin meningkat.

Tabel III.1.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82	104,19	127,06

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut

SASARAN PROGRAM (3)

Sasaran Program **Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

4) Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4) adalah “Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut”

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) :



Tabel III.1.12

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut

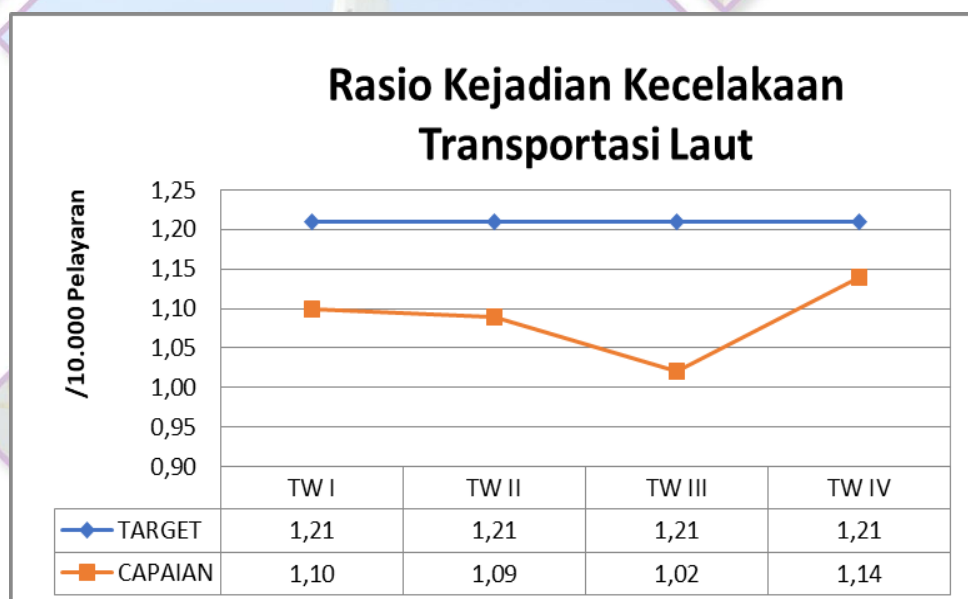
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,21	1,10	1,09	1,02	1,14	1,14	106

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut target tahun 2021 sebesar 1,21/10.000 Pelayaran. Terlihat realisasi pada Triwulan I sebesar 1,10 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 10 orang), dan pada Triwulan II sebesar 1,09 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 49 orang), sedangkan pada Triwulan III sebesar 1,02 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 3 orang) dan pada Triwulan IV sebesar 1,14 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 13 orang) sehingga total korban jiwa yang meninggal/hilang pada Tahun 2021 sebanyak 75 orang dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 106%.

Grafik III.1.4

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut





Realisasi capaian rasio kejadian kecelakaan ini dihitung berdasarkan perhitungan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut} = \frac{\Sigma \text{Kejadian Kecelakaan}}{\Sigma \text{SPB yang diterbitkan}} \times 10.000 \text{ Pelayaran}$$

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut} = \frac{100}{877.000} \times 10.000 \text{ Pelayaran} = 1,14$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(1,21 - (1,14 - 1,21))}{1,21877.000} \times 100\% = 106\%$$

Pada tahun 2021 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada Triwulan I sebanyak 282.000 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh teknis, alam dan manusia sebesar 31 kejadian, pada Triwulan II sebanyak 475.000 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh teknis, alam dan manusia sebesar 52 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 1,09 Kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 109,92%. Pada tahun 2021 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan sampai Triwulan III sebanyak 713.000 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh teknis, alam dan manusia sebesar 73 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 1,02 Kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 115,7%. Pada tahun 2021 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan sampai Triwulan IV sebanyak 877.000 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh teknis, alam dan manusia sebesar 100 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 1,14 Kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 106%.



Dalam rangka mengurangi rasio kejadian kecelakaan transportasi laut, sub sektor perhubungan laut telah melakukan beberapa program/ kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penerbitan maklumat pelayaran tentang peringatan cuaca *extrim* secara berkala;
2. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
3. Evaluasi Monitoring Perwira Jaga Dalam Penerbitan SPB;
4. Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla;
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Pelaksanaan Kegiatan Uji Petik Pemeriksaan Kapal menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
7. Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit pelaksana teknis;
8. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran ke beberapa UPT yang banyak melayani Kapal Pelayaran rakyat.

Tabel III.1.13
Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2021

NO	BULAN	FAKTOR PENYEBAB			TRIWULANAN	JUMLAH SPB 2021	
		ALAM	MANUSIA	TEKNIS		BULANAN	TRIWULANAN
1	Januari	7	3	3	31	113.000	282.000
2	Februari	8	1	5		72.000	
3	Maret	1	0	3		97.000	
4	April	5	3	1	21	118.000	193.000
5	Mei	3	0	4		25.000	
6	Juni	1	3	1		50.000	
7	Juli	4	1	1	21	66.000	238.000
8	Agustus	4	1	4		78.000	
9	September	1	0	5		94.000	
10	Oktober	2	3	3	27	60.000	164.000
11	November	2	1	3		77.000	
12	Desember	6	6	1		27.000	
	TOTAL	44	22	34	100	877.000	877.000

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.



Tabel III.1.14
Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2021

No	Lokasi Kecelakaan Kapal	Jumlah Kecelakaan	Penyebab	Tanggal Kejadian
1	KSOP Samarinda	1	Alam	Januari
2	KSOP Banjarmasin	1	Alam	Januari
3	KSOP Tg Balai Karimun	1	Manusia	Januari
4	UPP Nipah Panjang	1	Alam	Januari
5	UPP Dobo	1	Manusia	Januari
6	KSOP Tg Emas	1	Alam	Januari
7	KSOP Banjarmasin	1	Alam	Januari
8	KSOP Tg Pandan	1	Teknis	Januari
9	KSOP Tegal	1	Alam	Januari
10	KSU Tg Perak	1	Manusia	Januari
11	UPP Agats	1	Teknis	Januari
12	KSOP Gresik	1	Alam	Januari
13	UPP Soasio	1	Teknis	Januari
14	UPP Raja Ampat	1	Alam	Februari
15	KSOP Sintete	1	Alam	Februari
16	UPP Masalembo	1	Alam	Februari
17	UPP Soasio	1	Teknis	Februari
18	KSOP Celukan Bawang	1	Alam	Februari
19	KSOP Samarinda	1	Teknis	Februari
20	UPP Kolonedale	1	Teknis	Februari
21	KSOP Muntok	1	Alam	Februari
22	UPP Soasio	1	Teknis	Februari
23	KSOP Ambon	1	Alam	Februari
24	KSOP Sintete	1	Teknis	Februari
25	UPP Sapeken	1	Alam	Februari
26	KSOP Pangkal Balam	1	Manusia	Februari
27	UPP Telaga Biru	1	Alam	Februari
28	KSOP Sorong	1	Teknis	Maret
29	KSU Tg Priok	1	Teknis	Maret
30	KSOP Bakauheni	1	Alam	Maret
31	KSOP Tarakan	1	Teknis	Maret
32	UPP Indramayu	1	Manusia	April
33	UPP Banggai	1	Alam	April
34	UPP Wonoreli	1	Manusia	April
35	KSOP Benoa	1	Alam	April
36	KSOP Samarinda	1	Alam	April
37	UPP Bau-Bau	1	Manusia	April
38	UPP Raha	1	Teknis	April
39	UPP Sungai Guntung	1	Alam	April



40	UPP Sungai Guntung	1	Alam	April
41	UPP Masalembu	1	Teknis	Mei
42	KSOP Benoa	1	Alam	Mei
43	UPP Buli	1	Teknis	Mei
44	UPP Likupang	1	Alam	Mei
45	KSOP Talang Dukuh	1	Alam	Mei
46	UPP Saumlaki	1	Teknis	Mei
47	UPP Sanana	1	Teknis	Mei
48	UPP Bunyu	1	Alam	Juni
49	KSOP Bima	1	Manusia	Juni
50	KSOP Laurentius Say Maumere	1	Manusia	Juni
51	UPP Dobo	1	Manusia	Juni
52	UPP Gilimanuk	1	Teknis	Juni
53	KSOP Pangkalan Bun	1	Teknis	Juli
54	UPP Kotaagung	1	Alam	Juli
55	KSOP Sukamara	1	Alam	Juli
56	KSU Tg Perak	1	Manusia	Juli
57	UPP Namlea	1	Alam	Juli
58	UPP Labuhan	1	Alam	Juli
59	KSOP Bitung	1	Teknis	Agustus
60	UPP Soasio	1	Manusia	Agustus
61	KSOP Manokwari	1	Alam	Agustus
62	KSOP Benoa	1	Alam	Agustus
63	UPP Bau-Bau	1	Teknis	Agustus
64	KSOP Kumai	1	Alam	Agustus
65	UPP Teluk Melano	1	Teknis	Agustus
66	UPP Pangandaran	1	Alam	Agustus
67	KSU Belawan	1	Teknis	Agustus
68	KSOP Bagan Siapi-API	1	Alam	September
69	KSOP Banjarmasin	1	Teknis	September
70	KSOP Banjarmasin	1	Teknis	September
71	UPP Kolonodale	1	Alam	September
72	KSOP Batam	1	Teknis	September
73	UPP Kolonodale	1	Teknis	September
74	KSOP Samarinda	1	Teknis	Oktober
75	KSOP Teluk Palu	1	Alam	Oktober
76	KSOP Benoa	1	Teknis	Oktober
77	UPP Benete	1	Alam	Oktober
78	KSOP Sorong	1	Manusia	Oktober
79	KSOP Banjarmasin	1	Teknis	Oktober
80	UPP Dobo	1	Manusia	Oktober
81	KSOP Labuan Bajo	1	Manusia	Oktober



82	KSOP Balikpapan	1	Manusia	November
83	KSOP Pangkal balam	1	Teknis	November
84	UPP Labuhan	1	Alam	November
85	KSOP Tegal	1	Teknis	November
86	KSOP Sunda Kelapa	1	Teknis	November
87	UPP Belang-Belang	1	Alam	November
88	KSOP Cilacap	1	Manusia	Desember
89	KSOP Merauke	1	Manusia	Desember
90	UPP Jepara	1	Alam	Desember
91	KSOP Benoa	1	Alam	Desember
92	KSU Tg Perak	1	Manusia	Desember
93	KSOP Kendari	1	Alam	Desember
94	UPP Selayar	1	Alam	Desember
95	UPP Sadaí	1	Alam	Desember
96	UPP Kotaagung	1	Manusia	Desember
97	KSOP Sorong	1	Teknis	Desember
98	KSOP Kalabahi	1	Teknis	Desember
99	KSOP Probolinggo	1	Manusia	Desember
100	KSOP Labuan Bajo	1	Alam	Desember

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Faktor Penyebab terjadinya kecelakaan :

1. Faktor Manusia : Human Error, kesalahan menerapkan standar profesi kepelautan
2. Faktor Alam : Cuaca Buruk
3. Faktor Teknis : Konsleting kelistrikan, rusaknya kemudi kapal, kerusakan lambung kapal

b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) :

Untuk IKP 4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut, yaitu pada Tahun 2021 terdapat target sebesar 1,21/10.000 pelayaran dengan realisasi sebesar 1,14/10.000 pelayaran sehingga persentase pencapaian sebesar 106% sedangkan target pada Tahun 2020 sebesar 1,23/10.000 pelayaran dengan realisasi sebesar 1,02/10.000 pelayaran sehingga persentase pencapaian sebesar 117,07% dan melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena menurunnya kejadian kecelakaan pada Transportasi Laut (kejadian kecelakaan kapal yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan teknis pada Tahun 2021 sebesar 100 kejadian sedangkan Tahun 2020 sebesar 89 kejadian).



Tabel III.1.15

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4)

IKU (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKP (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Rasio Kejadian Kecelakaan Pada Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	Target	1,23	1,21
				Realisasi	1,02	1,14
				Kinerja (%)	117,07	106

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) :

Untuk IKP 4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut, pada Tahun 2021 terdapat realisasi kinerja sebesar 1,14 /10.000 pelayaran dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 1,21/10.000 pelayaran sehingga persentase pencapaiannya sebesar 106% yang artinya melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena menurunnya kejadian kecelakaan pada Transportasi Laut (kejadian kecelakaan kapal yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan teknis pada Tahun 2021 sebesar 100 kejadian).

Tabel III.1.16

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	1,21	1,14	106

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut



5) Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5) adalah “**Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut**”

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5) :**

Tabel III.1.17

Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut

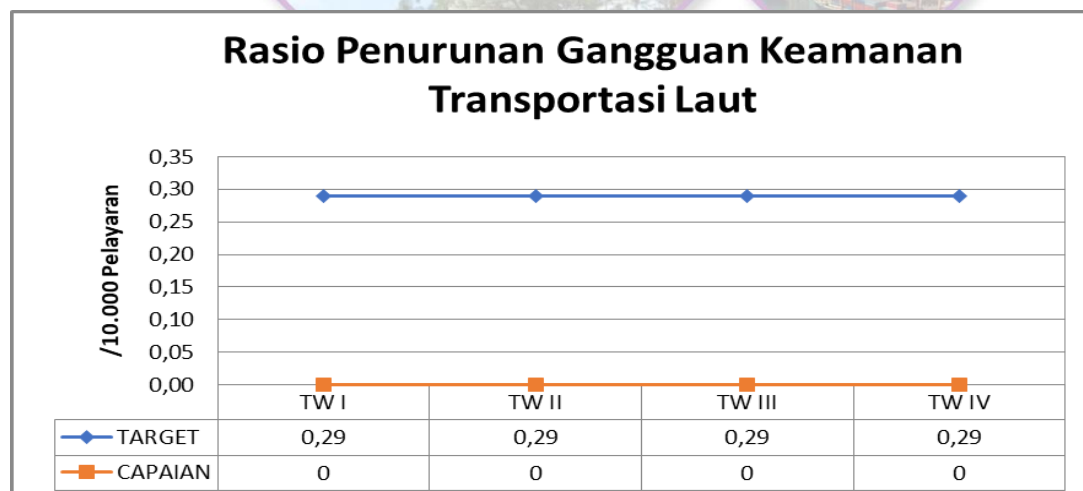
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,29	0	0	0	0	0	200

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun target Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut sesuai dengan target tahun 2021 sebesar 0,29/100.000 Pelayaran. Pencapaian pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar 0, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 200% yang artinya tidak terdapat Gangguan Keamanan Transportasi Laut di area pelabuhan ataupun di atas kapal dan sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada laporan dari Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Grafik III.1.5

Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut





Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tidak terjadi gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut. dan Surat Perintah Berlayar yang diterbitkan adalah berjumlah 475.000 SPB, sehingga realisasi mencapai 200%. Adapun dasar menggunakan perkalian 100.000 SPB dari manual IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

$$\text{Rasio Gangguan Keamanan Transportasi Laut} = \frac{0 \text{ kejadian}}{850.000 \text{ SPB}} \times 100.000 \text{ SPB} = 0$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(0,29 - (0 - 0,29))}{0,29} \times 100\%$$

Menurut Amandemen *Safety Of Life At Sea (SOLAS)* pada Chapter XI-2 tentang *International Ship And Port Facility Security Code (ISPS Code)*/Keamanan Maritime yang termasuk Gangguan Keamanan adalah sebagai berikut :

1. Perusakan terhadap atau penghancuran terhadap atau penghancuran terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan contohnya dengan alat peledak, pembakaran dengan sengaja, tindakan sabotase atau corat coret;
2. Pembajakan atau penyitaan kapal atau penyanderaan orang di atas kapal;
3. Merusak muatan, peralatan kapal yang perlu atau sistemnya atau tempat penyimpanan kapal;
4. Keluar masuk secara tidak sah atau menggunakannya termasuk kehadiran penumpang gelap;
5. Penyelundupan senjata atau peralatannya termasuk senjata pemusnah massal;
6. Menggunakan kapal untuk membawa semua yang bermaksud menyebabkan peristiwa keamanan dan atau peralatannya;
7. Menggunakan kapal itu sendiri sebagai senjata atau sarana untuk membuat kerusakan atau penghancuran;
8. Penyerangan dari arah laut ketika di Dermaga atau di tempat labuh;
9. Penyerangan ketika di laut.



b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5) :

Untuk IKP 5 Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut, yaitu pada Tahun 2021 terdapat target sebesar 0,29/100.000 pelayaran dengan realisasi 0 sehingga persentase pencapaian sebesar 200% sedangkan Tahun 2020 target sebesar 0,3/100.000 pelayaran dengan realisasi 0 sehingga persentasenya sebesar 200% yang artinya tidak terdapat Gangguan Keamanan Transportasi Laut di area pelabuhan ataupun di atas kapal dan sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada laporan dari Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel III.1.18

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program Kelima (5)

IKU (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKP (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut	/100.000 pelayaran	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 pelayaran	Target	0,3	0,29
				Realisasi	0	0
				Kinerja (%)	200	200

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5) :

Untuk IKP 5 Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut, pada Tahun 2021 tidak terdapat realisasi yaitu 0/100.000 pelayaran dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,29/100.000 pelayaran sehingga persentase pencapaian sebesar 200%, sedangkan Tahun 2020 target sebesar 0,3/100.000 pelayaran dengan realisasi 0 sehingga persentasenya sebesar 200% yang artinya tidak terdapat Gangguan Keamanan Transportasi Laut di area pelabuhan ataupun di atas kapal dan sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada laporan dari Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Tabel III.1.19

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja
Program (IKP) Kelima (5)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	0,29	0	200

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

- 6) Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6) adalah **“Tingkat Kehandalan Kenavigasian”**
 a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021
 Pada Indikator Kinerja Program Tingkat Kehandalan Kenavigasian (IKP 6) :**

**Tabel III.1.20
Tingkat Kehandalan Kenavigasian**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.6	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	97,25	98,18	98,17	98,66	97,95	97,95	100,72

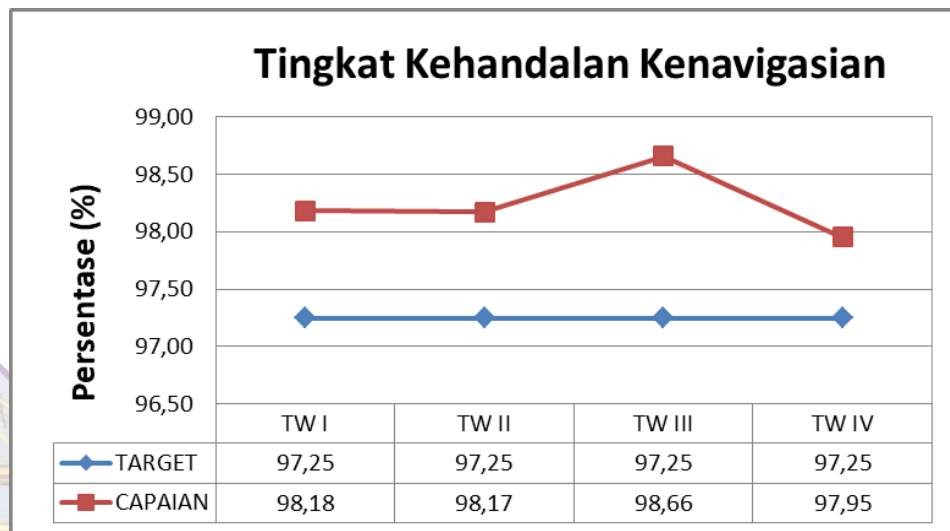
Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sebesar 97,25%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 98,18% dan Realisasi pada Triwulan II sebesar 98,17% sedangkan realisasi pada Triwulan III sebesar 98,66% dan Realisasi Triwulan IV sebesar 97,95% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 100,72 % dan telah melebihi target yang ditetapkan karena beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran yang dapat segera diperbaiki.



Grafik III.1.6

Tingkat Kehandalan Kenavigasian



Tingkat Kehandalan Kenavigasian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Kehandalan Kenavigasian} &= \frac{\text{Tingkat Kehandalan SBNP} + \text{Tingkat Kehandalan Telkompel}}{2} \\
 &= \frac{96,57 \% + 99,34 \%}{2} \\
 &= 97,95 \%
 \end{aligned}$$

Jumlah SBNP yang bersuar dari triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebanyak 4.961 unit, terdiri dari 2.940 milik DJPL dan 2.021 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) milik DJPL = 62.164 hari. Adapun Persentase kelainan SBNP hingga saat ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari Kelainan}}{365 \text{ hari} \times \sum \text{SBNP Bersuar}} \times 100 \% = \frac{62.164}{365 \text{ hari} \times 4.961} \times 100 \% = 3,43 \%$$

Sehingga Tingkat Kehandalan SBNP adalah $100\% - 3,43\% = 96,57 \%$.

Sedangkan Tingkat Kehandalan Telkompel dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Kehandalan Telkompel} &= \frac{\text{Tingkat Kehandalan SROP} + \text{Tingkat Kehandalan VTS}}{2} \\
 &= \frac{98,68 \% + 100 \%}{2} = 99,34 \%
 \end{aligned}$$



b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Kehandalan Kenavigasian (IKP 6) :

Untuk IKP 6 Tingkat Kehandalan Kenavigasian, yaitu pada Tahun 2021 terdapat target sebesar 97,25% dengan realisasi sebesar 97,95% sehingga persentase pencapaian sebesar 100,72% sedangkan Tahun 2020 target sebesar 98% dengan realisasi sebesar 98,18% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100,18% sehingga realisasinya melebihi target yang ditetapkan karena beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran dapat segera diperbaiki.

Tabel III.1.21

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6)

IKU (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKP (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Tingkat Kehandalan SBNP	%	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	Target	98	97,25
				Realisasi	98,18	97,95
				Kinerja (%)	100,18	100,72

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Kehandalan Kenavigasian (IKP 6) :

Untuk IKP 6 Tingkat Kehandalan Kenavigasian, pada Tahun 2021 terdapat realisasi kinerja sebesar 97,95% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 97,25% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100,72% dan melebihi target yang ditetapkan karena beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran dapat segera diperbaiki.



Tabel III.1.22

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja
Program (IKP) Keenam (6)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,25	97,95	100,72

Sumber data : Direktorat Kenavigasian Laut, Ditjen. Perhubungan Laut

SASARAN PROGRAM (4)

Sasaran Program **Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

7) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7) adalah “**Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)**”

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) :

Tabel III.1.23

Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,4	0,287	0,347	0,407	0,468	0,468	117

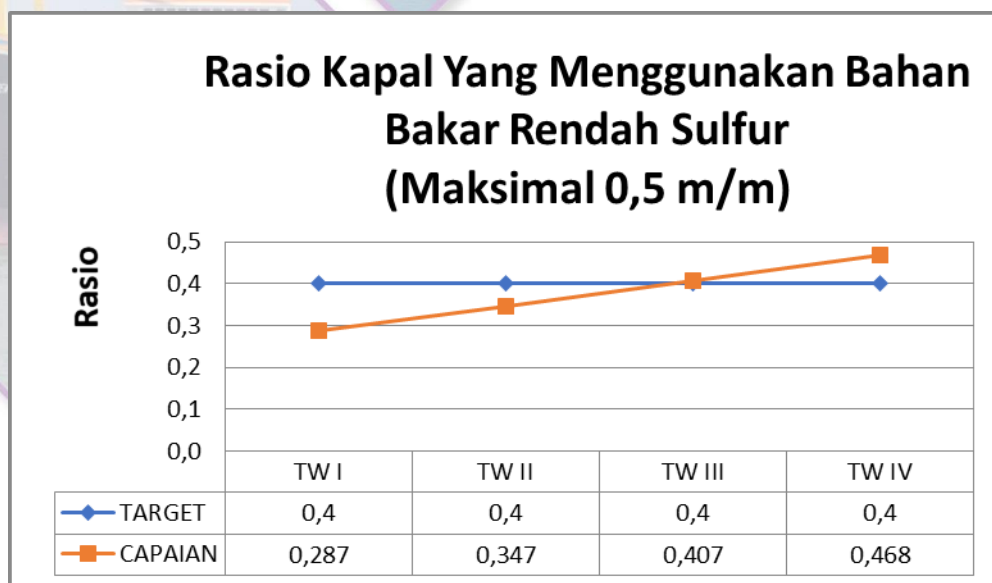
Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut.



Adapun target Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) Tahun 2021 sebesar 0,4 Rasio. Pencapaian Triwulan I sebesar 0,287 rasio dan pada Triwulan II sebesar 0,347 rasio sedangkan Triwulan III sebesar 0,407 rasio dan pada Triwulan IV mencapai 0,468 rasio sehingga prosentase pencapaian terhadap target saat ini sebesar 117% sehingga melebihi target yang ditetapkan karena sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.35 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar *Low Sulfur* dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal, para pemilik Kapal berbendera Indonesia berusaha untuk segera memenuhi Peraturan tersebut.

Grafik III.1.7

Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)



Rumus perhitungan:

Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

$$= \frac{\text{Jumlah sertifikat pencegahan pencemaran (IAPP dan SNPP)}}{\text{Jumlah kapal berbendera Indonesia > 400GT yang terdaftar}}$$



Tabel III.1.24

Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan dan Jumlah Kapal > 400 GT Terdaftar

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des	TOTAL
Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	3.666	3.872	4.214	4.514	4.813	5.128	5.398	5.724	6.058	6.388	6.708	7.001	7.001
Jumlah kapal >400GT terdaftar	14.696	14.696	14.696	14.792	14.792	14.792	14.883	14.883	14.883	14.925	14.925	14.945	14.945

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan Aplikasi *kapal.dephub.go.id*,

Ditjen. Perhubungan Laut.

Note : Sertifikat pencegahan pencemaran merupakan bukti bahwa kapal yang bersangkutan memenuhi kriteria diantaranya menggunakan bahan bakar rendah sulfur.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) :

Untuk IKP 7 Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M), yaitu pada Tahun 2021 terdapat target sebesar 0,4 Rasio dengan realisasi sebesar 0,468 rasio sehingga persentase pencapaian sebesar 117%, sedangkan Tahun 2020 target sebesar 0,2 rasio dengan realisasi sebesar 0,238 rasio sehingga persentase pencapaiannya sebesar 119% sehingga realisasinya melebihi target yang ditetapkan karena sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.35 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar *Low Sulfur* dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal, para pemilik Kapal berbendera Indonesia berusaha untuk segera memenuhi Peraturan tersebut.



Tabel III.1.25

**Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021
dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)**

IKU (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKP (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	Target	0,2	0,4
				Realisasi	0,238	0,468
				Kinerja (%)	119	117

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) :

Untuk IKP 7 Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M), pada Tahun 2021 terdapat realisasi sebesar 0,468 rasio dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,4 rasio sehingga persentase pencapaiannya sebesar 117% dan melebihi target yang ditetapkan karena diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.35 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar *Low Sulfur* dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal, para pemilik Kapal berbendera Indonesia berusaha untuk segera memenuhi Peraturan tersebut.

Tabel III.1.26

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024
pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP. 7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,4	0,468	117

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut



8) Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8) adalah “**Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan**”

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8)**

Tabel III.1.27
Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100	100	100	100	100	100	100

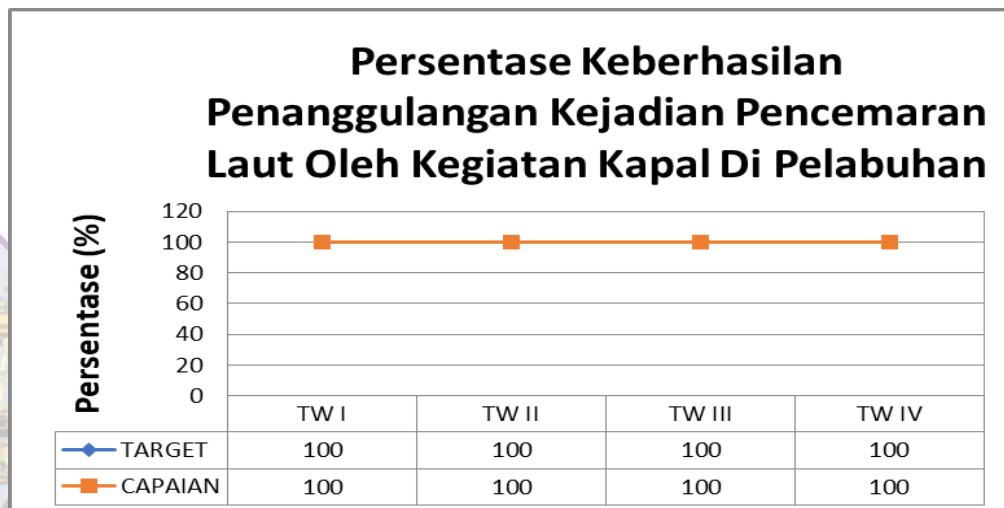
Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 100% (1 kejadian di Laut Dumai pada tanggal 27 Februari 2021), realisasi pada Triwulan II sebesar 100% (2 kejadian, di Sungai Mahakam pada tanggal 10 April 2021 dan di Kepulauan Seribu pada tanggal 15 April 2021) dan realisasi pada Triwulan III sebesar 100% (2 kejadian di area perairan selat malaka dan Area Kubu Jawa, Tanjung Cina, Area Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Sumatera (TNBBS) dan pada Triwulan IV sebesar 100% (0 kejadian sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100% artinya pada Tahun 2021 terdapat 5 laporan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan yang dilaporkan Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berhasil ditanggulangi.



Grafik III.1.8

**Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran
(Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi**



Dari setiap adanya laporan terjadinya tumpahan minyak telah dilakukan upaya penanggulangan oleh Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan melakukan koordinasi dari Syahbandar setempat. Hal ini sesuai amanat Perpres 109 Tahun 2006 serta PM.58 Tahun 2013 bahwa Syahbandar mengkoordinasikan aset penanggulangan tumpahan minyak yang dimiliki Tersus, Tuks dan BUP di pelabuhan. Frekuensi kejadian tumpahan minyak telah dilaporkan dapat ditanggulangi, adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \rightarrow \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi = Jumlah kejadian pencemaran yang berhasil ditanggulangi

Target = Jumlah kejadian pencemaran selama periode evaluasi



Tabel III.1.28

**Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran
(Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi**

NO	KEJADIAN		NAMA KAPAL	JENIS KAPAL	PENYEBAB	TUMPAHAN MINYAK		TINDAKAN PENANGGULANGAN
	TANGGAL	LOKASI				JENIS	JUMLAH	
1.	27 Februari 2021	Laut Dumai	----	----	Terdapat kebocoran pipa di Pelabuhan PT. CPI demaga 4	Minyak Mentah	±1000 Liter	a. Berkoordinasi dengan PT. CPI dan KSOP setempat; b. Telah dilakukan penanggulangan tumpahan minyak oleh PT. CPI dengan memasang oil boom untuk mencegah penyebaran dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengisolasi dan mengumpulkan tumpahan minyak.
2.	10 April 2021	Sungai Mahakam	SPOB MULIA MANDIRI 07	Work Barge	Faktor cuaca	CPO	Tidak diketahui	a. Koordinasi dengan perusahaan PT. SAI untuk melakukan Penggelaran Oil Boom untuk penanggulangan pencemaran minyak di perairan. b. Telah dievakuasi oleh Basarnas Unit Siaga Samarinda dengan menggunakan Rubber Boat dalam mengevaluasi 1 (satu) korban. c. Telah dilakukan drain limbah CPO dari Sungai Mahakam ke dalam Mobil Tangki.



3.	15 April 2021	Area BZZA wilayah PHE ONWJ			Kebocoran dari pipa bawah laut	Crued Oil		a. KSOP Kepulauan Seribu Berkoordinasi dengan PHE ONWJ untuk penanggulangan pencemaran; b. Telah dilakukan penanggulangan tumpahan minyak oleh PT. PHE ONWJ dengan pembersihan area Pantai yang terdampak ceceran minyak di pesisir pantai Desa Cemarajaya, karawang; untuk mengisolasi dan mengumpulkan tumpahan minyak.
4.	13-8-2021	Perairan Selat Malaka Area Lepas pantai PT. Pertamina EP Kuala Langsa			Kebocoran Pipa Bawah laut	Bubble		a. KSOP Kelas IV Kuala Langsa berkoordinasi dengan Pertamina EP untuk penanggulangan pencemaran; b. Telah dilakukan penanggulangan pencemaran oleh PT. Pertamina dengan menutup lubang pada pipa kebocoran.



5.	15-9-2021	Area Kubu Jawa, Tanjung Cina, Area Konservasi Taman Nasioanal Bukit Barisan Sumatera (TNBBS), Labuhan Maringgai, Pesawaran, Tanggamus, Kalianda, Raja Basa, Panjang dan Teluk Semangka	TB. MEGA 2 dan BG. MMN 02					a. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Lampung, DLH lampung dan stakeholder terkait dalam penanggulangan tumpahan minyak
6.	15-9-2021	Area Kubu Jawa, Tanjung Cina, Area Konservasi Taman Nasioanal Bukit Barisan Sumatera (TNBBS), Labuhan Maringgai, Pesawaran, Tanggamus, Kalianda, Raja Basa, Panjang dan Teluk Semangka	TB. MEGA 2 dan BG. MMN 02					a. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Lampung, DLH lampung dan stakeholder terkait dalam penanggulangan tumpahan minyak

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut



b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8)

Untuk IKP 8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 sama, yaitu terdapat target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga persentase pencapaian sebesar 100% artinya pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan yang dilaporkan Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil ditanggulangi.

Tabel III.1.29

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8)

IKU (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKP (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi	%	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	Target	100	100
				Realisasi	100	100
				Kinerja (%)	100	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8) :

Untuk IKP 8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan, pada Tahun 2021 terdapat realisasi kinerja sebesar 100% dari target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 100% sehingga pencapaian kinerjanya 100% sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan artinya pada Tahun 2021 kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan yang dilaporkan Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil ditanggulangi.



Tabel III.1.30

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja
Program (IKP) Kedelapan (8)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100	100	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut



III.2 KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tabel III.2.1

Kontribusi Terhadap Capaian IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 (Posisi 31 Desember 2021)

SASARAN PROGRAM (SP)		INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET & Realisasi PK			PAGU Rp.	REALISASI		Capaian (%)
					T	R	%		Rp.	Fisik (%)	
1.	Meningkatnya Optimalisasi Pengelola Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	1)	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai	93,98	96,30		9.478.509.530.000	9.144.787.140.113		102,47

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (diakses pada tanggal 25 Januari 2022).



III.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2021 (Posisi 31 Desember 2021(*unaudited*)) akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3.1

Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2021

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI
1.	Belanja Pegawai	1.928.217.911.000	1.753.168.167.000	1.703.879.027.915
2.	Belanja Barang	4.577.595.269.000	3.733.583.589.000	3.644.598.122.816
	Rupiah murni (RM)	3.438.840.179.000	2.422.473.482.000	2.352.528.400.366
	PNBP	1.138.755.090.000	1.302.587.103.000	1.283.846.346.637
	Pinjaman LN	-	-	-
	Badan Layanan Umum (BLU)	-	1.484.796.000	1.228.417.813
	Hibah LN	-	7.038.208.000	6.994.958.000
3.	Belanja Modal	4.922.381.633.000	3.991.757.774.000	3.796.309.989.382
	Rupiah murni (RM)	2.896.234.528.000	931.732.217.000	939.346.497.808
	PNBP	1.132.420.766.000	990.150.535.000	985.508.205.315
	Pinjaman LN	668.611.344.000	1.811.425.083.000	1.615.516.065.969
	Badan Layanan Umum (BLU)	-	1.351.242.000	1.310.748.806
	Hibah LN	-	-	-
	SBSN	225.114.995.000	257.098.697.000	254.628.471.484
	TOTAL PAGU	11.428.194.813.000	9.478.509.530.000	
	TOTAL REALISASI			9.144.787.140.113
	TOTAL SISA DANA			351.700.126.887

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (diakses pada tanggal 25 Januari 2022)



Revisi anggaran TA. 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 6 Januari 2021 dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2021, serta Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2020 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran.

Selama tahun 2021 Revisi Anggaran telah dilakukan 26 (dua puluh enam) kali sebagai berikut:

- a. Revisi 1 (pengesahan Nomor S-7/AG/AG.3/2021 tanggal 11 Januari 2021)
Revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar program sebesar Rp. 70.988.103.000,- dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- b. Revisi 2 (pengesahan Nomor S-49/AG/AG.3/2021 tanggal 09 Februari 2021)
Revisi anggaran berupa penambahan pagu lanjutan kegiatan (luncuran) penggunaan sisa anggaran SBSN yang tidak terserap tahun 2020 pada Satker Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kaimana sebesar Rp. 7.314.699.000,-.
- c. Revisi 3 (Surat pengesahan Nomor S-133/AG/AG.1/2021 tanggal 17 Februari 2021)
Revisi anggaran dalam rangka refocusing dan realokasi anggaran belanja TA. 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp. 2.243.364.712.000,- dari target refocusing dan realokasi anggaran sebesar Rp. 3.210.017.879.000,- dan kekurangan sebesar Rp. 966.953.167.000,-

Selanjutnya akan diusulkan pada tahap II setelah melaksanakan addendum kepada KPPN terkait kontrak kegiatan.

- d. Revisi 4 (Surat pengesahan Nomor S-161/AG/AG.3/2021 tanggal 26 Februari 2021)
 - a. Revisi anggaran pemenuhan kekurangan penghematan dalam rangka refocusing dan realokasi anggaran belanja TA. 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 966.953.167.000,- sehingga telah memenuhi target penghematan sebesar Rp. 3.210.017.879.000,- ; dan
 - b. Pergeseran anggaran antar satker sebesar Rp. 118.001.366.000,- terdiri dari revisi pergeseran anggaran yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp. 1.620.304.000,- dan PNPB sebesar Rp. 116.381.062.000,-.
- e. Usulan Revisi 5
 - a. Pencantuman/Perubahan catatan halaman IV.B DIPA TA. 2021 sebesar Rp 80.945.283.000,- dengan rincian:
 - 1) Tunggakan atas pekerjaan TA. 2018 sebesar Rp 74.428.108.000,-;
 - 2) Tunggakan atas pekerjaan TA. 2019 sebesar Rp 6.333.950.000,-;
 - 3) Tunggakan atas pekerjaan TA. 2020 sebesar Rp 183.225.000,-.
 - b. Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 sebesar Rp 125.365.097.000,- yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan anggaran subsidi perintis akibat dampak dari refocussing dan kekurangan dari Pagu kebutuhan sebesar Rp 917.439.867.000,- guna mendukung program Prioritas Nasional dan pelayanan kepada masyarakat, yang bersumber dari:
 - 1) Dana RM sebesar Rp 77.069.517.000,- (Blokir anggaran RM Rp. 56.736.780.000,-);
 - 2) Dana PNPB sebesar Rp 48.295.580.000,- (Blokir anggaran PNPB Rp. 9.250.000.000);



- c. Realokasi/pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Satker TA. 2021 sebesar Rp 501.151.000,- yang bersumber dari:
 - 1) Dana RM sebesar Rp 440.448.000,-;
 - 2) Dana PNBPNP sebesar Rp 60.703.000,-.
- d. Penghapusan catatan halaman IV.A DIPA TA. 2021 (buka blokir) yang bersumber dari dana RM pada kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Likupang sebesar Rp 15.000.000.000,-; Luncuran sisa anggaran TA. 2020 yang dilanjutkan ke TA. 2021 yang bersumber dari dana SBSN sebesar Rp 24.668.998.000,-

f. Revisi 6

- a. Buka blokir yang direalokasi sebesar Rp 2.332.061.000,- dengan rincian: Sumber dana PNBPNP pada UPP Lapuko untuk Pembangunan Faspel Laut Munse. Direalokasi untuk pemenuhan kebutuhan anggaran perintis mekanisme penugasan Pelni yang dihemat sebesar Rp 2.332.061.000,-.
- b. Realokasi anggaran antar Satker TA. 2020 sebesar Rp 57.157.909.000,-, sumber dana RM dengan rincian;
- c. Direalokasi untuk pemenuhan kebutuhan anggaran tunggakan Faspel Mansalean TA. 2019 sebesar Rp 452.000.000,-, pemenuhan kebutuhan anggaran sewa kantor dan rumah dinas di UPP Labuan Bajo sebesar Rp 216.000.000,-, pemenuhan kebutuhan kegiatan kenavigasian di lingkungan Dit. Kenavigasian (Pengadaan Sarana Penunjang Operasional Perencanaan Teknis Kenavigasian sebesar Rp 200.000.000,-, Pengadaan Sistem Informasi Telekomunikasi Pelayaran Terintegrasi sebesar Rp 3.000.000.000,-, Pengadaan Peralatan Conference sebesar Rp 198.980.000,-), pemenuhan kebutuhan anggaran subsidi perintis mekanisme penugasan Pelni yang dihemat sebesar Rp 7.931.039.000,-, pemenuhan kebutuhan anggaran subsidi ternak mekanisme penugasan Pelni yang dihemat sebesar Rp 4.769.976.000,-, pemenuhan kebutuhan anggaran subsidi ternak mekanisme swasta yang dihemat sebesar Rp 19.179.014.000,-, pemenuhan kebutuhan anggaran subsidi pengoperasian kapal Rede yang dihemat sebesar Rp 20.000.000.000,-, pemenuhan kebutuhan anggaran Project Management Unit (PMU) di Satker Kepelabuhan Pusat sebesar Rp 1.050.000.000,-, pemenuhan kebutuhan anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan (kegiatan padat karya) di UPP Calabai sebesar Rp 110.900.000,-, dan untuk menutupi pagu minus belanja perjalanan dinas di UPP Branta karena dampak penghematan sebesar Rp 50.000.000,-
- d. Realokasi anggaran antar Satker TA. 2020 sebesar **Rp 161.673.470.000,-**, sumber dana PNBPNP dengan rincian direalokasi untuk pemenuhan kebutuhan anggaran subsidi perintis mekanisme penugasan Pelni yang dihemat sebesar Rp 129.397.612.000,-, untuk pemenuhan kebutuhan anggaran perintis mekanisme pelelangan umum (swasta) trayek R-56 yang dihemat di KSOP Kendari sebesar Rp 6.925.858.000,-, untuk mengalokasikan kembali Pagu Faspel Wini di UPP Atapupu sesuai dengan Pagu awal sebelum penghematan sebesar Rp 25.000.000.000,-, untuk pemenuhan kebutuhan anggaran DED pembangunan gedung kantor di KSOP Bitung sebesar Rp 350.000.000,-
- e. Terdapat kekurangan anggaran yang bersumber dari dana PHLN TA. 2021 untuk kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban sebesar Rp 1.142.813.739.000,- sehingga diusulkan revisi penambahan anggaran sumber dana PHLN melalui mekanisme DIPA luncuran, dengan rincian yaitu Pembangunan Pelabuhan Patimban (Paket 1) = Rp 634.037.561.000,- dan Pembangunan Pelabuhan Patimban (Paket 2) = Rp 508.776.178.000,-



- f. Usulan Persetujuan MYC Pembangunan Faspel Matasiri APBN TA. 2021-2022. Dengan kebutuhan anggaran TA. 2021:Rp 5.093.784.000,-, TA. 2022: Rp 11.885.496.000,- dan total Rp 16.979.280.000,-
- g. Revisi 7
Penambahan anggaran untuk program infrastruktur konektivitas (program penciptaan kerja padat karya) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2021 sebesar Rp161.784.565.000,00 yang bersumber pada Rupiah Murni (RM) dengan rincian yaitu;
 - a. Pembangunan Pelabuhan New Palembang (Tanjung Carat) pada KSOP Palembang sebesar Rp80.000.000.000,00,-
 - b. Pembangunan Pelabuhan New Ambon pada KSOP Ambon sebesar Rp81.784.565.000,00
- h. Revisi 8
Pencantuman Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah PSN Pelabuhan Patimban oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Kuartal I T.A. 2021 sebesar Rp40.200.232.843,00 dikarenakan perubahan prioritas penggunaan anggaran dan optimalisasi penggunaan anggaran serta mempercepat pencapaian kinerja K/L;
- i. Revisi 9
Penghematan anggaran belanja pegawai dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp108.504.558.000,00
- j. Revisi 10
Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran belanja negara tetap, yaitu penghapusan catatan halaman IV DIPA T.A. 2021 (buka blokir) yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp12.647.813.000,00 dan realokasi atau pergeseran anggaran antar satuan kerja sebesar Rp16.251.693.000,00 yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan subsidi perintis akibat dampak *refocussing* dan kekurangan pagu kebutuhan sebesar Rp258.343.784.550,00 guna mendukung prioritas nasional dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari dana RM sebesar Rp4.460.353.000,00 dan dana PNPB sebesar Rp11.791.340.000,00;
- k. Revisi 11
Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran belanja negara tetap, yaitu revisi rincian output dalam rangka penandaan anggaran untuk penanganan covid-19 dan/atau program pemulihan ekonomi nasional (padat karya dan kawasan industri) yang semula Rp80.619.469.000,00 berubah menjadi Rp84.045.538.000,00
- l. Revisi 12
Perubahan atau pergeseran rincian anggaran antar unit Eselon I dalam satu program T.A. 2021 sebesar Rp2.055.012.000 yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan anggaran Sekretariat Jenderal T.A. 2021;
- m. Revisi 13
Perubahan Daftar Prioritas Proyek SBSN (DPP-SBSN) Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp249.783.998.000,00



n. Revisi 14

Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran belanja negara berubah yaitu Refocusing dan Realokasi Belanja Ditjen Perhubungan Laut TA. 2021 menurut Program sebesar Rp 80.261.495.000,00, Penghematan Tahap III TA. 2021 Ditjen Perhubungan Laut yang bersumber dari dana RM sebesar Rp 80.261.495.000,00, dan Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 sebesar Rp 56.328.500.000,00 dengan rincian: Sumber dana RM sebesar Rp 2.832.500.000,00 dan sumber dana PNPB sebesar Rp 53.496.000.000

O. Revisi 15

sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-615/AG/AG.3/2021 tanggal 6 Agustus 2021, revisi anggaran berupa Refocussing dan Realokasi Belanja Ditjen Perhubungan Laut TA. 2021 Tahap IV menurut Program sebesar Rp 56.222.221.000,-;

p. Revisi 16

sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-732/AG/AG.3/2021 tanggal 23 September 2021, revisi anggaran berupa :

a. Penghapusan catatan halaman IV.A DIPA TA. 2021 (buka blokir) sebesar Rp 8.000.000.000,- yang bersumber dari:

- Dana RM sebesar Rp 3.000.000.000,- kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Telekomunikasi Pelayaran Terintegrasi;
- Dana PHLN sebesar Rp 5.000.000.000,- Development And Improvement Of Indonesian Aids To Navigation (ATON) On Economic Development Cooperation Fund(EDCF Loan Program).

b. Perubahan/penghapusan catatan halaman IV.B DIPA TA. 2021 yang bersumber dari dana rupiah murni (RM) sebesar Rp 26.881.928.000,-;

c. Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 sebesar Rp 7.260.112.000,- yang bersumber dari:

- Dana RM sebesar Rp 6.215.112.000,-;
- Dana PNPB sebesar Rp 1.045.000.000,-.

q. Revisi 17

sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-732/AG/AG.3/2021 tanggal 23 September 2021, revisi anggaran berupa :

a. Pencantuman Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah PSN Pelabuhan Patimban oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Semester I Tahun 2021 (bulan Januari s.d Juni 2021) sebesar Rp 42.717.527.000,-.

b. Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 sebesar Rp 235.729.772.000,- yang bersumber dari:

- a.Dana RM sebesar Rp 205.694.520.000,-;
- b. Dana PNPB sebesar Rp 30.035.252.000,-.



r. Revisi 18

sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-745/AG/AG.3/2021 tanggal 1 Oktober 2021, revisi anggaran berupa :

- a. Realokasi/pergeseran anggaran antar Program TA. 2021 yang bersumber dari dana RM sebesar Rp 166.479.742.000,-, yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan anggaran subsidi perintis akibat dampak dari refocussing guna mendukung program Prioritas Nasional dan pelayanan kepada masyarakat,-.
- b. Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang bersumber dari dana RM sebesar Rp 3.650.035.000,-, yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan anggaran subsidi perintis akibat dampak dari refocussing guna mendukung program Prioritas Nasional dan pelayanan kepada masyarakat.

s. Revisi 19

sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-798/AG/AG.3/2021 tanggal 25 Oktober 2021, revisi anggaran berupa :

- 1) Penambahan anggaran belanja PNPB TA 2021 sebesar Rp24.397.820.000,- dan penambahan target pendapatan PNPB pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp42.671.000.000,-.
- 2) Pergeseran/realokasi anggaran SBSN antar satker untuk penyelesaian sisa kewajiban pembayaran (tunggakan) proyek pembangunan menara suar dan fasilitas pendukung menara suar Tanjung Batu Tarakan sebesar Rp1.429.180.000,-.
- 3) Pergeseran/realokasi anggaran belanja pegawai antar satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp14.278.982.000,- dan
- 4) Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sebesar Rp93.973.743.000,00, yang terdiri dari revisi pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp32.538.546.000,00; dan PNPB sebesar Rp61.435.197.000,-.

t. Revisi 20

sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-864/AG/AG.3/2021 tanggal 25 Oktober 2021, revisi anggaran berupa :

- 1) Pergeseran/realokasi anggaran antar satker belanja pegawai sebesar Rp8.975.632.000,-.
- 2) Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sebesar Rp114.027.465.000,- terdiri dari revisi pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp45.850.898.000,-; dan PNPB sebesar Rp68.176.567.000,-.
- 3) Perubahan nomenklatur satker dalam rangka penataan organisasi pada 3 (tiga) UPT/satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.
- 4) Perubahan/penghapusan Catatan Halaman IV.B DIPA sebesar Rp9.472.618.000,-, dan
- 5) Pencantuman tambahan hibah luar negeri (HLN) Project-5 Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in the Straits of Malacca and Singapore pada Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat sebesar Rp7.038.207.000,-.

u. Revisi 21

Perubahan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri berupa pengurangan alokasi pinjaman kegiatan/proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban sebesar Rp383.519.472.957,-.



v. Revisi 22

sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-900/AG/AG.3/2021 tanggal 02 Desember 2021, revisi anggaran berupa revisi pergeseran/realokasi anggaran antar satker sebesar Rp7.297.833.000,00, yang anggarannya bersumber dari PNPB, untuk melaksanakan kegiatan keperintisan di wilayah Manokwari, Biak, Sorong dan Tual, telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.

w. Revisi 23

Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang bersumber dari dana PNPB sebesar Rp2.901.018.000,-, dan tambahan sebesar Rp500.000.000,-.

x. Revisi 24

- 1) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang bersumber dari dana RM sebesar Rp1.025.979.000,-, dalam rangka memenuhi kekurangan belanja pegawai.
- 2) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang bersumber dari dana PNPB sebesar Rp3.110.622.000,-.
- 3) Perubahan/pencantuman catatan halaman IV.B DIPA TA.2021 dalam rangka pembayaran tunggakan kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Ternak Tahun 2017 yang bersumber dari dana RM pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebesar Rp1.654.838.000,-.

y. Revisi 25

Dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas nasional dan optimalisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan adanya pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran belanja negara berubah yaitu dengan:

- 1) Pencantuman alokasi anggaran untuk pembayaran ganti rugi pengadaan lahan PSN Pelabuhan Patimban oleh LMAN TW III Tahun 2021 sebesar Rp1.148.681.257,00;
- 2) Realokasi antar satker TA 2021 untuk memenuhi kekurangan pegawai bersumber dana Rupiah Murni sebesar Rp.538.706,00.

z. Revisi 26

Dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas nasional dan optimalisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan adanya pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran belanja negara berubah yaitu dengan Pencantuman Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Lahan PSN Pelabuhan Patimban oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp17.977.736.710,00



III.3.2 Realisasi Anggaran APBN Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2021

Tabel III.3.2

Realisasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2021

(Posisi 31 Desember 2021 (unaudited))

akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut	45.296.929.000	20.893.711.134	20.893.711.134
2	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut	3.218.128.179.000	2.782.480.530.698	2.782.480.530.698
3	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut	20.861.688.000	20.838.878.780	20.838.878.780
4	Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut	13.598.308.000	7.481.923.460	7.481.923.460
5	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Laut	21.030.342.000	9.448.975.930	9.448.975.930
6	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	1.813.039.916.000	1.000.396.349.456	1.000.396.349.456
7	Pelayanan Transportasi Laut	2.169.622.886.000	2.053.504.596.031	2.053.504.596.031
8	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	3.303.380.271.000	2.827.113.829.543	2.809.105.917.692
9	Penunjang Teknis Transportasi Laut	823.236.294.000	422.694.625.109	422.701.849.509
TOTAL		11.428.194.813.000	9.478.509.530.000	9.144.787.140.113

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal. Perhubungan Laut (diakses pada tanggal 25 Januari 2022)).



Tabel III.3.3

Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO.	Indikator Kegiatan Program	Target	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	93,98%	9.478.509.530.000	9.144.787.140.113	96,30	
TOTAL						

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (diakses pada tanggal 25 Januari 2022)).



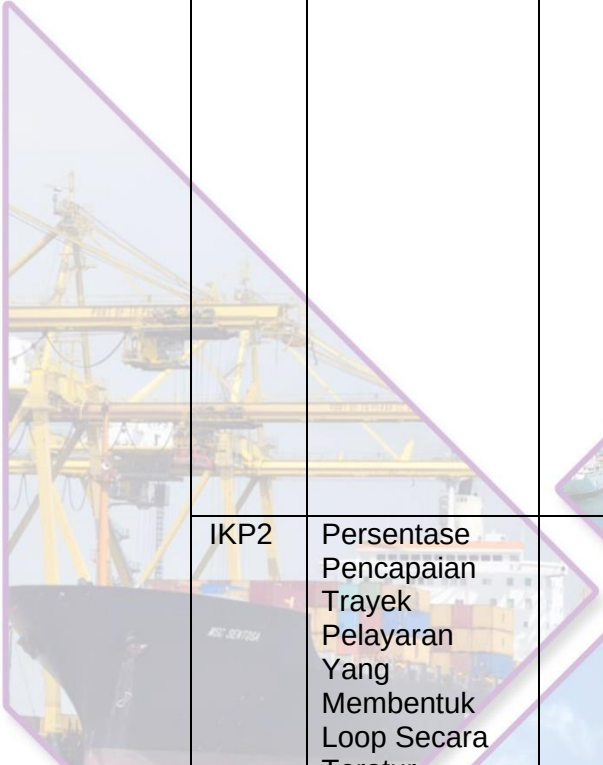


Tabel III.3.4

Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021 (Posisi 31 Desember 2021)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2020	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)					
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,89	0,89	Pelayanan angkutan kapal angkutan di perairan (kapal rede)	Pagu Awal = 30.000.000.000 Pagu Akhir = 35.000.000.000	35.000.000.000	
							Subsidi angkutan laut perintis mekanisme penugasan	Pagu Awal = 354.116.126.000 Pagu Refocusing = 455.263.976.000	455.263.975.232	
							Penyelenggara an kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang di laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Pagu Awal = 832.512.077.000 Pagu Akhir = 671.680.278.000	470.681.771.161	
							Penyelenggara an tol laut dengan mekanisme penugasan.	Pagu Awal = 266.503.997.000 Pagu Akhir = 296.128.989.000	192.901.336.654	



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2020	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)					
							Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Pagu Awal = 246.630.006.000 Pagu Akhir = 80.448.737.000	60.931.298.395	
							Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme penugasan.	Pagu Awal = 23.667.160.000 Pagu Akhir = 19.997.424.000	18.509.082.133	
							Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme pelelangan swasta.	Pagu Awal = 53.923.552.000 Pagu Akhir = 37.651.144.000	38.868.081.181	
		IKP2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	25	25	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Pagu Awal = 266.503.997.000 Pagu Akhir = 296.128.989.000	192.901.336.654	
							Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme	Pagu Awal = 246.630.006.000 Pagu Akhir = 80.448.737.000	60.931.298.395	



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2020	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)					
							pelelangan swasta.			
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82	96,48	Bimbingan Teknis Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	350.000.000	328.588.000	-
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP4	Rasio kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,21	1,14	Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal	11.500.000	6.969.000	
							Sosialisasi keselamatan pelayaran	472.500.000	471.954.420	
							Sertifikasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	198.400.000	198.264.400	-
							Monitoring terkait permasalahan SPB	0	0	-
							Melakukan pemeriksaan	10.400.000	9.411.000	23,41



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2020	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)					
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29	0	atau Investigasi terhadap Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) Terkait Permasalahan Kapal Asing			
							Pembangunan kapal patroli	Pagu Awal: 155.891.000.000 Pagu Akhir: 116.141.300.000	116.047.086.775	
							Monitoring dan Evaluasi Pola Operasi Kapal Negara Patroli	116.560.000	116.448.400	-
							Peningkatan keterampilan ISPS CODE	164.140.000	163.328.460	
							Peningkatan fasilitas pelabuhan yang tersertifikasi ISPS	-	-	-



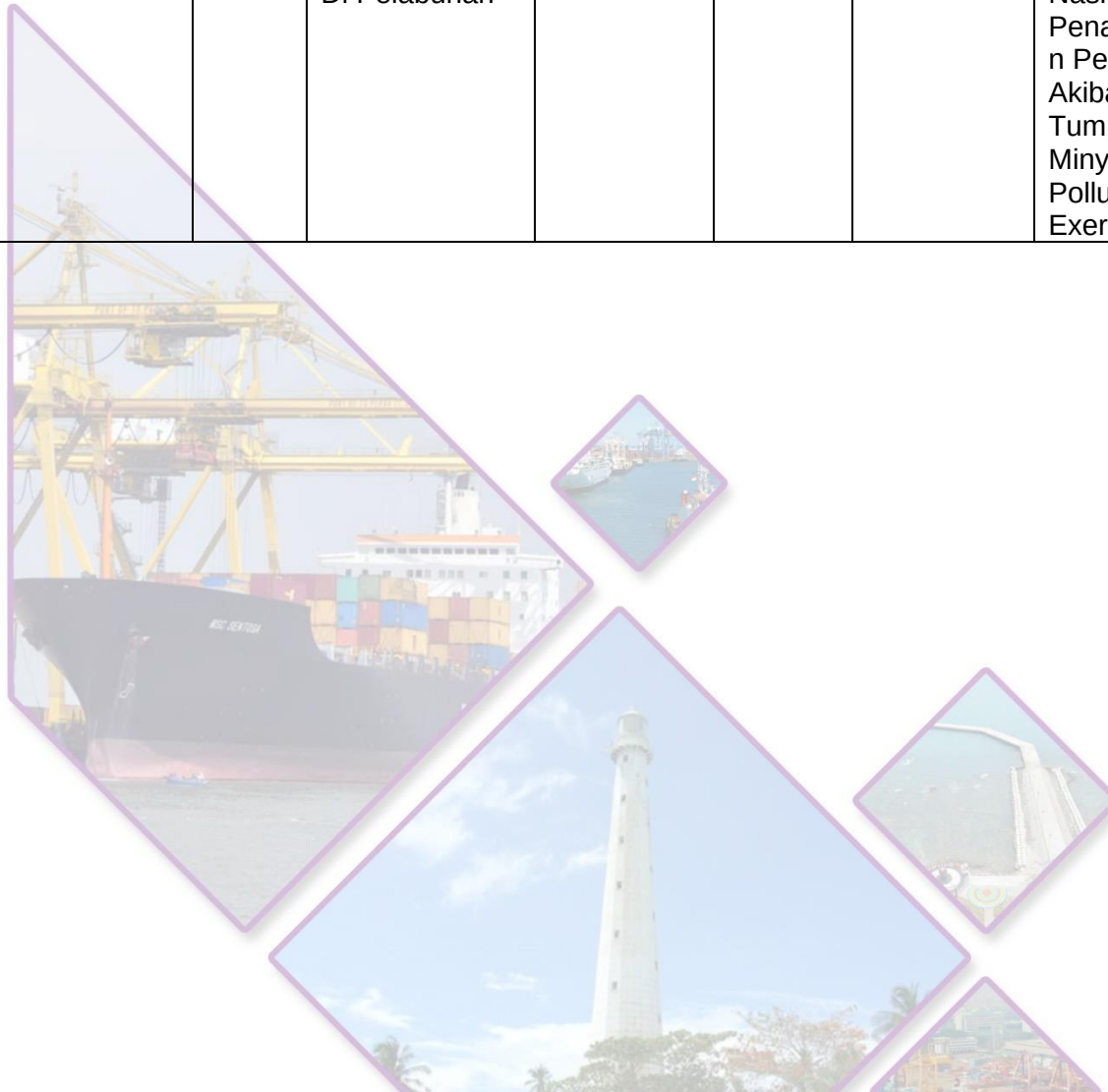
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2020	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)					
							Peningkatan kapal yang tersertifikasi ISPS	-	-	-
							Fourth Verification ISPS Code	-	-	-
							Implementasi PP No.31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, Verifikasi Ke IV, dan Pengujian Kepatuhan Exercise ISPS Code Faspel TA.2021	167.600.000	167.380.700	
							Rehab/ Replacement Menara Suar Rehap/ Replacement Rambu Suar	Pagu Awal: 48.838.360.000 Pagu Akhir:	40.461.981.681	-
							Upgrade GMDSS Dan	Pagu Awal: 132.029.055.000	116.320.153.070	-
		IKP6	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	97,25	97,52				



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2020	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)					
							Upgrade VTS	Pagu Akhir:		
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,4	0,468	Penerbitan Sertifikat pencegahan pencemaran	-	-	-
							Monitoring aplikasi pelaporan konsumsi bahan bakar kapal	-	-	-
							Revisi PM 29 Tahun 2014 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim	-	-	-
		IKP8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh	%	100	100	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	100.000.000	99.276.000	



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
		Kegiatan Kapal Di Pelabuhan				Latihan Nasional Penanggulangan Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak (Marine Pollution Exercise)	0 (realokasi) Marpolex tahun 2021 regional melibatkan beberapa negara karena kondisi masih pandemi tdk memungkinkan dilaksanakan		







BAB IV

Penutup

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berikut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional

Evaluasi angkutan berdasarkan Sistem Informasi Angkutan Laut (SIMLALA) menyimpulkan bahwa Target rasio konektivitas transportasi laut tahun 2021 sebesar 0,89 rasio dan sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 0,89 Rasio sehingga persentase kinerjanya mencapai 100%. Pada Tahun 2021 terdapat tambahan pelabuhan laut yang telah dilayani kapal angkutan laut yaitu Pelabuhan Sebuku, maka secara keseluruhan jumlah pelabuhan yang telah dilayani kapal angkutan laut menjadi 568 pelabuhan sedangkan total pelabuhan laut ada 636 pelabuhan sehingga masih terdapat 68 pelabuhan yang belum terlayani kapal angkutan laut.

2) Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur

Sesuai target persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur tahun 2021 sebesar 25%. Adapun pencapaian triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar 25% sehingga persentase kinerja pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

3) Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul

Sesuai dengan target tahun 2021 sebesar 82%. Adapun realisasi pada Triwulan I sebesar 93.44%, pada Triwulan II sebesar 74,78%, dan Triwulan IV sebesar 114,22% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 139,29% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 139,29% melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan di Masing-masing Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut semakin meningkat dan data UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang masuk sesuai dari Aplikasi SIRANI.

4) Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut



Sesuai dengan target tahun 2021 sebesar 1,21/10.000 Pelayaran. Terlihat realisasi pada Triwulan I sebesar 1,10 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 10 orang), dan pada Triwulan II sebesar 1,09 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 49 orang), sedangkan pada Triwulan IV sebesar 1,14 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 13 orang) sehingga total korban jiwa yang meninggal/hilang pada Tahun 2021 sebanyak 75 orang dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 106%.

5) **Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut**

Sesuai dengan target tahun 2021 sebesar 0,29/100.000 Pelayaran. Realisasi pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar 0, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 200% yang artinya tidak terdapat Gangguan Keamanan Transportasi Laut di area pelabuhan ataupun di atas kapal dan sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada laporan dari Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

6) **Tingkat Kehandalan Kenavigasian**

Sesuai dengan target tahun 2021 sebesar 97,25%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 98,18% dan Realisasi pada Triwulan II sebesar 98,17% sedangkan realisasi pada Triwulan III sebesar 98,66% dan Realisasi Triwulan IV sebesar 97,95% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 100,72 % dan telah melebihi target yang ditetapkan karena beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran yang dapat segera diperbaiki.

7) **Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)**

Sesuai target Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) Tahun 2021 sebesar 0,4 Rasio. Pencapaian Triwulan I sebesar 0,287 rasio dan pada Triwulan II sebesar 0,347 rasio sedangkan Triwulan III sebesar 0,407 rasio dan pada Triwulan IV mencapai 0,468 rasio sehingga prosentase pencapaian terhadap target saat ini sebesar 117% sehingga melebihi target yang ditetapkan karena sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.35 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal, para p.

8) **Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan**

Sesuai dengan target tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 100% (1 kejadian di Laut Dumai pada tanggal 27 Februari 2021), realisasi pada Triwulan II sebesar 100% (2 kejadian, di Sungai Mahakam pada tanggal 10 April 2021 dan di Kepulauan Seribu pada tanggal 15 April 2021) dan realisasi pada Triwulan III sebesar 100% (2 kejadian di area perairan selat malaka dan Area Kubu Jawa, Tanjung Cina, Area Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Sumatera (TNBBS) dan pada Triwulan IV sebesar 100% (0 kejadian sehingga persentasenya sebesar 100% artinya pada Tahun



2021 terdapat 5 laporan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan yang dilaporkan Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berhasil ditanggulangi.

IV.2 Langkah ke depan

Masih menunggu pelaksanaan Reviu Renstra 2020-2024 Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta Reviu Perjanjian Kinerja (PK) dan Renaksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.





DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



PERJANJIAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2021**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang, mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R. AGUS H. PURNOMO**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**

Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2021

**PIHAK KEDUA,
MENTERI PERHUBUNGAN**

**PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**


BUDI KARYA SUMADI


R. AGUS H. PURNOMO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk <i>loop</i> secara teratur	%	25
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,21
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29
		IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,25
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,4
		IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100

Kegiatan

	Anggaran
1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut	Rp. 2.474.925.608,000
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan	Rp. 3.290.211.155,000
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan	Rp. 87.015.875,000
4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	Rp. 1.056.459.887,000
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	Rp. 861.524.045,000
6. Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla	Rp. 3.658.058.243,000

Disetujui
MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, Januari 2021
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



REVIU PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TAHUN 2021



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a horizontal line ending in a small dot.

Arif Toha

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Arif Toha

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut



Arif Toha



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ARIF TOHA**
Jabatan : **Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN**

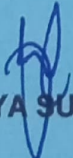
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

PIHAK KEDUA
MENTERI PERHUBUNGAN


BUDI KARYA SUMADI

PIHAK PERTAMA
Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


ARIF TOHA

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SP 1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89
		IKP 2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk <i>loop</i> secara teratur	%	25
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP 3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP 4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,21
		IKP 5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29
		IKP 6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,25
SP 4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP 7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,4
		IKP 8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut
5. Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Laut
6. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut
7. Pelayanan Transportasi Laut
8. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut
9. Penunjang Teknis Transportasi Laut

Anggaran

Rp. 21.188.794.000,-
Rp. 2.855.571.519.000,-
Rp. 20.908.816.000,-
Rp. 7.605.124.000,-
Rp. 9.560.665.000,-
Rp. 1.014.096.516.000,-
Rp. 2.070.050.406.000,-
Rp. 3.038.293.105.000,-
Rp. 440.085.903.000,-

Disetujui

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

Jakarta,

Pt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ARIF TOHA

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Januari				Realisasi Bulan Januari		% Capaian Bulan Januari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab					
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran					Capaian Kinerja		Capaian Anggaran		
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%	Volume	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
	SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
							1	Pelayanan angkutan kapal angkutan di perairan (kapal rede)	Jumlah kapal rede yang beroperasi.	20	20	100	2.500.000.000	8%	14	0	70%	0%	2 kapal proses hibah, 3 kapal proses pinjam pakai, 1 kapal dock.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
							2	Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang di laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	45	45	100	29.509.677.167	8%	45	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
							3	Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang di laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	73	73	100	69.376.006.417	8%	73	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
							4	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	22	22	100	22.208.666.417	8%	20	0	91%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
							5	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	10	10	100	20.552.500.500	8%	10	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
							6	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme penugasan.	Jumlah trayek angkutan ternak	2	2	100	1.973.930.000	8%	2	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	25	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	16	16	100	22.208.666.417	8%	16	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait			
						2	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	13	13	100	20.552.500.500	8%	13	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait			
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	62,00	Menunjuk Dir. Kepulauan untuk																	
						1.	FGD Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan (1 tahun)	Tahun	1	1	100	400.000.000	100	0	0	0	0	Apakah dengan tidak adanya kegiatan FGD target OTP masih sesuai ? untuk mencapai target OTP yang sesuai PK dipengaruhi beberapa aspek dan salah satu aspeknya adalah dengan mengadakan FGD, jadi ada atau tidaknya FGD dipastikan Target OTP tetap harus tercapai, dikarenakan anggaran FGD terkena penghematan maka pelaksanaan monitoring terkait pencapaian OTP dilaksanakan	Terkena Penghematan Anggaran	Dir. Kepulauan Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						2.	Bimtek standar kinerja operasional pelabuhan (september)	Kegiatan	1	1	100	350.000.000	100	0	0	0	0	Dilaksanakan pada bulan maret 2021	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan				
						3.	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1	1%	82%	-	-	1	-	100%	0						
						SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,21	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:											
a	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	0,39	1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Laporan	5	5					100	119.700.000	0	0	0	0			SD III			
			2.	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	6	6					100	1.298.686.000	0	0	0	0			SD V			
			b	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam	0,65	3.	Uji Kompetensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal Melalui Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal					Sertifikat	1	1	100	176.157.000	0	0	0	0			SD III
						4.	Monitoring terkait permasalahan SPB					Laporan	6	6	100	94.000.000	0	0	0	0			SD III
			c	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	0,17	5.	Melakukan pemeriksaan atau Investigasi terhadap Pejabat Pemeriksa Kelaklautan Dan Keamanan Kapal Asling (PSCO) Terkait Permasalahan Kapal Asling					Laporan	3	3	100	40.200.000	0	0	0	0			SD III
						6.	Pembangunan kapal patroli					Unit	11	11	100	125.005.890.000	0	0	0	0			SD V
	IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
					1.	Kegiatan Operasi Patroli Terpadu	Laporan					0	0									tidak ada anggaran karena penghematan	SD I
					2.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat					1	1	100	193.040.000	0	0	0	0			SD I	
					3.	Peningkatan fasilitas pelabuhan yang tersertifikasi ISPS	Sertifikat	7	7	100	-	4	0	57,1	-			tidak ada anggaran	SD I				
	IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,25	4.	Peningkatan kapal yang tersertifikasi ISPS	Sertifikat	255	255	100	-	17	0	6,7	-			SD I					
					5.	Fourth Verification ISPS Code	Laporan	4	4	100	65.353.000	0	0	0									

NO	Sasaran Program/ Kegiatan			Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Januari				Realisasi Bulan Januari		% Capaian Bulan Januari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab				
											Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran					Capaian Kinerja		Capaian Anggaran	
											Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%							
								3. Memonitor pelaporan konsumsi bahan bakar kapal melalui Data Collection System (DCS)	Laporan	1	1	100	-	-	1	-	1	-	-	-					
				IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPPLP				
								1. Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	8	8	100	132.470.000		1	0	12,5	0	On progress karena dilaksanakan sepanjang tahun		SD IV				

BULAN :		Februari		TAHUN :		2021																
NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Februari				Realisasi Bulan Februari		% Capaian Bulan Februari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab				
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran							
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						1	Pelayanan angkutan kapal angkutan di perairan (kapal rede)	Jumlah kapal rede yang beroperasi.	20	20	100	5.000.000.000	17%	14	0	70%	0%	2 kapal proses hbah, 3 kapal proses pinjam pakai, 1 kapal dock.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						2	Subsidi angkutan laut perintis mekanisme penugasan	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	45	45	100	59.019.354.333	17%	45	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						3	Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang di laut dengan mekanisme pelayanan swasta.	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	73	73	100	138.752.012.833	17%	73	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						4	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	22	22	100	44.417.332.833	17%	20	0	91%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
						5	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelayanan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	10	10	100	41.105.001.000	17%	10	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
						6	Pelayanan angkutan kapal temak mekanisme penugasan.	Jumlah trayek angkutan temak	2	2	100	3.947.860.000	17%	2	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	25	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						1	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	16	16	100	44.417.332.833	17%	16	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
						2	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelayanan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	13	13	100	41.105.001.000	17%	13	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performancapada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk																
						1	FGD Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan (1 tahun)	IKK 22														
						1																
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,21	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						1	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	5	5	100	119.700.000		0	0	0	0						Dir. KPLP
						2	Sosialisasi keselamatan pelayaran	6	6	100	1.298.686.000		0	0	0	0						SD III
		IKP5	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	0,39	0,65	0,17	2	Sosialisasi keselamatan pelayaran	6	6	100	1.298.686.000		0	0	0	0				SD V	
		IKP6	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam																			

		dan penanggulangan pencemaran laut				1. Melakukan revisi PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim		1	1	100	-	-	-	-	-	-	Perlu dilakukan pembahasan dengan stakeholder terkait	Didakan konsinyering finalisasi revisi PM 29 tahun 2014	
						2. Penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara (Itahun);		1	1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	
						3. Memonitor pelaporan konsumsi bahan bakar kapal melalui Data Collection System (DCS)		1	1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	
		IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPLP
						1. Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut		8	8	100	132.470.000		1	0	12,5	0			SD IV

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN : **Maret** **TAHUN :** **2021**

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab		
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja %	Capaian Anggaran %					
								Volume	%	Volume	%									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89	Menunjuk Dir. LALA untuk														
						1	Pelayanan angkutan kapal angkutan di perairan (kapal rede)	Jumlah kapal rede yang beroperasi.	20	20	100	7.500.000.000	25%	14	0	70%	0%	2 kapal proses hibah, 3 kapal proses pinjam pakai, 1 kapal dock.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						2	Subsidi angkutan laut perintis mekanisme penugasan	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	45	45	100	88.529.031.500	25%	45	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						3	Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang di laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	73	73	100	208.128.019.250	25%	73	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						4	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	22	22	100	66.625.999.250	25%	20	0	91%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
						5	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	10	10	100	61.657.501.500	25%	10	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
						6	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme penugasan.	Jumlah trayek angkutan ternak	2	2	100	5.921.790.000	25%	2	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
		7	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan ternak	4	4	100	10.257.235.750	19%	4	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait				
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	25	Menunjuk Dir. LALA untuk														
						1	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	16	16	100	66.625.999.250	25%	16	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
		2	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	13	13	100	61.657.501.500	25%	13	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait				
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. Kepelabuhan		
						1.	FGD Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan (1 tahun)	IKK.22	1	1	100	400.000.000	100	0	0	0	0	Apakah dengan tidak adanya kegiatan FGD target OTP mencapai skor 2	Terkena Penghematan Anggaran	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan
						2.	Bimtek standar kinerja operasional pelabuhan (september)	IKK.22	1	1	100%	350.000.000	100%	1	328.588.000	100%	94%	telah terlaksana pada bulan maret 2021 dan mencapai target 94%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	
						3.	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	IKK.22	1	1%	82%	-	-	1	-	100%	0			
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,21	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dit. KPLP		
						1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal		5	5	100	119.700.000	100%	0	0	0	0		SD III	
						2.	Sosialisasi keselamatan pelayaran		6	6	100	1.298.686.000	100%	0	0	0	0		SD V	
						3.	Uji Kompetensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal Melalui Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal		1	1	100	176.157.000	100%	0	0	0	0		SD III	

			c	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia		0,17	4.	Monitoring terkait permasalahan SPB		6	6	100	94.000.000	100%	0	0	0	0			SD III
							5.	Melakukan pemeriksaan atau Investigasi terhadap Pejabat Pemeriksa Kelautan Dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) Terkait Permasalahan Kapal Asing	100		3	3	40.200.000	100%	0	0	0	0			SD III
							6.	Pembangunan kapal patroli		11	11	100	125.005.890.000	100%	0	0	0	0			SD V
			IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29		Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPLP
							1.	Kegiatan Operasi Patroli Terpadu		0	0	0		0	0	0	0		tidak ada anggaran karena penghematan		SD I
							2.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE		1	1	100	193.040.000	100%	1	0	100	0			SD I
							3.	Peningkatan fasilitas pelabuhan yang tersertifikasi ISPS		7	7	100	-	8	-	114,3	-		tidak ada anggaran		SD I
							4.	Peningkatan kapal yang tersertifikasi ISPS		255	255	100	-	64	-	25,1	-		tidak ada anggaran		SD I
							5.	Fourth Verification ISPS Code		4	4	100	65.353.000	100%	0	0	0	0			SD I
			IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,25		Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. Kenavigasian
							1.	Rehab/ replacement menara suar rehap/ replacement rambu		2	2	100	2.300.395.000	100	2	1.986.742.000	100	86,37		Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan	
							2.	upgrade GMDSS dan upgrade VTS		0	0	0	0	0	0	0	0	0		Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan	Dir. KAPPEL
	SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,4		Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													
							1.	Melakukan revisi PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim		1	1	100	336.060.000	-	-	0	0	0	Perlu dilakukan konsinyering finalisasi revisi PM 29 tahun 2014	Dilakukan Revisi POK pada tanggal 19 Maret 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp336.060.000, acara ditargetkan akan dilaksanakan di TW ke-4	
							2.	Penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara (1tahun);		1	1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	
							3.	Memonitor pelaporan konsumsi bahan bakar kapal melalui Data Collection System (DCS)		1	1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	
			IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100		Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPLP
							1.	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut		8	8	100	132.470.000	0	3	0	37,5	0			SD IV

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN : April **TAHUN :** 2021

NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan April				Realisasi Bulan April		% Capaian Bulan April		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1	Pelayanan angkutan kapal angkutan di perairan (kapal rede)	Jumlah kapal rede yang beroperasi.	20	20	100	1.666.666.667	11%	14	0	70%	0%	2 kapal proses hibah, 3 kapal proses pinjam pakai, 1 kapal dock.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						2	Subsidi angkutan laut perintis mekanisme penugasan	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	45	45	100	12.396.204.556	11%	45	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						3	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	73	73	100	55.831.291.889	11%	73	213.429.489.708	100%	42%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						4	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	22	22	100	37.069.122.889	11%	20	17.323.217.464	91%	5%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
						5	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	10	10	100	11.348.442.333	11%	10	14.503.118.359	100%	14%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
						6	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme penugasan.	Jumlah trayek angkutan ternak	2	2	100	1.958.606.444	11%	2	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
						7	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan ternak	4	4	100	2.427.769.889	11%	4	7.459.807.810	100%	34%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	25	Menunjuk Dir. LALA untuk														
						1	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	16	16	100	37.069.122.889	11%	16	17.323.217.464	100%	5%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
						2	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	13	13	100	11.348.442.333	11%	13	14.503.118.359	100%	14%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. Kepelabuhanan	
						1.	FGD Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan (1 tahun)	IKK.22	1	1	100	400.000.000	100	0	0	0	0	Apakah dengan tidak adanya kegiatan FGD target OTP masih sesuai ? untuk mencapai target OTP yang sesuai PK dengan	Terkena Penghematan Anggaran	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan

[illegible]

							1.	Rehab/ replacement menara suar rehab/ replacement ramsu		3	3	100	5.021.952.000	100	3	4.608.299.000	100	91,76		Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan	
							2.	upgrade GMDSS dan upgrade VTS		0	0	0	0	0	0	0	0	0		Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan	
	SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29		Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KAPPEL
							1.	Melakukan revisi PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim			1	100	336.060.000	-	-	0	0	0	Sesuai	Target pelaksanaan di TW ke-4	
							2.	Penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara (1tahun);			1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	
							3.	Memonitor pelaporan konsumsi bahan bakar kapal melalui Data Collection System (DCS)			1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	
			IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di sekitarnya	%	100		Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPLP
							1.	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut		8	8	100	132.470.000	100%	3	9.954.000	37,5	7,5			SD IV

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN : Mei TAHUN : 2021

(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional		Rasio	0,89	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
								1	Pelayanan angkutan kapal angkutan di perairan (kapal rede)	Jumlah kapal rede yang beroperasi.	20	20	100	3.333.333.333	22%	14	0	70%	0%	2 kapal proses hibah, 3 kapal proses pinjam pakai, 1 kapal dock.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
								2	Subsidi angkutan laut perintis mekanisme penugasan	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	45	45	100	24.792.409.111	22%	45	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
								3	Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang di laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	73	73	100	111.662.583.778	22%	73	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
								4	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	22	22	100	74.138.245.778	22%	20	0	91%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
								5	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	10	10	100	22.696.884.667	22%	10	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
								6	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme penugasan.	Jumlah trayek angkutan ternak	2	2	100	3.917.212.889	22%	2	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
								7	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan ternak	4	4	100	4.855.539.778	22%	4	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	25	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						1	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	16	16	100	74.138.245.778	22%	16	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
								2	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	13	13	100	22.696.884.667	22%	13	0	100%	0%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
	SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. Kepelabuhan	
							1.	FGD Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan (1 tahun)	IKK.22	1	1	100	400.000.000	100	0	0	0	0	Apakah dengan tidak adanya kegiatan FGD target OTP masih sesuai ? untuk mencapai target OTP yang sesuai PK dipengaruhi beberapa aspek dan salah satu aspeknya adalah dengan mengadakan FGD, jadi ada atau tidaknya FGD dipastikan Target OTP telah benar tercapai.	Terkena Penghematan Anggaran	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	
							2.	Bimtek standar kinerja operasional pelabuhan (september)	IKK.22	1	1	100%	350.000.000	100%	1	328.588.000	100%	94%	telah terlaksana pada bulan maret 2021 dan mencapai target 94%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
							3.	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	IKK.22	1	1%	82%	-	-	1	-	100%	0				
	SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,21	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KPLP	
							1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal		5	5	100	119.700.000	100%	0	0	0	0		SD III		

			a	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain		0,39	2.	Sosialisasi keselamatan pelayaran		6	6	100	1.298.686.000	100%	0	0	0	0			SD V
			b	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam		0,65	3.	Uji Kompetensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal Melalui Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal		1	1	100	176.157.000	100%	0	0	0	0			SD III
			c	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia		0,17	4.	Monitoring terkait permasalahan SPB		6	6	100	94.000.000	100%	0	0	0	0			SD III
							5.	Melakukan pemeriksaan atau Investigasi terhadap Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) Terkait Permasalahan Kapal Asing		3	3	100	40.200.000	100%	0	0	0	0			SD III
							6.	Pembangunan kapal patroli		11	11	100	125.005.890.000	100%	0	49.857.732.851	-	39,9			SD V
			IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29		Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPLP
							1.	Kegiatan Operasi Patroli Terpadu		0	0	100			0	0	0	0		tidak ada anggaran karena penghematan	SD I
							2.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE		1	1	100	193.040.000	100%	0	0	0	0			SD I
							3.	Peningkatan fasilitas pelabuhan yang tersertifikasi ISPS		7	7	100	-		9	-	128,6	-		tidak ada anggaran	SD I
							4.	Peningkatan kapal yang tersertifikasi ISPS		255	255	100	-		116	-	45,49	-		tidak ada anggaran	SD I
							5.	Fourth Verification ISPS Code		4	4	100	65.353.000	100%	0	0	0	0			SD I
			IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,25		Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. Kenavigasian
							1.	Rehab/ replacement menara suar rehap/ replacement ramsu		3	3	100	5.021.952.000	100	3	4.608.299.000	100	91,76		Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan	
							2.	upgrade GMDSS dan upgrade VTS		1	1	100	18.770.400.000	100	1	18.599.900.000	100	99,09		Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan	
	SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29		Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KAPPEL
							1.	Melakukan revisi PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim			1	100	336.060.000	-	-	0	0	0	Sesuai	Target pelaksanaan di TW ke-4	
							2.	Penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara (1tahun);			1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	
							3.	Memonitor pelaporan konsumsi bahan bakar kapal melalui Data Collection System (DCS)			1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	
			IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100		Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPLP
							1.	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut		8	8	100	132.470.000	100%	3	9.954.000	37,5	7,5			SD IV

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN : JUNI TAHUN : 2021

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan JUNI				Realisasi Bulan JUNI				% Capaian JUNI Bulan		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
						1	Pelayanan angkutan kapal angkutan di perairan (kapal rede)	Jumlah kapal rede yang beroperasi.	20	20	100	5.000.000.000	14%	14	4.658.356.067	70%	13%	2 kapal proses hibah, 3 kapal proses pinjam pakai, 1 kapal dock.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
						2	Subsidi angkutan laut perintis mekanisme penugasan	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	45	45	100	57.490.379.167	17%	45	68.131.899.882	100%	20%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
						3	Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang di laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	73	73	100	37.188.613.667	33%	73	304.607.272.242	100%	61%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
						4	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan	Jumlah trayek tol laut.	22	22	100	167.493.875.667	33%	20	22.323.217.464	91%	7%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
						5	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	10	10	100	111.207.368.667	33%	10	14.503.118.359	100%	14%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
						6	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme penugasan.	Jumlah trayek angkutan ternak	2	2	100	3.732.905.667	17%	2	4.564.506.016	100%	20%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
						7	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan ternak	4	4	100	6.838.157.167	17%	4	12.615.371.539	100%	31%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
						Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
						1	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan	Jumlah trayek tol laut.	16	16	100	52.882.374.000	16%	16	22.323.217.464	100%	7%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
		2	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	13	13	100	65.549.787.000	64%	13	14.503.118.359	100%	14%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait					
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	25	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
						1	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan	Jumlah trayek tol laut.	16	16	100	52.882.374.000	16%	16	22.323.217.464	100%	7%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
						2	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	13	13	100	65.549.787.000	64%	13	14.503.118.359	100%	14%	Kinerja telah tercapai 100%, namun belum ada pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
						Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
1.	FGD Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan (1 tahun)					IKK.22	1	1	100	400.000.000	100	0	0	0	0	Apakah dengan tidak adanya kegiatan FGD target OTP masih sesuai ? untuk mencapai target OTP yang sesuai PK dipengaruhi beberapa aspek dan salah satu aspeknya adalah dengan mengadakan FGD, jadi ada atau tidaknya FGD dipastikan Target OTP tetap harus tercapai, dikarenakan anggaran FGD terkena penghematan maka pelaksanaan monitoring terkait pencapaian OTP dilaksanakan melalui koordinasi formal (bersurat) kepada UPT-UPT untuk memastikan bahwa OTP harus tercapai sesuai Target pada PK.	Terkena Penghematan Anggaran	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
2.	Bimtek standar kinerja operasional pelabuhan (september)	IKK.22	1	1	100%	350.000.000	100%	1	328.588.000	100%	94%	telah terlaksana pada bulan maret 2021 dan mencapai target 94%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan								
														3.	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	IKK.22	1	1%	82%	-	-
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dr. Keleluhan			
						1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal		5	5	100	119.700.000	100%	0	0	0	0	dilakukan sepanjang tahun jika ada laporan kecelakaan kapal dan UPT terdekat tidak ada petugas pemeriksa kecelakaan kapal		SD III	
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,21	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. KPLP			

[illegible]

			2. pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan			1.	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut		8	8	100	132.470.000	100%	3	9.954.000	37,5	7,5	- sampai dengan bulan juni ada 3 kejadian pencemaran dan 3 yg tertanggulangi! "- kejadian di ukur dari jumlah kejadian/jumlah kejadian yg di tanggulangi di kal 100%... sedangkan 37,5 adalah anggaran sudah digunakan dalam rangka penanggulangan kejadian pencemaran di UPT...jika di UPT sudah ada tenaga penanggulangan pencemaran maka akan langsung ditangani UPT terkait dan laporannya disampaikan ke Dit. KPLP		SD IV
--	--	--	---	--	--	----	--	--	---	---	-----	-------------	------	---	-----------	------	-----	--	--	-------

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN : JULI TAHUN : 2021

NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan JULI				Realisasi Bulan JULI		% Capaian Bulan JULI		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1 Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89	Menunjuk Dir. LALA untuk 1 Pelayanan angkutan kapal angkutan di perairan (kapal rede)	Jumlah kapal rede yang beroperasi.	20	20	100	10.000.000.000	29%	14	9.975.699.694	70%	29%	2 kapal proses hibah, 3 kapal proses pinjaman pakai, 1 kapal dock.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						2 Subsidi angkutan laut perintis mekanisme penugasan	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	45	45	100	58.033.662.333	17%	45	146.042.739.211	100%	42%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						3 Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang di laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	73	73	100	223.325.167.556	44%	73	353.196.996.402	100%	70%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						4 Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	22	22	100	148.276.491.556	44%	20	48.063.848.271	91%	14%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
						5 Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	10	10	100	17.032.663.500	17%	10	14.548.118.359	100%	14%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
						6 Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme penugasan.	Jumlah trayek angkutan ternak	2	2	100	7.465.811.333	33%	2	6.911.930.856	100%	31%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait

							7	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan ternak	4	4	100	13.676.314.333	33%	4	16.525.380.745	100%	40%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
			IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	25	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
							1	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	16	16	100	148.276.491.556	44%	16	48.063.848.271	100%	14%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
							2	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	13	13	100	17.032.663.500	17%	13	14.548.118.359	100%	14%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
	SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. Kepelabuhan
							1.	FGD Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan (1 tahun)	IKK.22	1	1	100	400.000.000	100	0	0	0	0	Apakah dengan tidak adanya kegiatan FGD target OTP masih sesuai ? untuk mencapai target OTP yang sesuai PK dipengaruhi beberapa aspek dan salah satu aspeknya adalah dengan mengadakan FGD, jadi ada atau tidaknya FGD dipastikan Target OTP tetap harus tercapai, dikarenakan anggaran FGD terkena penghematan maka pelaksanaan monitoring terkait pencapaian OTP dilaksanakan melalui koordinasi formal (bersurat) kepada UPT-UPT untuk memastikan bahwa OTP harus tercapai sesuai Target pada PK.	Terkena Penghematan Anggaran	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan
							2.	Bimtek standar kinerja operasional pelabuhan (september)	IKK.22	1	1	100%	350.000.000	100%	1	328.588.000	100%	94%		telah terlaksana pada bulan maret 2021 dan mencapai target 94%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan
							3.	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	IKK.22	1	1%	82%	-	-	1	-	100%	0			
	SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,21	Menunjuk Dir. KPLP untuk														Dir. KPLP
							1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal		5	5	100	119.700.000	100%	0	0	0	0	dilaksanakan sepanjang tahun jika ada laporan kecelakaan kapal dan UPT terdekat tidak ada petugas pemeriksa kecelakaan kapal		SD III
		a		Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain		0,39	2.	Sosialisasi keselamatan pelayaran		6	6	100	1.298.686.000	100%	3	301.446.420	50	23,2	dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan padat karya dan permintaan kegiatan sospel dari UPT, sudah dilaksanakan 3 kegiatan bln juni (1 juni di kep. Seribu, 5 juni di UPP Juwana dan KSOP Panarukan)		SD V
		b		Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam		0,65	3.	Uji Kompetensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal Melalui Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal		1	1	100	176.157.000	100%	0	0	0	0	dilaksanakan bulan Oktober		SD III
		c		Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia		0,17	4.	Monitoring terkait permasalahan SPB		6	6	100	94.000.000	100%	0	0	0	0	dilaksanakan setelah PPKM berakhir		SD III
							5.	Melakukan pemeriksaan atau investigasi terhadap Pejabat Pemeriksa Kelaklauan Dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) Terkait Permasalahan Kapal Asing		3	3	100	40.200.000	100%	1	9.411.000	33	23,4	sudah dilaksanakan di KSOP Cilacap		SD III

						6.	Pembangunan kapal patroli			11	11	100	125.005.890.000	100%	0	41.344.309.133	7	33,1	untuk Kapal Patroli Kelas III (Paket B dan C) masih dalam proses pembangunan, untuk Kapal Patroli Kelas IV (Paket A) masih dalam proses pembangunan, untuk Kapal Patroli Kelas V (Paket A) sudah selesai di bulan Juni, untuk Kapal Patroli Kelas IV (Paket B) sudah selesai di bulan Juni		SD V
			IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KPLP
							1.	Kegiatan Operasi Patroli Terpadu		0	0	100			0	0	0	0		tidak ada anggaran karena penghematan	SD I
							2.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE		1	1	100	193.040.000	100%	1	163.328.460	100	84,61	sudah dilaksanakan di bulan Maret masih menunggu penyelesaian pembayaran		SD I
							3.	Peningkatan fasilitas pelabuhan yang tersertifikasi ISPS		7	7	100	-		11	-	157,1	-	perijinan dengan pihak ketiga	tidak ada anggaran	SD I
							4.	Peningkatan kapal yang tersertifikasi ISPS		255	255	100	-		132	-	51,76	-	perijinan dengan pihak ketiga	tidak ada anggaran	SD I
							5.	Fourth Verification ISPS Code		4	4	100	65.353.000	100%	0	0	0	0	dilaksanakan bulan Oktober		SD I
			IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,25	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk														Dir. Kenavigasian
							1.	Rehab/ replacement menara suar rehap/ replacement ramsu		17	5	100	5.379.467.000	100	5	5.020.696.368	100	93,33	Ditargetkan akan selesai pada bulan Desember tahun 2021	Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan	
							2.	upgrade GMDSS dan upgrade VTS		1	1	100	18.770.400.000	100	1	18.599.900.000	100	99,09	Ditargetkan akan selesai pada bulan Desember tahun 2021	Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan	
	SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KAPPEL
							1.	Melakukan revisi PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim			1	100	336.060.000	-	-	0	0	0	Sesuai	Target pelaksanaan di TW ke-4	
							2.	Penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara (11tahun);			1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	
							3.	Memonitor pelaporan konsumsi bahan bakar kapal melalui Data Collection System (DCS)			1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	
			IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk														Dir. KPLP
							1.	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut													SD IV
										8	8	100	132.470.000	100%	3	9.954.000	37,5	7,5	- sampai dengan bulan juni ada 3 kejadian pencemaran dan 3 yg tertanggulangi - kejadian di ukur dari jumlah kejadian/jumlah kejadian yg di tangulangi di kali 100%... sedangkan 37,5 adalah anggaran sudah digunakan dalam rangka penanggulangan kejadian pencemaran di UPT...jika di UPT sudah ada tenaga penanggulangan pencemaran maka akan langsung ditangani UPT terkait dan laporannya disampaikan ke Dit. KPLP	dilakukan sepanjang tahun jika di UPT ada laporan dan UPT terkait tidak mempunyai tenaga penanggulangan pencemaran	

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN : AGUSTUS TAHUN : 2021

NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan AGUSTUS				Realisasi Bulan AGUSTUS		% Capaian Bulan AGUSTUS		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	
										Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
										Volume	%	Volume	%								Volume
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	SP.1	Meningkatkannya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89	Menunjuk Dir. LALA untuk														
							1	Pelayanan angkutan kapal angkutan di perairan (kapal rede)	Jumlah kapal rede yang beroperasi.	20	20	100	15.000.000.000	43%	14	14.667.728.750	70%	42%	2 kapal proses hibah, 3 kapal proses pinjam pakai, 1 kapal dock.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
							2	Subsidi angkutan laut perintis mekanisme penugasan	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	45	45	100	116.067.324.667	33%	45	183.787.642.355	100%	53%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
							3	Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang di laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	73	73	100	279.156.459.444	56%	73	377.995.594.188	100%	75%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
							4	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	22	22	100	185.345.614.444	56%	20	57.826.325.415	91%	17%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
						5	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	10	10	100	34.065.327.000	33%	10	29.301.731.844	100%	29%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	

							6	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme penugasan.	Jumlah trayek angkutan ternak	2	2	100	11.198.717.000	50%	2	7.926.079.111	100%	35%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
							7	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan ternak	4	4	100	20.514.471.500	50%	4	19.343.753.558	100%	47%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
			IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayanan yang membentuk loop secara teratur	%	25	Menunjuk Dir. LALA untuk														
							1	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	16	16	100	185.345.614.444	56%	20	57.826.325.415	125%	17%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
							2	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	13	13	100	34.065.327.000	33%	10	29.301.731.844	77%	29%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
	SP.2	Meningkatnya	IKP3	Persentase On Time Performan pencapaian Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk														Dir. Kepelabuhan
							1.	FGD Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan (1 tahun)	IKK.22	1	1	100	400.000.000	100	0	0	0	0	Apakah dengan tidak adanya kegiatan FGD target OTP masih sesuai ? untuk mencapai target OTP yang sesuai PK dipengaruhi beberapa aspek dan salah satu	Terkena Penghematan Anggaran	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan
							2.	Bimtek standar kinerja operasional pelabuhan	IKK.22	1	1	100%	350.000.000	100%	1	328.588.000	100%	94%		telah terlaksana pada bulan Maret 2021 dan	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan

							3.	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	IKK.22	1	1%	82%		-	-	1		-	100%	0					
	SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,21	Menunjuk Dir. KPLP untuk																Dit. KPLP		
				1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal																dilaksanakan sepanjang tahun jika ada lapran kecelakaan kapal dan UPT terdekat tidak ada petugas pemeriksa kecelakaan kapal		SD III		
			a	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain		0,39	2.	Sosialisasi keselamatan pelayaran														dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan padat karya dan permintaan kegiatan sospel dari UPT, sudah dilaksanakan 3 kegiatan bln juni (1 juni di kep. Seribu, 5 juni di UPP Juwana dan KSOP Panarukan)		SD V	
			b	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam		0,65	3.	Uji Kompetensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal Melalui Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal														dilaksanakan bulan Oktober		SD III	
			c	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia		0,17	4.	Monitoring terkait permasalahan SPB															dilaksanakan setelah PPKM berakhir		SD III
									5.	Melakukan pemeriksaan atau Investigasi terhadap Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) Terkait Permasalahan Kapal Asing															sudah dilaksanakan di KSOP Cilacap

[illegible]

		laut					1.	Melakukan revisi PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim			1	100	336.060.000	-	-	0	0	0	Sesuai	Target pelaksanaan di TW ke-4	
							2.	Penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara (1tahun);			1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	
							3.	Memonitor pelaporan konsumsi bahan bakar kapal melalui Data Collection System (DCS)			1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	
			IKP8	Persentase keberhasilan penanganan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk													Dir. KPLP	
							1.	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut		8	8	100	132.470.000	100%	3	9.954.000	37,5	7,5	- sampai dengan bulan juni ada 3 kejadian pencemaran dan 3 yg tertanggulangi - kejadian diukur dari jumlah kejadian/jumlah kejadian yg ditanggulangi di kali 100%... sedangkan 37,5 adalah anggaran sudah digunakan dalam rangka penanggulangan kejadian pencemaran di UPT..jika di UPT sudah ada tenaga penanggulangan pencemaran maka akan langsung ditangani UPT	dilakukan sepanjang tahun jika di UPT ada laporan dan UPT terkait tidak mempunyai tenaga penanggulangan pencemaran	SD IV

BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2021

Apakah dengan tidak adanya kegiatan FGD target OTP masih sesuai ?
untuk mencapai target OTP yang sesuai PK dipengaruhi beberapa aspek dan salah satu aspeknya adalah dengan mengadakan FGD, jadi ada atau tidaknya FGD dipisahkan Target OTP tetap harus tercapai, dikarenakan anggaran FGD terkena

		transportasi laut					1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Laporan	5	5	100	119.700.000	100%	1	6.969.000	20	5,82	dilaksanakan sepanjang tahun jika ada laporan kecelakaan kapal dan UPT terdekat tidak ada petugas pemeriksa kecelakaan kapal		SD III
		a	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain		0,39		2.	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	6	6	100	522.700.000	100%	3	308.954.420	50	59,1	dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan padat karya dan permintaan kegiatan sospel dari UPT, sudah dilaksanakan 3 kegiatan bln juni (1 juni di kep. Seribu, 5 juni di UPP Juwana dan KSOP Panarukan)		SD V
		b	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam		0,65		3.	Uji Kompetensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal Melalui Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal	Sertifikat	1	1	100	176.157.000	100%	0	0	0	0	dilaksanakan bulan Oktober		SD III
		c	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia		0,17		4.	Monitoring terkait permasalahan SPB	Laporan	6	6	100	94.000.000	100%	0	0	0	0	dilaksanakan bulan Oktober		SD III
							5.	Melakukan pemeriksaan atau investigasi terhadap Pejabat Pemeriksa Kelautan Dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) Terkait Permasalahan Kapal Asing	Laporan	3	3	100	40.200.000	100%	1	9.411.000	33	23,4	sudah dilaksanakan di KSOP Cilacap		SD III
							6.	Pembangunan kapal patroli	Unit	11	11	100	122.945.890.000	100%	7	64.431.527.851	64	52,4	untuk Kapal Patroli Kelas III (Paket B dan C) masih dalam proses pembangunan, untuk Kapal Patroli Kelas IV (Paket A) sudah selesai, untuk Kapal Patroli Kelas V (Paket A) sudah selesai di bulan Juni, untuk Kapal Patroli Kelas IV (Paket B) sudah selesai di bulan Juni		SD V
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29		Menunjuk Dir. KPLP untuk														Dir. KPLP
							1.	Kegiatan Operasi Patroli Terpadu	Laporan	1	1	100	126.460.000	100%	1	0	100	0	kegiatan baru	sudah dilaksanakan tapi belum pencairan	SD I
							2.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	1	1	100	193.040.000	100%	1	163.328.460	100	84,61	selesai		SD I
							3.	Peningkatan fasilitas pelabuhan yang tersertifikasi ISPS	Sertifikat	7	7	100	-		16	-	228,6	-	perijinan dengan pihak ketiga	tidak ada anggaran	SD I
							4.	Peningkatan kapal yang tersertifikasi ISPS	Sertifikat	255	255	100	-		174	-	68,24	-	perijinan dengan pihak ketiga	tidak ada anggaran	SD I
							5.	Fourth Verification ISPS Code	Laporan	1	1	100	167.600.000	100%	1	0	100	0	erubah dari movev menjadi kegiatan	sudah dilaksanakan tapi belum pencairan	SD I
		IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,25		Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
							1.	Rehab/ replacement menara suar rehap/ replacement ramsu	unit	17	12	100	27.071.672.000	100	12	24.245.877.681	100	89,56	Ditargetkan akan selesai pada bulan Desember tahun 2021	Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan	
							2.	upgrade GMDSS dan upgrade VTS	unit	1	1	100	18.770.400.000	100	1	18.599.900.000	100	99,09	Ditargetkan akan selesai pada bulan Desember tahun 2021	Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan	
	SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KAPPEL
							1.	Melakukan revisi PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim	Draft	1	1	100	336.060.000	-	-	0	0	0	Sesuai	Target pelaksanaan di TW ke-4	

							2.	Penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara (1tahun);	Sertifikat	1	1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
							3.	Memonitor pelaporan konsumsi bahan bakar kapal melalui Data Collection System (DCS)	Laporan	1	1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
								Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KPLP
							1.	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	6	6	100	111.190.000	100%	3	9.954.000	50	9	- sampai dengan bulan juni ada 3 kejadian pencemaran dan 3 yg tertanggulangi "- kejadian di ukur dari jumlah kejadian/jumlah kejadian yg di tanggulangi di kali 100%... sedangkan 37,5 adalah anggaran sudah digunakan dalam rangka penanggulangan kejadian pencemaran di UPT..jika di UPT sudah ada tenaga penanggulangan pencemaran maka akan langsung ditangani UPT terkait dan laporannya disampaikan ke Dit. KPLP	dilakukan sepanjang tahun jika di UPT ada laporan dan UPT terkait tidak mempunyai tenaga penaggulangan pencemaran	SD IV	

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN : OKTOBER TAHUN : 2021

NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan OKTOBER				Realisasi Bulan OKTOBER		% Capaian Bulan OKTOBER		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab			
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran						
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%						
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
	SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89	Menunjuk Dir. LALA untuk													2 kapal proses hibah, 3 kapal proses pinjam pakai, 1 kapal dock.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
							1	Pelayanan angkutan kapal angkutan di perairan (kapal rede)	Jumlah kapal rede yang beroperasi.	20	20	100	25.000.000.000	71%	14	20.745.616.880	70%	59%				
							2	Subsidi angkutan laut perintis mekanisme penugasan	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	45	45	100	161.701.998.667	33%	45	248.078.654.753	100%	51%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.			
						3	Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang di laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	73	73	100	223.893.426.000	33%	73	427.020.014.382	100%	64%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		

4	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	16	16	100	101.906.993.667	33%	20	127.367.603.233	91%	42%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
5	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	13	13	100	322.010.091.333	33%	10	33.504.233.174	100%	35%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
6	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme penugasan.	Jumlah trayek angkutan ternak	2	2	100	6.665.808.000	33%	2	10.777.220.851	100%	54%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait

[illegible]

		pelayanan transportasi laut		Time Performance Pelabuhan Utama dan Pengumpul			1.	FGD Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan (1 tahun)	Tahun	1	1	100	400.000.000	100	0	0	0	0	Apakah dengan tidak adanya kegiatan FGD target OTP masih sesuai ? untuk mencapai target OTP yang sesuai PK dipengaruhi beberapa aspek dan salah satu aspeknya adalah dengan mengadakan FGD.	Terkena Penghematan Anggaran	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan
							2.	Bimtek standar kinerja operasional pelabuhan (september)	Kegiatan	1	1	100%	350.000.000	100%	1	328.588.000	100%	94%		telah terlaksana pada bulan maret 2021 dan mencapai target 94%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan
							3.	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1	1%	82%	-	-	1	-	100%	0			
	SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,21	Menunjuk Dir. KPLP untuk														
							1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Laporan												Dir. KPLP
			a	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain		0,39	2.	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	1	1	100	126.460.000	100%	1	116.448.400	100	92,1	selesai	sudah dilaksanakan tapi belum pencairan	SD I
			b	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam		0,65	3.	Uji Kompetensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal Melalui Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal	Sertifikat	1	1	100	193.040.000	100%	1	163.328.460	100	84,61	selesai		SD I
			c	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia		0,17	4.	Monitoring terkait permasalahan SPB	Laporan	7	7	100	-		19	-	271,4	-	perijinan dengan pihak ketiga	tidak ada anggaran	SD I

						5.	Melakukan pemeriksaan atau Investigasi terhadap Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) Terkait Permasalahan Kapal Asing	Laporan		255	255	100	-		215	-	84,31	-	perijinan dengan pihak ketiga	tidak ada anggaran	SD I
						6.	Pembangunan kapal patroli	Unit		1	1	100	167.600.000	100%	1	167.000.000	100	99,64	selesai	sudah dilaksanakan tapi belum pencairan	SD I
						IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29	Menunjuk Dir. KPLP untuk											
							1.	Kegiatan Operasi Patroli Terpadu	Laporan												
							2.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat												
							3.	Peningkatan fasilitas pelabuhan yang tersertifikasi ISPS	Sertifikat												
							4.	Peningkatan kapal yang tersertifikasi ISPS	Sertifikat												
							5.	Fourth Verification ISPS Code	Laporan												
						IKP6	Tingkat kehendak Kenavigasian	%	97,25	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:											
							1.	Rehab/ replacement menara suar rehap/ replacement ramsu	unit		17	12	100	27.071.672.000	100	12	24.245.877.681	100	89,56	Ditargetkan akan selesai pada bulan Desember tahun 2021	Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan
							2.	upgrade GMDSS dan upgrade VTS	unit		9	7	100	54.016.417.000	100	7	51.927.068.000	100	96,13	Ditargetkan akan selesai pada bulan Desember tahun 2021	Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan
							5.	Fourth Verification ISPS Code	Laporan												
						IKP7	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:											Dir. KAPPEL
							1.	Melakukan revisi PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim	Draft revisi PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim	0		1	100	336.060.000	-	-	0	0	0	Sesuai	Target pelaksanaan di TW ke-4
							2.	Penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara (1tahun);	Jumlah sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara		1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	

					3.	Memonitor pelaporan konsumsi bahan bakar kapal melalui Data Collection System (DCS)	Jumlah kapal yang telah menyampaikan data konsumsi bahan bakar		1	100	-	-	1	-	1	-	-	-	
					Menunjuk Dir. KPLP untuk														Dir. KPLP
	IKP8	Persentase keberhasilan penanganan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	1.	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	6	6	100	100.000.000	100%	4	37.276.000	67	37	- sampai dengan bulan juni ada 3 kejadian pencemaran dan 3 yg tertanggulangi - kejadian di ukur dari jumlah kejadian/jumlah kejadian yg di tanggulangi di kali 100%... sedangkan 37,5 adalah anggaran sudah digunakan dalam	dilakukan sepanjang tahun jika di UPT ada laporan dan UPT terkait tidak mempunyai tenaga penganggulangan pencemaran	SD IV

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN : NOVEMBER TAHUN : 2021

NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan NOVEMBER				Realisasi Bulan NOVEMBER		% Capaian Bulan NOVEMBER		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab		
										Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran					
										Volume	%	Volume	%								Volume	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
	SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89	Menunjuk Dir. LALA untuk															
							1	Pelayanan angkutan kapal angkutan di perairan (kapal rede)	Jumlah kapal rede yang beroperasi.	20	20	100	30.000.000.000	86%	14	23.789.176.553	70%	68%	2 kapal proses hibah, 3 kapal proses pinjam pakai, 1 kapal dock.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
							2	Subsidi angkutan laut perintis mekanisme penugasan	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	45	45	100	230.487.853.500	50%	45	317.084.358.377	100%	69%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
							3	Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang di laut dengan mekanisme pevelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	73	73	100	447.786.852.000	200%	73	470.681.771.161	100%	210%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
							4	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	22	22	100	148.064.494.500	50%	21	179.200.952.041	95%	61%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
							5	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pevelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	10	10	100	40.224.368.500	50%	10	34.085.127.531	100%	42%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
							6	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme penugasan.	Jumlah trayek angkutan ternak	2	2	100	9.998.712.000	31%	2	12.611.353.708	100%	126%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
							7	Pelayanan angkutan kapal ternak mekanisme pevelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan ternak	4	4	100	18.825.572.000	282%	4	31.194.598.662	100%	166%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
			IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	25	Menunjuk Dir. LALA untuk															
							1	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	16	16	100	148.064.494.500	50%	20	179.200.952.041	125%	61%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
							2	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pevelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	13	13	100	40.224.368.500	50%	10	34.085.127.531	77%	42%	Kinerja fisik telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. Kepelabuhan			
						1. FGD Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan (1 tahun)												Apakah dengan tidak adanya kegiatan FGD target OTP masih sesuai ? untuk mencapai target OTP yang sesuai PK dipengaruhi beberapa aspek dan salah satu aspeknya adalah dengan mengadakan FGD, jadi ada atau tidaknya FGD dipastikan Target OTP tetap harus tercapai, dikarenakan anggaran FGD terkena penghematan maka pelaksanaan monitoring terkait pencapaian OTP dilaksanakan melalui koordinasi formal (bersurat) kepada UPT-UPT untuk memastikan bahwa OTP harus tercapai sesuai Target pada PK.	Terkena Penghematan Anggaran dan di revisi menjadi kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan (point no.3)	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
						Tahun	1	1	100	400.000.000	100	0	0	0	0							

							2.	Bimtek standar kinerja operasional pelabuhan (september)	Kegiatan	1	1	100%	350.000.000	100%	1	328.588.000	100%	94%		telah terlaksana pada bulan maret 2021 dan mencapai target 94%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	
							3.	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1	1%	82%	-	-	1	-	100%	0				
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,21	Menunjuk Dir. KPLP untuk															Dir. KPLP	
						1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Laporan	1	1	100	11.500.000	100%	1	6.969.000	100	60,60	dilaksanakan sepanjang tahun jika ada lapran kecelakaan kapal dan UPT terdekat tidak ada petugas pemeriksa kecelakaan kapal		SD III		
		a	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain		0,39	2.	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan		4	4	100	522.700.000	100%	3	308.954.420	75	59,1	dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan padat karya dan permintaan kegiatan sospel dari UPT, sudah dilaksanakan 3 kegiatan bln Juni (1 Juni di kep. Seribu, 5 Juni di UPP Juwana dan KSOP Panarukan) dan akan dilaksanakan akhir tahun di Banyuwangi		SD V	
		b	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam		0,65	3.	Uji Kompetensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal Melalui Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal	Sertifikat	1	1	100	233.400.000	100%	1	198.264.400	100	84,95	selesai		SD III		
		c	Rasio kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia		0,17	4.	Monitoring terkait permasalahan SPB	Laporan	0	0	0	-	0%	0	0	0	0	tidak dilaksanakan (efisiensi anggaran)		SD III		
							5.	Melakukan pemeriksaan atau Investigasi terhadap Pejabat Pemeriksa Kealakiutan Dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) Terkait Permasalahan Kapal Asing	Laporan	1	1	100	10.400.000	100%	1	9.411.000	100	90,5	sudah dilaksanakan di KSOP Cilacap (selesai)		SD III	
							6.	Pembangunan kapal patroli	Unit		11	11	100	116.141.300.000	100%	10	87.889.042.664	91	75,7	untuk Kapal Patroli Kelas III (Paket B) masih dalam proses pembangunan, Kapal Kelas III Paket C selesai tgl 26 september 2021, untuk Kapal Patroli Kelas IV (Paket A) sudah selesai, untuk Kapal Patroli Kelas V (Paket A) sudah selesai di bulan Juni, untuk Kapal Patroli Kelas IV (Paket B) sudah selesai di bulan Juni		SD V
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29	Menunjuk Dir. KPLP untuk																Dir. KPLP
							1.	Monitoring dan Evaluasi Pola Operasi Kapal Negara Patroli Dalam Rangka Kesiapan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TA.2021	Laporan	1	1	100	126.460.000	100%	1	116.448.400	100	92,1	selesai	sudah dilaksanakan tapi belum pencairan		SD I
							2.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	1	1	100	193.040.000	100%	1	163.328.460	100	84,61	selesai			
					3.	Peningkatan fasilitas pelabuhan yang tersertifikasi ISPS	Sertifikat	7	7	100	-		21	-	300,0	-	perjinan dengan pihak ketiga	tidak ada anggaran		SD I		
					4.	Peningkatan kapal yang tersertifikasi ISPS	Sertifikat	255	255	100	-		235	-	92,16	-	perjinan dengan pihak ketiga	tidak ada anggaran		SD I		
						5.	Implementasi PP No.31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, Verifikasi Ke IV, dan Pengujian Kepatuhan Exercise ISPS Code Fasapel TA.2021	Laporan	1	1	100	167.600.000	100%	1	167.000.000	100	99,64	selesai	selesai		SD I	
		IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,25	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Dir. Navigasi	
						1.	Rehab/ replacement menara suar rehap/ replacement ramsu	unit		17	13	100	33.811.720.000	100	13	30.104.112.681	100	89,03	Ditargetkan akan selesai pada bulan Desember tahun 2021	Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan		
						2.	upgrade GMDSS dan upgrade VTS	unit		9	7	100	54.016.417.000	100	7	51.927.068.000	100	96,13	Ditargetkan akan selesai pada bulan Desember tahun 2021	Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan		

SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KAPPEL				
						1.	Melakukan revisi PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim	Draft																Pada revisi POK tgl 19 Maret 2021 kegiatan ini memiliki dana sebesar 336.060.000, namun pada revisi POK 15 Nov 2021 telah dialihkan untuk kegiatan lain. Dan terdapat revisi target, semula 1 menjadi 0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0		Telah terlaksana					
				2.	Penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara (1tahun);	Sertifikat	1	100	-	-	1	-	1	-	-	-								
		3.	Memonitor pelaporan konsumsi bahan bakar kapal melalui Data Collection System (DCS)	Laporan	1	100	-	-	1	-	1	-	-	-										
IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk															Dir. KPLP					
				1.	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan												- sampai dengan bulan juni ada 3 kejadian pencemaran dan 3 yg tertanggulangi "- kejadian di ukur dari jumlah kejadian/jumlah kejadian yg di tanggulangi di kali 100%... sedangkan 37,5 adalah anggaran sudah digunakan dalam rangka penanggulangan kejadian pencemaran di UPT..jika di UPT sudah ada tenaga penanggulangan	dilakukan sepanjang tahun jika di UPT ada laporan dan UPT terkait tidak mempunyai tenaga penanggulangan pencemaran	SD IV				
							6	6	100	100.000.000	100%	4	37.276.000	67	37									

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN : DESEMBER TAHUN : 2021

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan DESEMBER				Realisasi Bulan DESEMBER		% Capaian Bulan DESEMBER		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab			
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran						
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89	Menunjuk Dir. LALA untuk															
						1	Pelayanan angkutan kapal angkutan di perairan (kapal rede yang beroperasi).	Jumlah kapal rede yang beroperasi.	20	20	100	35.000.000.000	100%	15	35.000.000.000	75%	100%	Kinerja fisk hanya mencapai 75 % atau 15 kapal rede yang beroperasi. Sedangkan 2 kapal dihibahkan, dan 3 kapal di pinjam pakai.	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
						2	Subsidi angkutan laut perintis mekanisme penugasan	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	45	45	100	455.263.976.000	100%	45	455.263.975.232	100%	100%	Kinerja fisk dan anggaran telah tercapai 100%.	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
						3	Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang di laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan laut perintis.	73	73	100	671.680.278.000	100%	73	470.681.771.161	100%	70%	Kinerja fisk telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan hanya mencapai 70%. Saat ini dalam proses pelaksanaan pembayaran dengan garansi bank, namun masih terkendala pada Aplikasi Omspan.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
						4	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	22	22	100	296.128.989.000	100%	21	192.901.336.654	95%	65%	Kinerja fisk telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
						5	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	10	10	100	80.448.737.000	100%	10	60.931.298.395	100%	76%	Kinerja fisk telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
						6	Pelayanan angkutan kapal tembak mekanisme penugasan.	Jumlah trayek angkutan tembak	2	2	100	19.997.424.000	300%	2	18.509.082.133	100%	93%	Kinerja fisk telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
						7	Pelayanan angkutan kapal tembak mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek angkutan tembak	4	4	100	37.651.144.000	100%	4	38.868.081.181	100%	103%	Kinerja fisk dan anggaran telah tercapai 100%.	-	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	25	Menunjuk Dir. LALA untuk															
						1	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme penugasan.	Jumlah trayek tol laut.	16	16	100	296.128.989.000	100%	21	192.901.336.654	131%	65%	Kinerja fisk telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
						2	Penyelenggaraan tol laut dengan mekanisme pelelangan swasta.	Jumlah trayek tol laut.	13	13	100	80.448.737.000	100%	10	60.931.298.395	77%	76%	Kinerja fisk telah tercapai 100%, sedangkan kinerja keuangan mengikuti laporan operasional kapal dan permintaan pembayaran.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dr. Kepelabuhan			
						1.	FGD Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan (1 tahun)												Apakah dengan tidak adanya kegiatan FGD target OTP masih sesuai ? untuk mencapai target OTP yang sesuai PK dipengaruhi beberapa aspek dan salah satu aspeknya adalah dengan mengadakan FGD, jadi ada atau tidaknya FGD dipasitikan Target OTP tetap harus tercapai, dikarenakan anggaran FGD terkena penghematan maka pelaksanaan monitoring terkait pencapaian OTP dilaksanakan melalui koordinasi formal (bersurat) kepada UPT-UPT untuk memastikan bahwa OTP harus tercapai sesuai Target pada PK.	Terkena Penghematan Anggaran dan di revisi menjadi kegiatan Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan (point no.3)	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan
								Tahun	1	1	100	400.000.000	100	0	0	0	0				
						2.	Bintek standar kinerja operasional pelabuhan (september)	Kegiatan	1	1	100%	350.000.000	100%	1	328.588.000	100%	94%		telah terlaksana pada bulan maret 2021 dan mencapai target 94%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	
						3.	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1	1%	82%	0	0%	1	0	100%	0				
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,21	Menunjuk Dir. KPLP untuk											Dir. KPLP				
						1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Laporan	1	1	100	11.500.000	100%	1	6.969.000	100	60,60	dilaksanakan sepanjang tahun jika ada tpran kecelakaan kapal dan UPT terdekat tidak ada petugas pemeriksa kecelakaan kapal		SD III	

[illegible]

				penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan			1.	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	6	6	100	100.000.000	100%	6	99.276.000	100	99	- sampai dengan bulan juni ada 3 kejadian pencemaran dan 3 yg tertanggulangi - kejadian di ukur dari jumlah kejadian/jumlah kejadian yg di tanggulasi di kali 100%... sedangkan 37.5 adalah anggaran sudah digunakan dalam rangka penanggulangan kejadian pencemaran di UPT. jika di UPT sudah ada tenaga penanggulangan pencemaran maka akan langsung ditangani UPT terkait dan laporannya disampaikan ke Dit. KPLP	dilakukan sepanjang tahun jika di UPT ada laporan dan UPT terkait tidak mempunyai tenaga penaggulungan pencemaran	SD IV
--	--	--	--	--	--	--	----	--	---------	---	---	-----	-------------	------	---	------------	-----	----	--	---	-------

Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut Tahun 2021

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
1.	Air Bangis	Belum beroperasi karena sedang dalam pembangunan akses jalan darat menuju Pelabuhan Air Bangis yang dilakukan oleh Pemkab Pasaman Barat. Sumber data : Sumbarsatu.com/berita/27245-pelabuhan-teluk-tapang-beroperasi-2023-air-bangis-jadi-pusat-industri-terbesar .
2.	Bagan Asahan	Status pelabuhan pengumpan regional (PR). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
3.	Banda Besar	Tidak terdapat data dan informasi, termasuk dalam SIMPEL.
4.	Batanjung	Status pelabuhan pengumpul (PP). Pembangunan belum selesai. Sumber data: https://www.tabengan.com/bacaberita/54321/pelabuhan-batanjung-mangkrak/ . Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
5.	Darume	Status pelabuhan lokal (PL). Hanya dilayani oleh angkutan lokal Kep Halmahera dsk.
6.	Dompak	Status pengumpan regional (PR). Pembangunan belum selesai. https://kumparan.com/batamnews/pelabuhan-dompak-tanjungpinang-proyek-ratusan-miliar-yang-kini-mangkrak-1vDyLRJaHD/full Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
7.	Giliketapang	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
8.	Glimandangin	Tidak terdapat data dan informasi, termasuk dalam SIMPEL. Pemprov Jatim telah membangun pelabuhan ini pada tahun 2019. Tahun 2021 telah digunakan untuk angkutan penyeberangan lokal Kepulauan Madura dsk.
9.	Gudang Arang	Di kota Ambon terdapat Pelabuhan Nusantara Yos Soedarso tipe kelas 4, yang difungsikan sebagai pelabuhan utama untuk kegiatan ekspor dan impor serta penumpang. Sedangkan untuk mendukung kegiatan pelayaran antar pulau di Kep. Ambon dsk, digunakan Pelabuhan Gudang Arang dan Pelabuhan Slamet Riyadi yang berfungsi sebagai pelabuhan lokal yang dikelola oleh PT Pelindo IV.

Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut Tahun 2021

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
10.	Indari	Status pelabuhan lokal (PL). Hanya dilayani oleh angkutan lokal Kep Halmahera dsk. Rencana tahun 2022 akan dilayani kapal angkutan laut perintis.
11.	Janggerbun	Tidak terdapat data dan informasi, termasuk dalam SIMPEL.
12.	Kadatua	Digunakan sebagai pelabuhan penyeberangan, berdasarkan Kepmenhub No. KM 266 TAHUN 2020 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Kadatua Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
13.	Kataloka	Status pelabuhan lokal (PL). Hanya dilayani oleh angkutan lokal Pulau Seram Timur dsk.
14.	Kilo	Sedang proses penyelesaian survey investigasi design (SID) pembangunan pelabuhan. Sumber data : https://www.suarantb.com/pembangunan-pelabuhan-kilo-masuk-program-prioritas-di-kemenhub/
15.	Kobror	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
16.	Koititi	Status pelabuhan lokal (PL). Hanya dilayani oleh angkutan lokal Kep. Halmahera dsk. Rencana tahun 2022 akan dilayani kapal angkutan laut perintis.
17.	Kotabunan	Kondisi dermaga tidak layak dioperasikan, karena beton rusak dan kedalaman air sudah dangkal. Sumber data : https://mongondow.co/2019/06/puluhan-tahun-dermaga-kelas-iii-kotabunan-tak-beroperasi/ Tahun 2021 telah dilelang pembangunan faspel. Sumber data : https://lpse.dephub.go.id/eproc4/lelang/76485114/pengumumanlelang
18.	Lagundi	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
19.	Loleo Jaya	Status pelabuhan lokal (PL). Hanya dilayani oleh angkutan lokal Kep. Halmahera dsk.
20.	Maidi/Lifofa	Status pelabuhan lokal (PL). Hanya dilayani oleh angkutan lokal Kep. Tidore dsk.

Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut Tahun 2021

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
21.	Malarko	Terdapat studi DED Tahun 2019, belum operasional. Sumber data : Dit Kepelabuhanan.
22.	Mangga Dua	Berfungsi sebagai pelabuhan speed boat (armada semut) di Ternate. Sumber data : https://indotimur.com/ternate/ksop-armada-semut-mangga-dua-tingkatkan-pengawasan
23.	Mansinam	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Terletak di Pulau Mansinam Papua Barat, dapat ditempuh 10 menit menggunakan kapal motor/speed boat dari Pelabuhan Manokwari.
24.	Marabatuan	Dua Dermaga Pelabuhan yakni Dermaga Marabatuan dan Dermaga Matasiri Kotabaru, Kalimantan Selatan yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut siap dioperasikan dan segera dapat melayani masyarakat. Kesiapan dua dermaga tersebut diawali dengan dilakukan uji coba penyandaran oleh Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 93 pada tanggal 19 Agustus 2020. Sumber data : https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/7822/dermag-a-marabatuan-dan-matasiri-siap-dioperasikan-melayani-masyarakat .
25.	Mataritip	Masih dalam proses penyelesaian pembangunan jalan akses masuk pelabuhan. Selain itu masih ada proses pembebasan lahan di lokasi pelabuhan. Sumber data: https://kaltim.tribunnews.com/2021/07/31/proyek-pelabuhan-mantaritip-di-berau-ditarget-rampung-4-tahun-lagi-tunggu-anggaran-pusat-dan-bankeu?page=2
26	Matasiri	Dua Dermaga Pelabuhan yakni Dermaga Marabatuan dan Dermaga Matasiri Kotabaru, Kalimantan Selatan yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut siap dioperasikan dan segera dapat melayani masyarakat. Kesiapan dua dermaga tersebut diawali dengan dilakukan uji coba penyandaran oleh Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 93 pada tanggal 19 Agustus 2020. Sumber data : https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/7822/dermag-a-marabatuan-dan-matasiri-siap-dioperasikan-melayani-masyarakat .

Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut Tahun 2021

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
27.	Mempawah	Belum operasional Kondisi alur pelayaran yang sempit dan banyak mengandung pasir sehingga sering terjadi longsor dan pendangkalan. Sumber data : Dit Kepelabuhanan.
28.	Menggala	Sudah ada studi sid, namun perlu adanya pengerukan alur masuk ke pelabuhan. Sumber data : Dit Kepelabuhanan.
29.	Moru	Dermaga pelabuhan Moru diperuntukan bagi terminal peti kemas. Pembangunan telah selesai tahun 2018, namun belum beroperasi karena terdapat kendala akses jalan darat Kalabahi – Moru. Sumber data : https://tribuanapos.net/2020/06/29/dprd-alor-geram-delapan-tahun-pelabuhan-peti-kemas-moru-belum-beroperasi/
30	Mumugu	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas penunjang seperti alat bongkar muat. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Rencana tahun 2022 akan dilayani kapal tol laut.
31.	Nunbaun Sabu (Namosain)	Saat ini digunakan sebagai dermaga pelayaran rakyat dan melayani perairan Rote dsk. Sumber data : https://shipsapp.co.id/Pelabuhan/nunbaun-sabu-namosain.html
32	Oepoli	Pemprov NTT sedang melaksanakan penyusunan masterplan pembangunan pelabuhan Oepoli. Sumber data : http://pengadaan.info/detail/4772131-master-plan-pembangunan-pelabuhan-laut-oepoli
33.	P. Mules	Belum operasional. Sumber data : Dit Kepelabuhanan.
34.	P. Sebesi	Saat ini digunakan sebagai dermaga pelayaran rakyat dan melayani perairan Pulau Sebesi dsk. Kapal yang melayari antara lain Kapal Pelayaran Rakyat (Pera) Banawa Nusantara 73 bantuan hibah dari Kementerian Perhubungan RI. Sumber data : https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--kapal-pera-jadi-moda-transportasi-gratis-rute-dermaga-bom-pulau-sebesi

Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut Tahun 2021

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
35.	Palipi	Sedang dilakukan rehabilitasi dermaga trestle. Sumber data : https://sulbar.tribunnews.com/2021/12/21/proyek-pelabuhan-palipi-majene-kembali-dikerjakan-lokasi-pembangunan-tanpa-papan-proyek
36.	Pangandaran/Bojongsalawe	Belum beroperasi. Karena masih memerlukan izin operasional yang hingga saat ini belum terbit. Salah satu syarat izin operasional, pelabuhan harus dilakukan izin uji sandar kapal pada dermaga. Pada tanggal 5 Maret 2021 telah dilakukan uji sandar kapal menggunakan kapal negara navigasi KN. Prajapati. Sumber data : jabar.inews.id/berita/pelabuhan-bojongsalawe-pangandaran-belum-beroperasi-tunggu-terbit-izin-operasional .
37.	Papela	Saat ini digunakan sebagai dermaga pelayaran lokal dan melayani angkutan penyeberangan Pulau Rote dsk. Sumber data : https://shipsapp.co.id/Pelabuhan/papela.html
38.	Parit Rempak	Pelabuhan lokal. Tahun 2019, pembangunannya diambil alih Ditjen Hubdat untuk angkutan penyeberangan. Sumber data : https://www.beritatrans.com/artikel/141113/Ditjen-Hubdat-Ambil-Alih-Pembangunan-Pelabuhan-Parit-Rempak/
39.	Parlimbungan Ketek	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Tahun 2020 Kemen PUPR sedang melanjutkan pembangunan akses jalan nasional ke pelabuhan Parlimbungan Ketek. Sumber data : https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/61371064/pengumuman-anlelang
40.	Pasean	Pelabuhan Pasean merupakan pelabuhan lokal milik pemerintah Kabupaten Pamekasan. Digunakan untuk angkutan lokal Kep. Madura dsk. Sumber data : https://www.researchgate.net/publication/328993237_UP_AYA_MEMBERDAYAKAN_PELABUHAN_PASEAN_PA_MEKASAN
41.	Pawi	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
42.	Pota	Status pelabuhan lokal (PL). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).

Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut Tahun 2021

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
		Kendala jalan akses ke pelabuhan dari jalan utama kondisinya kurang baik. Sumber data : https://www.pojokbebas.com/pembangunan-pelabuhan-pota-mandek-sp-ntt-serbu-kemenhub/
43.	Pulau Kampai	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
44.	Pulau Owi	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
45.	Pulau Seluan	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
46.	Rainis	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
47.	Riung	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
48.	Sebalang	Status pelabuhan pengumpang regional (PR). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Belum ada akses jalan ke pelabuhan Sebalang. Sumber data : https://lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-pemkab-lamsel-dan-ksop-panjang-perjuangkan-infrastruktur-jalan-pelabuhan-sebalang
49.	Sepo	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
50.	Sibadeh	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
51.	Sibigo	Status pelabuhan lokal (PL). Dermaga Kayu 15 x 5 m Dermaga beton rusak karena gempa Aceh. Sumber Data :

Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut Tahun 2021

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
		Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
52.	Siompu	Digunakan sebagai pelabuhan penyeberangan, berdasarkan Kepmenhub No. KM 265 TAHUN 2020 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Siompu Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Karae, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
53.	Siwa/Bangsalae	Selama ini difungsikan sebagai pelabuhan angkutan penyeberangan Siwa-Tobaku. Sumber data : https://telisik.id/news/pelabuhan-penyeberangan-tobaku-siwa-sepi-penumpang
54.	Sungsang	Difungsikan sebagai pelabuhan lokal perikanan. Kedalaman hanya 3,5 m ketika air surut. Sumber data : https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2556/di-tanjung-carat-kapal-besar-bisa-merapat
55.	Tana Paser/Pondong	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Rencana tahun 2022 dilayani kapal angkutan laut perintis.
56.	Tanjung Berakit	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Dermaga ponton Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
57.	Tanjung Moch	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Masih dalam pembangunan fasilitas pelabuhan. Sumber data : https://pontas.id/2021/04/09/pelabuhan-tanjung-moco-mandek-ksop-salahkan-bk-ftz-tanjungpinang/
58.	Tanjung Pakis	Baru terbit konsesi perusahaan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan pada tahun 2020.
59.	Tanjung Sarang Elang	Status pelabuhan pengumpan regional (PR). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
60.	Tanjung Satai	Status pelabuhan pengumpan regional (PR). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
61.	Teluk Sigintung/Seruyan	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Sumber Data :

Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut Tahun 2021

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
		Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Terkendala akses jalan. Sumber data : https://www.borneonews.co.id/berita/202463-bupati-seruyan-harapkandukungan-akses-jalan-ke-pelabuhan-teluk-segintung
62.	Teluk Tapang	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Pembangunan belum selesai. Sumber data : https://padangkita.com/kejar-target-operasi-2022-pembangunan-pelabuhan-teluk-tapang-berlanjut/
63.	Tobilota	Status pelabuhan lokal (PL). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Pembangunan belum selesai. Sumber data : https://nusabungapos.com/progres-pembangunan-pelabuhan-tobilota-telah-100-persen-edi-purnomo-tinggal-finishing-dan-serah-terima/1639/lintas-ntt/
64.	Ujung Jabung	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Pembangunan belum selesai. Sumber data : https://dishub.jambiprov.go.id/2021/09/09/bahas-pelabuhan-ujung-jabung/
65.	P. Sabutung	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).

Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur

Tahun 2021

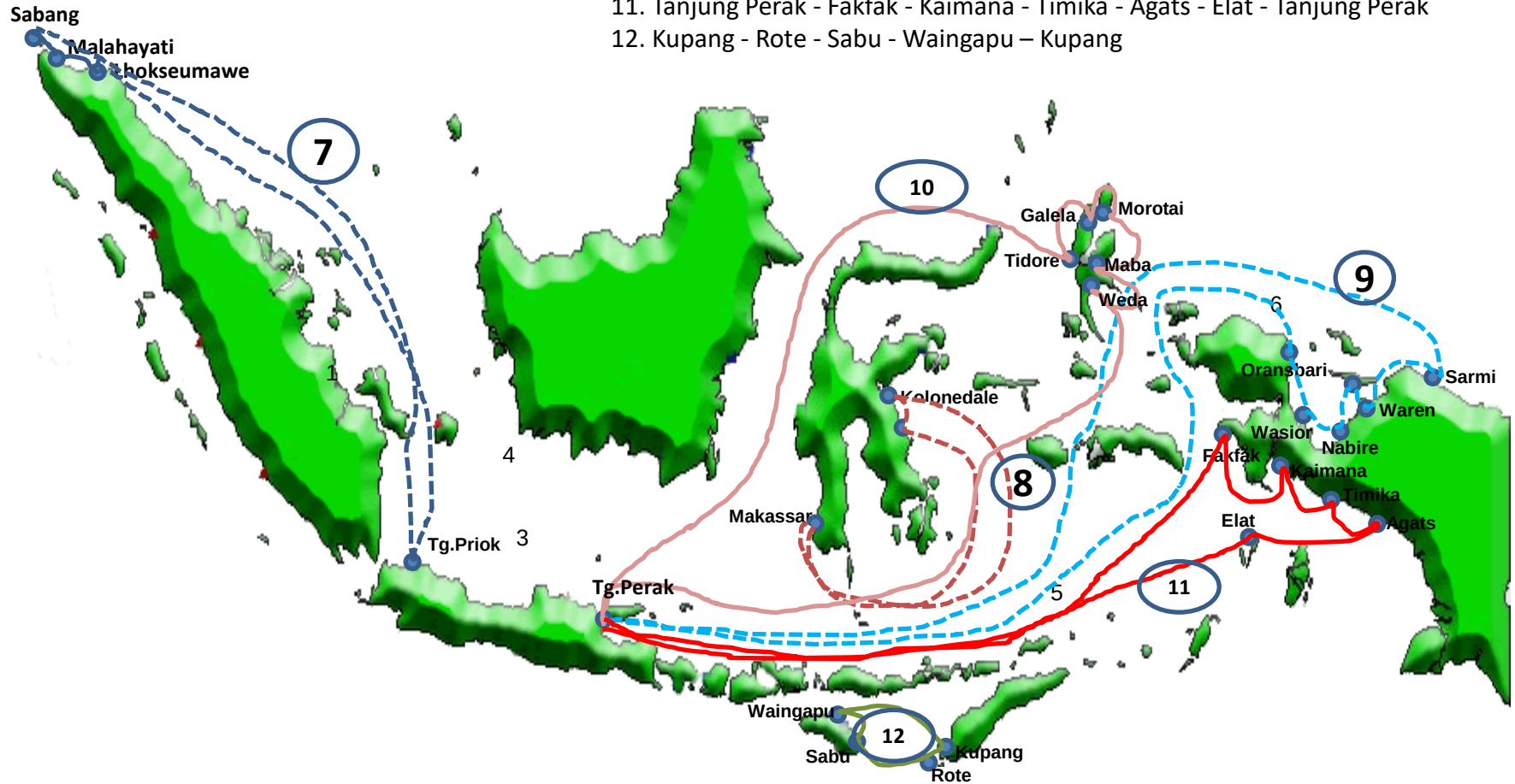
NO	JARINGAN TRAYEK
1	Tanjung Perak - Makassar - Tahuna - Tanjung Perak
2	Tanjung Perak - Makassar - Bobong - Luwuk - Tanjung Perak
3	Tanjung Priok - Teluk Bayur - Tanjung Priok
4	Tanjung Perak - Kupang - Tanjung Perak
5	Tanjung Perak - Merauke - Tanjung Perak
6	Tanjung Perak - Maumere - Tanjung Perak
7	Tanjung Priok - Lhokseumawe - Malahayati - Sabang - Tanjung Priok
8	Makassar -Bungku- Kolonodale- Makasar
9	Tanjung Perak - Oransbari - Wasior - Nabire - Serui - Waren - Sarmi -Tanjung Perak
10	Tanjung Perak - Tidore - Morotai - Galela - Maba - Weda - Tanjung Perak
11	Tanjung Perak - Fakfak - Kaimana - Timika - Agats - Elat - Tanjung Perak
12	Kupang - Rote - Sabu - Waingapu – Kupang
13	Maumere - Larantuka - Lewoleba - Kalabahi - Maumere
14	Tanjung Perak - Makassar- Jailolo - Morotai - Tanjung Perak
15	Tanjung Perak - Wanci - Namrole - Pulau Obi - Tanjung Perak
16	Tanjung Perak - Saumlaki - Dobo - Tanjung Perak
17	Tanjung Perak - Badas - Bima - Tanjung Perak

Peta *Loop Service* Tahun 2021

1. Tanjung Perak - Makassar - Tahuna - Tanjung Perak
2. Tanjung Perak - Makassar - Bobong - Luwuk - Tanjung Perak
3. Tanjung Priok - Teluk Bayur - Tanjung Priok
4. Tanjung Perak - Kupang - Tanjung Perak
5. Tanjung Perak - Merauke - Tanjung Perak
6. Tanjung Perak - Maumere - Tanjung Perak



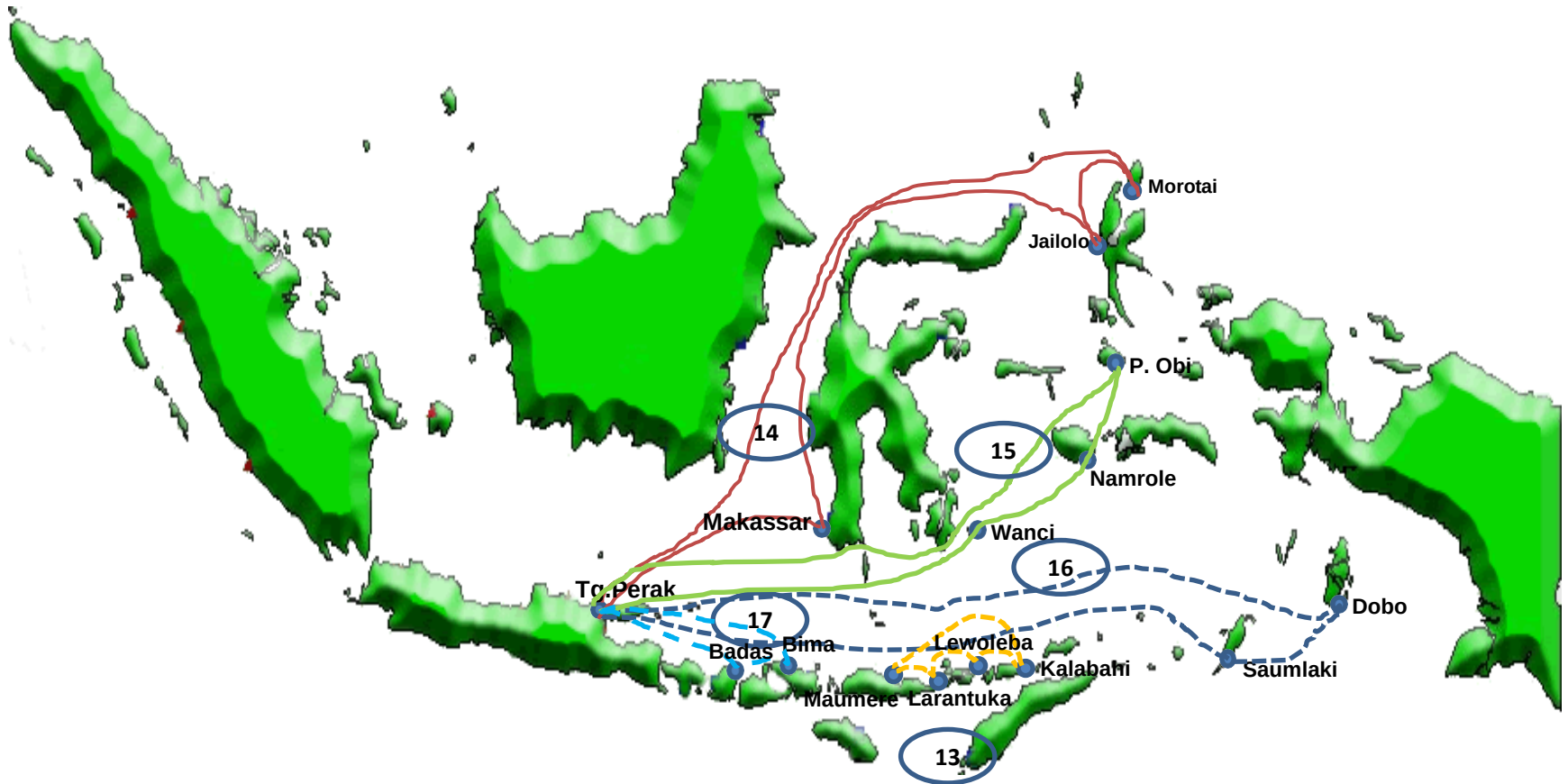
Peta *Loop Service* Tahun 2021



7. Tanjung Priok - Lhokseumawe - Malahayati - Sabang - Tanjung Priok
8. Makassar -Bungku- Kolonodale- Makasar
9. Tanjung Perak - Oransbari - Wasior - Nabire - Serui - Waren - Sarmi -Tanjung Perak
10. Tanjung Perak - Tidore - Morotai - Galela - Maba - Weda - Tanjung Perak
11. Tanjung Perak - Fakfak - Kaimana - Timika - Agats - Elat - Tanjung Perak
12. Kupang - Rote - Sabu - Waingapu – Kupang

Peta *Loop Service* Tahun 2021

13. Maumere - Larantuka - Lewoleba - Kalabahi - Maumere
14. Tanjung Perak - Makassar - Jailolo - Morotai - Tanjung Perak
15. Tanjung Perak - Wanci - Namrole - Pulau Obi - Tanjung Perak
16. Tanjung Perak - Saumlaki - Dobo - Tanjung Perak
17. Tanjung Perak - Badas - Bima - Tanjung Perak



CAPAIAAN (WT)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CAPAIAN (AT)

[illegible]

[illegible]

	a. Terminal I	-																								
	b. Terminal II	-																								
60	Pelabuhan Badas	1																								
61	Pelabuhan Kupang	1																								
62	Pelabuhan Waingapu	-	-																							
63	Pelabuhan Ende	-																								
64	Pelabuhan Laurentius Say	-																								
65	Pelabuhan Kalabahi	-																								
66	Pelabuhan Sampit																									
	a. Terminal Sampit	4																								
	b. Terminal Bagendang	4																								
67	Pelabuhan Kumai																									
	a. Terminal Panglima Utar Kumai	4																								
	b. Terminal Tanjung Kalap Kumai	4																								
	c. Bumiharjo	4																								
68	Pelabuhan Pulang Pisau	-																								
69	Pelabuhan Pangkalan Bun	-	-	-																						
70	Pelabuhan Sukamara	-																								
71	Pelabuhan Banjarmasin																									
	a. Terminal Konvensional	4												3,00											1,00	1,00
	b. Terminal Petikemas Banjarmasin	4												3,15											1,00	1,00
72	Pelabuhan Kotabaru - Batulicin																									
	a. Dermaga Umum	1,99	0,20	0,68	0,73	1,00	1,87	0,38	0,41	0,92	0,87	0,50		0,87	1,00	1,00		0,50	0,94		1,00			1,00	1,00	1,00
	b. Mekar Putih/IBT	1,99	0,20	0,68	0,73		0,56	0,49	0,59	0,52	0,52	0,60		0,60	1,00	1,00			0,28		1,00			1,00	1,00	1,00
	c. Batulicin	1,99	0,24	0,24		0,86	0,62	0,47	0,55			0,62		0,60	1,00	1,00		0,43	0,31		1,00			1,00	1,00	1,00
73	Pelabuhan Balikpapan																									
	a. Terminal Konvensional	2				2,00												1,00						1,00	1,00	
	b. Terminal Petikemas Kariangau	3												1,17											1,00	
74	Pelabuhan Samarinda																									
	a. Terminal Konvensional																									
	b. Terminal Petikemas Palaran																									
75	Pelabuhan Bontang																									
76	Pelabuhan Nunukan	1	-	-				0,30	0,30												1,00			1,00		
77	Pelabuhan Tarakan																									
	a. Terminal Konvensional	1,5																								
	b. Terminal Petikemas Tarakan	1,5																								
78	Pelabuhan Bitung																									
	a. Terminal Konvensional	1,5	1,37	1,16	1,35	0,49	1,26	1,29	1,36			1,34						0,33	0,84		1,00			1,00	1,00	1,00
	b. Terminal Petikemas Bitung	2												1,25												
79	Pelabuhan Teluk Palu (Pantoloan)																									
	a. Terminal Konvensional	1																								
	b. Terminal Petikemas Pantoloan	1																								
80	Pelabuhan Manado	-																								
81	Pelabuhan Gorontalo	1																								
82	Pelabuhan Toli-toli	1																								
83	Pelabuhan Kendari																									
	a. Bungkutoko	1,02																								
	b. Nusantara	0,785																								
	c. Pelabuhan Ferry																									
	d. Kendari New Port																									
84	Pelabuhan Makassar																									
	a. Terminal Multipurpose Soekarno	1,25																								
	b. Terminal Penumpang Soekarno	1,25																								
	c. Terminal Ro-Ro Soekarno	1,25																								
	d. Terminal Multipurpose Hasanuddin	1,25																								
	e. Terminal Curah Kering Hatta	1,25																								
	f. Terminal Petikemas Hatta	1,25																								
	g. Terminal Paotere	1,25																								
85	Pelabuhan Pare-Pare	1,5																								1,00
86	Pelabuhan Ambon																									
	a. Terminal Konvensional	1,2	0,22	0,22		0,21	0,20	0,20		0,20		0,22			1,00	1,00		0,18	0,17		1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
	b. Terminal Petikemas Ambon	1,2	0,22	0,22		0,21	0,20	0,20		0,20		0,22			1,00	1,00		0,18	0,17		1,00		1,00	0,00	0,00	0,00

22,98	22,22	1,00	21,71	21,24	1,00	32,44	17,81	0,81	35,96	48,82	35,96
1,00	0,97	1,00	0,68	0,71	1,00	0,98	0,99	0,81	0,92	0,89	0,90
100%	97%	100%	68%	71%	100%	98%	99%	81%	92%	89%	90%
TW I		99%		TW II		80%		TW III		93%	
								TW IV		90%	
90%											

Approach Time (AT) waktu kapal saat pelaksanaan pemanduan sehingga apabila dibawah standar kinerja yang ditetapkan artinya Kinerjanya Bagus dan Sebaliknya Satuan Jam

CAPAIAN ET:BT

NO	NAMA PELABUHAN	STANDAR KINERJA	Laporan ET:BT Tahun 2021												PENCAPAIAN ET:BT Tahun 2021											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pelabuhan Lhokseumawe	70																								
2	Pelabuhan Malahayati	-	-	-																						
	a. Terminal Konvensional	50	53,42	54,05	46,35											1,00	1,00							1,00		
3	Pelabuhan Sabang	80																								
4	Pelabuhan Meulaboh	50	-																							
5	Pelabuhan Kuala Langsa	65																								
6	Pelabuhan Belawan																									
	a. Belawan Lama	45		45,00		55,00	52,50	55,00	51,40					55,00	66,63				1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	b. Ujung Baru	70		68,00		69,00	68,10	67,20	67,70					67,20	67,70				0,99	0,96	0,97		1,00	1,00	0,97	
	c. Citra	60		62,00		60,20	61,00	60,00	59,80					60,00	59,80				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
	d. I K D	60		61,00		66,10	63,70	63,00	63,60					63,00	63,60				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
	e. TPKDB/TPK B	68		74,95		74,70	76,14	74,29	71,16					74,29	71,16				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
	f. B I C T/TPK A	68		77,50		77,96	78,81	79,09	76,81					79,09	76,81				1,00	1,00	1,00		1,00	1,16	1,00	
7	Pelabuhan Pangkalan Susu (pertamina)	-																								
	PLTU																									
8	Pelabuhan Tanjung Balai Asahan	50																								
9	Pelabuhan Kuala Tanjung																									
	a. Dermaga C	70	-																				0,00	0,00	0,00	
	b. Terminal Multipurpose	70	82,00	53,00	41,00			33,57							33,57	1,00	0,76	0,59					0,00	0,00	0,48	
10	Pelabuhan Sibolga	70	18,00	47,00	55,00	39,00		43,13	56,00	97,00	69,45	71,00	71,00	69,45		0,26	0,67			0,62	0,80		1,01	1,01	0,99	
11	Pelabuhan Gunung Sitoli	50																								
12	Pelabuhan Dumai																									
	a. Dermaga A (Cargo)	70																								
	b. Dermaga B (CPO)	80																								
	c. Dermaga C (Multipurpose)	70																								
13	Pelabuhan Pekanbaru	50																								
14	Pelabuhan Kuala Enok	-																								
15	Pelabuhan Tanjung Buton																									
16	Pelabuhan Tembilahan	50	30,00	25,43	30,00			24,24								0,60	0,51						0,00	0,00	0,00	
17	Pelabuhan Kuala Cinaku	50																								
18	Pelabuhan Bagan Siapi-api	75																								
19	Pelabuhan Bengkulu	50																								
20	Pelabuhan Selat Panjang	50																								
21	Pelabuhan Tanjung Pinang	70			22,42			26,36	32,87																	
22	Pelabuhan Tanjung Balai Karimun	50	22,08	19,55	12,45			21,39	15,08							0,44	0,39						0,00	0,00	0,00	
23	Pelabuhan Kijang	50	19,00	25,00	25,59	20,00	26,28	24,05	26,18	23,00	22,36	26,00	23,00	18,78		0,38	0,50		0,53	1,00			0,52	0,46	0,45	
24	Pelabuhan Talang Duku																									
	a. Terminal Multipurpose	50																								
	b. Terminal Petikemas	50																								
	c. Terminal Curah Kering	65																								
25	Pelabuhan Kuala Tungkal	50																								
26	Pelabuhan Muara Sabak	50	20,00	25,63	27,17	32,00	27,04	53,79	25,44	33,71	33,71	20,55	46,15	35,97					0,54		0,51	0,67	0,67	0,41	0,92	0,67
27	Pelabuhan Pangkal Balam																									
	a. Terminal Pangkal Balam	70																								
	b. Terminal Belinyu	90																						1,00		
28	Pelabuhan Tanjung Pandan																									
	a. Terminal Tanjung Pandan	50			26,26																					
	b. Terminal Tanjung Batu	50																								
29	Pelabuhan Muntok	-																								
30	Pelabuhan Teluk Bayur																									
	a. Terminal Multipurpose	55																								
	b. Terminal Petikemas	60																								
	c. Terminal Curah Kering	60																								
	d. Terminal Curah Cair	70																								
31	Pelabuhan Pulau Baai																									
	a. Terminal Multipurpose	60	60,00	60,00	42,03	49,00	58,00	48,00	61,46	42,94	65,00		59,15	65,00	1,00	1,00				1,00	0,72		0,00	0,99	1,08	
	b. Terminal Curah Cair/Curah Kering	70	60,00	60,00	42,03	49,00	58,00	48,00	61,46	42,94	65,00	59,00		65,00	1,00	1,00			0,88	0,61		0,84	0,00	0,93		
32	Pelabuhan Palembang																									
	a. Terminal Multipurpose	50			76,04			78,01			58,51			57,81									1,00	1,00	1,00	
	b. Terminal Petikemas	50			62,45			65,49			62,95			61,71									1,00	1,00	1,00	
33	Pelabuhan Panjang																									
	a. Terminal Multipurpose	60	58	63	62	63	67,06	68,41	67,45	65,88	67,00	70	74	72,14				1,00					1,00	1,00	1,00	
	b. Terminal Petikemas	60	68,00	77,00	78,99	77,00	80,56	75,35	80,49	76,97	76,76	77,35	77,00	73,35					1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	c. Terminal Curah Kering	60	59,00	56,00	65,66	62,00	65,61	69,64	71,94	71,72	68,73	75,65	78,00	69,71				1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
34	Pelabuhan Bakauheuni	-																								
35	Pelabuhan Banten																									
	a. Terminal Ciwandan	80						0,63	63,00	0,59	0,75	63,00	0,59	0,75									0,01	1,00	0,01	
	b. Terminal Cigading	80			86,50			89,75	95,02	89,50	85,63	95,02	89,50	85,63					1,00				1,00	1,00	1,00	
	c. Terminal Indah Kiat Pulo & Paopoe	80																								

36	Pelabuhan Cirebon	65	49,57	52,03	52,34		52,43	53,33	53,08						0,76	0,80		0,81	0,82			0,00	0,00		
37	Pelabuhan Patimban																								
38	Pelabuhan Tanjung Priok																								
	a. JICT	85		89,86			91,24	92,10	91,45										1,00	1,00			1,00		
	b. TPK KOJA	85		90,00			91,60	92,37	92,21										1,00	1,00			1,00		
	c. NPCT1	85		85,00			87,00	85,00	86,00										1,00	1,00			1,00		
	d. MAL	75		78,00			42,00	38,00	83,00										0,51	1,00			1,00		
	e. IPC TPK Area I																								
	1) TPK 009	55																							
	2) Konvensional	65																							
	f. IPC TPK Area II																								
	1) Konvensional	65																							
	2) TPK	70																							
	g. PTP Wilayah I	67																							
	h. PTP Wilayah II																								
	1) Dalam Negeri	67																							
	2) Luar Negeri	68																							
	i. IKT	70		83,09				80,90	80,52										1,00	1,00			0,00		
39	Pelabuhan Sunda Kelapa	50																							
40	Pelabuhan Marunda																								
	a. Terminal KBN	90																							
	b. Terminal KCN	90																							
	c. Terminal PTI	90																							
41	Pelabuhan Kepulauan Seribu	-																							
42	Pelabuhan Muara Angke	-																							
43	Pelabuhan Pontianak																								
	a. Terminal Multipurpose	62		59,90			57,00	65,00		61,50		59,00							1,00			0,99	0,00	0,95	
	b. Terminal Petikemas	62																							
44	Pelabuhan Sintete	-																							
45	Pelabuhan Ketapang	50																							
46	Pelabuhan Tanjung Emas Semarang																								
	a. Terminal Konvensional	70					71,68																0,00		
	b. Terminal Petikemas Semarang	75					70,79																0,00		
47	Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap	70	69,05	69,21	69,97	66,87	66,87	64,98	68,81	68,90	66,58	69,90	70,00	70,00	0,99	0,99		1,00				1,00	1,00	1,00	
48	Pelabuhan Tegal	70																							
49	Pelabuhan Tanjung Perak																								
	a. Terminal Jamrud	70	58,71	60,23										69,65	0,84	0,86						1,00	1,00	1,00	
	b. Terminal Nilam	70	64,46	69,28										69,75	0,92	0,99						0,00	0,00	1,00	
	c. Terminal Mirah	70	48,96	62,24										76,18	0,70	0,89						0,00	1,00	1,00	
	d. Terminal Berlian	70	73,97	73,63										84,08	1,00	1,00						1,00	1,00	1,00	
	e. Terminal Petikemas Surabaya	81	87,58	79,33										78,16	1,00	0,98						1,00	0,00	0,96	
	f. Terminal Teluk Lamong	70	70,05	71,30										66,60	1,00	1,00						1,00	1,00	0,95	
50	Pelabuhan Gresik																								
	a. Terminal Gresik	70	51,36	59,90	68,95	71,00	55,00	53,14	55,89										0,80			0,00	0,00		
	b. Terminal BMS	70	70,00	53,00	53,00	54,00	60,50	61,00	63,00	65,00	60,00	58,00	54,00	65,00					0,90			0,83	0,77	0,93	
51	Pelabuhan Tanjung Wangi	70	80,86	80,78	87,59		84,29	86,92	84,68			83,52		84,00	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		
52	Pelabuhan Probolinggo																								
	a. Terminal Lama	70	83,00	81,00	81,96			81,82	65,73			77,93			1,00	1,00			0,94			1,00	1,00	0,00	
	b. Terminal Baru	70	69,00	64,00	57,00			61,00	40,00			77,00			0,99	0,91			0,57			1,00	1,00	1,00	
53	Pelabuhan Panarukan	60																							
54	Pelabuhan Kalianget	60	45,00	45,00	67,14	67,14	23,57	26,46	28,46	31,75			21,17	35,67	0,75	0,75		1,00	0,39	0,44	0,47	0,53		0,35	0,59
55	Pelabuhan Benoa	60																							
56	Pelabuhan Padang Bai	-																							
57	Pelabuhan Celukan Bawang	50																							
58	Pelabuhan Lembar	50																				1,00	1,00	1,00	
59	Pelabuhan Bima																								
	a. Terminal I	50																							
	b. Terminal II	50																							
60	Pelabuhan Badas	50																							
61	Pelabuhan Kupang	70																							
62	Pelabuhan Waingapu	50	50,00												1,00										
63	Pelabuhan Ende	75																							
64	Pelabuhan Laurentius Say	50					50,00											1,00				0,00	0,00	0,00	
65	Pelabuhan Kalabahi	50																							

[illegible]